



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025



 **EKA PUTRA, S.E., M.M.**
BUPATI TANAH DATAR

 **AHMAD FADLY, S.Psi.**
WAKIL BUPATI TANAH DATAR



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-3
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-25
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-58
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1.1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2.1
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-3.1
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah ..	III-1
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
1.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan	 I-4
1.2	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian per Kecamatan	 I-5
1.3	Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025	 I-5
1.4	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (2024-2025)	 I-6
1.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan (2024-2025)	 I-7
1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja Tahun 2025	 I-7
1.7	Jumlah Kecamatan dan Nagari	 I-7
1.8	ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	 I-11
1.9	ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Perangkat Daerah Tahun 2025	 I-11
1.10	ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2025	 I-13
1.11	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2025	 I-14
1.12	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	 I-15
1.13	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	 I-16
1.14	ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025	 I-18
1.15	Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025	 I-18
1.16	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	 I-20
1.17	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	 I-20
1.18	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	 I-21
2.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2024-2025	 II-1.1
2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	 II-3.1
2.3	Pengukuran Kinerja 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja	 II-3.5



Tahun 2025

2.4	Jumlah Hafiz / Hafizah yang diwisuda Tahun 2021 – 2025	II-3.10
2.5	Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2025	II-3.12
2.6	Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 – 2025 per Objek Wisata di Kabupaten Tanah Datar	II-3.24
2.7	Capaian Opini BPK tahun 2022-2025	II-3.29
2.8	Capaian Indikator Nilai SAKIP	II-3.32
2.9	Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024	II-3.33
2.10	Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	II-3.34
2.11	Aplikasi yang telah terintegrasi	II-3.36
2.12	capaian indikator Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas baik Tahun 2021-2025	II-3.42
2.13	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	II-3.49
2.14	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	II-3.52
2.15	Jumlah Sekolah dan Akreditasinya	II-3.69
2.16	Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2025	II-3.70
2.17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumbar Tahun 2025	II-3.73
2.18	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 – 2025	II-3.77
2.1 9	Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025	II-3.80
2.20	Pengukuran capaian kinerja peningkatan produksi tanaman hortikultura Tahun 2025	II-3.85
2.21	Pengukuran capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan Tahun 2025	II-3.87
2.22	Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2025	II-3.89
2.23	Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Populasi Ternak Tahun 2025	II-3.91
2.24	Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2025	II-3.93
2.25	Produksi Ikan Budidaya 2022 – 2025	II-3.94
2.26	Nilai interval kepuasan berada dengan nilai dan indeks	II-3.105
2.27	Target dan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025	II-3.106
2.28	Target dan Realisasi IKLH Tahun 2021-2025	II-3.107
2.29	Lembaga Jasa Keuangan Syariah	II-3.124
2.30	Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat Kabupaten	II-3.128



Tanah Datar Tahun 2025

2.31	Ralisasi Anggaran dalam APBD		II-3.130
4.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025		IV-1
4.2	Target Pencapaian SPM Sekolah Dasar Tahun 2025		IV-3
4.3	Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025		IV-3
4.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan		IV-4
4.5	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan		IV-5
4.6	Hasil Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025		IV-6
4.7	Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2025		IV-7
4.8	Hasil Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025		IV-8
4.9	Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan		IV-8
4.10	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan		IV-10
4.11	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan		IV-21
4.12	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan		IV-22
4.13	Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan		IV-23
4.14	Target SPM Urusan Pekerjaan Umum		IV-37
4.15	Alokasi Anggaran Penerapan SPM urusan pekerjaan umum		IV-39
4.16	Jumlah Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum		IV-40
4.17	Target SPM Urusan Pekerjaan Umum		IV-41
4.18	Permasalahan dan Solusi		IV-43
4.19	Target dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat		IV-44
4.20	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan perumahan rakyat		IV-45
4.21	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2025		IV-46
4.22	Hasil capaian SPM Perumahan rakyat		IV-47
4.23	Permasalahan dan Solusi		IV-47
4.24	Target Pencapaian SPM Daerah Urusan Trantibum		IV-49
4.25	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Trantibum		IV-49
4.26	Daftar Pegawai Pns Dan Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja		IV-50
4.27	Hasil capaian SPM urusan Trantibumlinmas		IV-50
4.28	Target Pencapaian SPM Kebencanaan		IV-53
4.29	Alokasi anggaran SPM Urusan Kebencanaan		IV-56
4.30	Dukungan personil SPM Urusan Kebencanaan Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan		IV-58
4.31	Dukungan personil SPM Urusan Kebencanaan Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan		IV-58



4.32	Hasil capaian SPM urusan Kebencanaan		IV-58
4.33	Target Pencapaian SPM Daerah Urusan Kebakaran		IV-66
4.34	Anggaran SPM urusan kebakaran		IV-67
4.35	Daftar Pegawai Pns Dan Pegawai Kontrak Bidang Damkar		IV-67
4.36	Hasil capaian SPM Urusan Kebakaran		IV-67
4.37	Target Penerapan SPM Urusan Sosial		IV-69
4.38	Alokasi anggaran SPM Urusan Sosial		IV-73
4.39	Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Sosial		IV-74
4.40	Hasil Capaian SPM Sosial		IV-75



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD Kabupaten Tanah Datar memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA, tanggal 12 Februari 2026 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini telah disusun sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.



Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar menjadi amal jariyah bagi kita semua serta senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk dan ridho Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, 30 Maret 2026

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA, SE, MM



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan LPPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
- BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- BAB V Penutup

1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. Data Geografis Wilayah
- 1) Kondisi Geografis Daerah
Secara geografis terletak pada 00°17' LS-00°39' LS dan 100° 19' BT-100° 51' BT.
 - 2) Batas Administrasi Daerah
Batas administrasi Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.
 - 3) Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Nagari
Secara administratif luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah ±1.377,19 Km² atau 137.719 Ha, atau sekitar 3,26% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di

Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 19.929 Ha atau 14,47%, sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 2.631 Ha atau 1,91%. Wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	X Koto	14.869	10,80	9	41
2.	Batipuh	10.118	7,35	8	49
3.	Rambatan	12.939	9,40	5	33
4.	Lima Kaum	3.064	2,22	5	33
5.	Tanjung Emas	12.875	9,35	4	19
6.	Lintau Buo	11.065	8,04	4	22
7.	Sungayang	6.837	4,96	5	14
8.	Sungai Tarab	8.387	6,09	10	32
9.	Pariangan	5.830	4,23	6	21
10.	Salimpaung	5.635	4,09	6	27
11.	Padang Ganting	6.861	4,98	2	7
12.	Tanjung Baru	2.631	1,91	2	17
13.	Lintau Buo Utara	19.929	14,47	5	63
14.	Batipuah Selatan	16.679	12,11	4	17
Jumlah		1.377,19	100,00	75	395

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

4) Topografis dan Penggunaan Lahan

Kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Singgalang dan Sago serta diperkaya pula dengan lima sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Kabupaten Tanah Datar sebagian besar berada di ketinggian 200-800 mdpl dengan luas 86.960 Ha atau 62,52% dari total luas keseluruhan, sedangkan wilayah di ketinggian 2601-3200 mdpl dengan luas 354 Ha atau 0,25% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan 137.719 Ha, didominasi hutan rimba seluas 60.253 Ha (43,75%) dan lahan sawah seluas 24.850 Ha (18,04%). Lahan pertanian selain sawah yaitu tegalan/ladang seluas 12.349 Ha (9,03%) dan perkebunan seluas 18.814 Ha (13,66%). Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Per Kecamatan

Kecamatan	Klasifikasi Tutupan Lahan										Total
	Danau / Situ	Empanan	Hutan Rimbun	Perkebunan / Kebun	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Rawan	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tegalan / Ladang	
X Koto	5	0	8.731	42	308	0	2.131	1.671	20	1.961	14.869
Batipuh	0	2	4.738	1.263	269	0	2.268	1.183	16	379	10.118
Batipuh Selatan	3.881	2	9.265	1.450	148	0	582	191	10	1.149	16.679
Pariangan	0	0	2.746	424	197	0	2.263	177	0	24	5.830
Rambatan	2.954	0	904	3.550	361	0	1.968	233	22	2.946	12.939
Lima Kaum	0	0	0	779	463	0	1.691	26	0	105	3.064
Tanjung Emas	0	0	6.496	1.967	330	0	1.814	1.192	50	1.026	12.875
Padang Ganting	7	0	2.326	1.076	97	0	1.475	656	55	1.169	6.861
Lintau Buo	6	0	5.227	2.122	422	35	1.643	1.060	112	439	11.065
Lintau Buo Utara	0	0	10.691	3.355	392	0	2.694	1.874	67	854	19.929
Sungayang	1	0	4.267	644	178	0	1.418	309	10	12	6.837
Sungai Tarab	0	2	2.920	1.140	372	0	2.713	891	0	349	8.387
Salimpaung	5	0	1.630	129	334	0	1.381	983	0	1.174	5.635
Tanjung Baru	1	0	312	243	120	0	808	382	2	762	2.631
Total	6.860	6	60.253	18.184	3.989	35	24.850	10.828	365	12.349	137.719

Sumber : Rencana atau Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

c. Jumlah Penduduk

1) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tercatat sebanyak 384.689 jiwa. Kepadatan penduduk 279,35 per Km². Jumlah dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km ²
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	
1.	X Koto	148,68	22.886	22.391	45.277	304,53
2.	Batipuh	101,18	15.730	15.946	31.676	313,07
3.	Rambatan	129,38	19.755	19.409	39.164	302,71
4.	Lima Kaum	30,63	20.685	20.724	41.409	1351,91
5.	Tanjung Emas	128,75	12.875	12.922	25.797	200,37
6.	Lintau Buo	110,65	10.339	10.208	20.547	185,69
7.	Sungayang	68,36	9.779	9.857	19.636	287,24
8.	Sungai Tarab	83,86	17.210	16.985	34.195	407,76
9.	Pariangan	58,29	10.453	10.717	21.170	363,18

10.	Salimpaung	56,35	12.472	12.587	25.059	444,70
11.	Padang Ganting	68,61	7.391	7.638	15.029	219,05
12.	Tanjung Baru	26,3	7.553	7.415	14.968	569,13
13.	Lintau Buo Utara	199,28	19.657	19.533	39.190	196,66
14.	Batipuh Selatan	166,78	5.729	5.843	11.572	69,38
Tanah Datar		1.377,1	192.514	192.175	384.689	279,35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2) Komposisi Penduduk

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebanyak 382.674 jiwa menjadi 384.689 jiwa pada tahun 2025. Komposisi penduduk laki-laki mengalami peningkatan, tahun 2024 berjumlah 191.513 jiwa atau 50,04% sedangkan tahun 2025 menjadi 192.514 jiwa atau 50,04%, komposisi penduduk perempuan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebanyak 191.161 jiwa atau 49,95% dan pada tahun 2025 menjadi 192.175 jiwa atau 49,96%. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (2024-2025)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%
2024	382.674	191.513	50,04	191.161	49,95
2025	384.689	192.514	50,04	192.175	49,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025

b) Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan dari 380.727 jiwa pada tahun 2024 menjadi 384.689 jiwa pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,04% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Komposisi Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan 2024-2025

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan %	Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
2024	382.674	0,51	1.377	276.46
2025	384.689	1.04	1.377,19	279,35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025

c) Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Proporsi Angkatan Kerja tahun 2025

NO	Kecamatan	Penduduk Tidak Bekerja	Penduduk Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/7*100)
1.	X Koto	1.276	12.110	13.386	17.107	30.493	43,9
2.	Batipuh	1.207	8.173	9.380	11.599	20.979	44,71
3.	Rambatan	1.255	10.124	11.379	14.634	26.013	43,74
4.	Lima Kaum	1.418	12.510	13.928	14.269	28.197	49,4
5.	Tanjung Emas	806	7.074	7.880	9.494	17.374	45,36
6.	Lintau Buo	719	5.370	6.089	7.798	13.887	43,85
7.	Sungayang	534	5.161	5.695	7.296	12.991	43,84
8.	Sungai Tarab	1.202	9.078	10.280	12.402	22.682	45,32
9.	Pariangan	624	5.961	6.585	7.524	14.109	46,67
10.	Salimpaung	663	6.425	7.088	9.400	16.488	42,99
11.	Padang Ganting	515	3.883	4.398	5.509	9.907	44,39
12.	Tanjung Baru	511	3.729	4.240	5.717	9.957	42,58
13.	Lintau Buo Utara	1.668	9.804	11.472	14.576	26.048	44,04
14.	Batipuh Selatan	423	2.899	3.322	4.533	7.855	42,29
Jumlah		12.821	102.301	115.122	141.858	256.980	623,08
Rata-rata				-	-	-	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Ket.: Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

d. Jumlah Kecamatan dan Nagari

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 19.929 Ha atau 14,47%, sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 2.631 Ha atau 1,91%. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Kecamatan dan Nagari

No.	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	X Koto	9	41
2.	Batipuh	8	49
3.	Rambatan	5	33
4.	Lima Kaum	5	33
5.	Tanjung Emas	4	19
6.	Lintau Buo	4	22

No.	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
7.	Sungayang	5	14
8.	Sungai Tarab	10	32
9.	Pariangan	6	21
10.	Salimpaung	6	27
11.	Padang Ganting	2	7
12.	Tanjung Baru	2	17
13.	Lintau Buo Utara	5	63
14.	Batipuah Selatan	4	17
Jumlah		75	395

Sumber: Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

1) Jumlah Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 sebanyak 41 Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah

a. Dinas

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Pangan dan Perikanan
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Pertanian
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

b. Badan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Kecamatan

1. Kecamatan X Koto
2. Kecamatan Batipuh
3. Kecamatan Rambatan
4. Kecamatan Lima Kaum
5. Kecamatan Tanjung Emas
6. Kecamatan Lintau Buo
7. Kecamatan Sungayang
8. Kecamatan Sungai Tarab
9. Kecamatan Pariangan
10. Kecamatan Salimpaung
11. Kecamatan Padang Ganting
12. Kecamatan Tanjung Baru
13. Kecamatan Lintau Buo Utara
14. Kecamatan Batipuh Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Rumah Sakit Umum Daerah

Selain dari 41 perangkat daerah, sampai tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki 384 unit dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Dasar Hukum
1.	Satuan Pendidikan Non Formal (2 UPT SKB)	Perbup Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (300 UPT Sekolah Dasar)	Perbup Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (49 UPT Sekolah Menengah Pertama)	Perbup Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	UPT Puskesmas (23 Puskesmas)	Perbup Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan
5.	UPT Instalasi Farmasi	Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan
6.	UPT Laboratorium Konstruksi dan UPT Alat Berat dan Perbengkelan	Perbup Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Konstruksi dan Alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7.	UPT Kebersihan dan Persampahan	Perbup Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
8.	UPT Balai Latihan Kerja	Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9.	UPT Balai Benih Ikan	Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Perikanan
10.	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Perbup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian

No	Uraian	Dasar Hukum
11.	UPT Pengelolaan Pasar	Perbup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
12.	UPT Pengelolaan Sentra Tenun	Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Sentra Tenun pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13.	UPTD Metrologi Legal	Perbup Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
14.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Pegawai Pemerintah

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kondisi 31 Desember 2025 berjumlah 5.539 orang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7

ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki-Laki	1.431	25,83
2.	Perempuan	4.108	74,17
Jumlah		5.539	100,0

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

ASN berdasarkan jenis kelamin pada perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8

ASN berdasarkan Jenis Kelamin pada Perangkat Daerah Tahun 2025

No	OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	54	51	105
2.	Sekretariat DPRD	11	10	21
3.	Inspektorat Daerah	18	28	46
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	21	20	41
5.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	18	26



No	OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17	25	42
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	14	26
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	4	26
9.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	5	13	18
10.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	689	2538	3226
11.	Dinas Kesehatan	92	668	760
12.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	48	15	63
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	15	19	34
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	55	4	59
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	16	25
16.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	10	22
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5	19	24
18.	Dinas Perhubungan	27	13	40
19.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11	14	25
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	16	28
21.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8	18	26
22.	Dinas Pangan dan Perikanan	15	13	28
23.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	17	16	33
24.	Dinas Pertanian	52	74	126
25.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	15	12	27
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23	12	35
27.	Rumah Sakit Umum Daerah	72	356	428
28.	Kantor Camat Rambatan	5	7	12
29.	Kantor Camat X Koto	4	8	12
30.	Kantor Camat Pariangan	5	7	12
31.	Kantor Camat Lima Kaum	8	4	12
32.	Kantor Camat Tanjung Emas	7	7	14
33.	Kantor Camat Sungayang	6	5	11
34.	Kantor Camat Sungai Tarab	5	7	12
35.	Kantor Camat Salimpaung	6	6	12

No	OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
36.	Kantor Camat Lintau Buo Utara	6	5	11
37.	Kantor Camat Lintau Buo	6	6	12
38.	Kantor Camat Padang Ganting	7	5	12
39.	Kantor Camat Tanjung Baru	4	7	11
40.	Kantor Camat Batipuh Selatan	9	5	14
41.	Kantor Camat Batipuh	5	9	14
42.	Penugasan Diluar Instansi	4	1	5
43.	CLTN		3	3
JUMLAH		1.431	4.108	5.539

Sumber: BKPSDM Tahun 2025

ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan golongan ruang kepangkatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan
Tahun 2025

NO	JENIS KEPEGAWAIAN/ GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	PNS	3.901
	a. Golongan I	9
	b. Golongan II	356
	c. Golongan III	2.624
	d. Golongan IV	912
2.	PPPK	1.636
	a. Golongan V	41
	b. Golongan VII	201
	c. Golongan IX	1.367
	d. Golongan X	27
Jumlah		5.539

Sumber: BKPSDM Tahun 2025

Sebaran ASN pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel 1.10
Sebaran ASN pada Perangkat Daerah
Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2025

NO	SOPD	PNS														PPPK				JML	
		I/B	I/C	I/D	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	V	VII	IX		X
1	Sekretariat Daerah			1	2		4	8	15	19	9	22	3	8	6		1		7		105
2	Sekretariat DPRD				1		1		3	5	1	6	2	1	1						21
3	Inspektorat Daerah							1	2	9	5	12	9	5	1	1			1		46
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan						2		5	9	3	13	6	2	1						41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						2	1	2	6		9	3	2	1						26
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah						1	2	4	4	4	14	6	1	1				5		42
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1	2	3	2	5	6	3		1				3		26
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2	2	3	6	4	4	2	2	1						26
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik						1	1	2	3	1	3	2		1				4		18
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			2	5	7	14	11	60	361	210	659	59	293	269		1		1275		3226
11	Dinas Kesehatan		1		3		12	123	41	99	138	148	33	25	6			90	27	14	760
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan				1	1	7	10	9	13	5	12	4			1					63
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup					2	3		6	7		11	3	2							34
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		1		1		5	3	11	3	4	5	2	1			23				59
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						1	1	3	3	2	7	5	2	1						25
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						4		3	1	2	7	3		1						21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							3	4	3	3	6	2	2	1						24
18	Dinas Perhubungan						8	2	15	4	3	6	1	1							40
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika							3	2	3	1	5	3	1					7		25
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu						2		6	1	3	7	2	3				2	2		28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						1	7	5	3	1	3	3	1	2						26
22	Dinas Pangan dan Perikanan						2	3	4		3	11	2	1	1				1		28
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga						1	2	4	6	1	9	3	2	1				4		33
24	Dinas Pertanian						1	2	4	25	7	21	10	5	2		15	4	29	1	126
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan			1			1	2	2	7	5	6		2					1		27
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				2		2		6	9	6	8	1		1						35
27	Rumah Sakit Umum Daerah		1	1	3	1	7	28	9	34	60	109	23	19	15			105	1	12	428



NO	SOPD	PNS														PPPK				JML	
		I/B	I/C	I/D	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	V	VII	IX		X
28	Kantor Camat Rambatan							1	1	2	2	5	1								12
29	Kantor Camat X Koto							3		2		6	1								12
30	Kantor Camat Pariangan								1	3	2	4	2								12
31	Kantor Camat Lima Kaum					1		1			3	6	1								12
32	Kantor Camat Tanjung Emas							2	2	3	2	3	1	1							14
33	Kantor Camat Sungayang							1	1	3	2	2	2								11
34	Kantor Camat Sungai Tarab							2		3	3	2	2								12
35	Kantor Camat Salimpaung					1		1	1	2	2	3	1	1							12
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara						1	2	1	2	2	1	2								11
37	Kantor Camat Lintau Buo			1				1	2	4	1	1	1	1							12
38	Kantor Camat Padang Ganting					1		2	1	1	3	3		1							12
39	Kantor Camat Tanjung Baru					1	1	1			2	5	1								11
40	Kantor Camat Batipuh Selatan							1	3	2	3	3	1								13
41	Kantor Camat Batipuh								4	2	2	6									14
42	Penugasan Diluar Instansi									2	1	1	1								5
43	CLTN						1		1		1										3
Jumlah		0	3	6	18	15	88	235	251	676	517	1180	212	385	314	1	41	201	1367	27	5537

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 terlihat pada tabel 1.11. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan persentase terbanyak yakni lulusan S1 dengan jumlah 3.947 orang atau 71,25% dari jumlah ASN.

Tabel 1.11

ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	SD	16
2.	SLTP	24
3.	SLTA	250
4.	D I	1
5.	D II	20
6.	D III	831
7.	D IV	128
8.	SARJANA	3.947
9.	PASCA SARJANA	322
JUMLAH		5.539

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

Sebaran ASN pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.12
Sebaran ASN pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	OPD	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SI	S2	JML
1	Sekretariat Daerah	1	2	16			8	11	58	15	111
2	Sekretariat DPRD	1		3			1	1	13	2	21
3	Inspektorat Daerah						1	1	37	8	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan			1			2	2	25	11	41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			2			4	1	17	6	30
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			5			6		24	4	39
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1			4		20	2	27
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4			1		15	2	22
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik			2			1	2	9	2	16
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	9	68	1	50	19	1	3.280	86	3.518
11	Dinas Kesehatan	4		30	1		461	69	170	41	776
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		1	16			10		27	11	65
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup		2	3			3		19	4	31
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2	1	38		2	2		16		61
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3			2	7	15	5	32
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			3			2		13	3	21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			3			3	1	17	3	27
18	Dinas Perhubungan		1	10		2	8	10	8	4	43
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika			2			4		17	4	27
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan			1			4		18	5	28



NO	OPD	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SI	S2	JML
	Terpadu Satu Pintu										
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			4			11	1	10		26
22	Dinas Pangan dan Perikanan			3			3		20	2	28
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga			3			6	1	19	4	33
24	Dinas Pertanian			24			10	3	82	9	128
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	1		3			3		18	1	26
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	1	3			2	2	23	1	33
27	Rumah Sakit Umum Daerah	4	6	12			238	16	105	54	435
28	Kantor Camat Rambatan						1	2	4	1	8
29	Kantor Camat X Koto			6			1	1	5		13
30	Kantor Camat Pariangan			2					9	1	12
31	Kantor Camat Lima Kaum			3				1	5	1	10
32	Kantor Camat Tanjung Emas			3					6		9
33	Kantor Camat Sungayang			1			2	3	4		10
34	Kantor Camat Sungai Tarab			2			1		8		11
35	Kantor Camat Salimpaung		1	1			3		4	2	11
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara			3				1	5	1	10
37	Kantor Camat Lintau Buo		1	2			3		5		11
38	Kantor Camat Padang Ganting			2			3		4		9
39	Kantor Camat Tanjung Baru			1			2	1	6	1	11
40	Kantor Camat Batipuh Selatan			2			1		8		11
41	Kantor Camat Batipuh			1			2		5	1	9
42	Penugasan Diluar Instansi			1					5		6
43	CLTN						3		1		4
JUMLAH		18	25	293	2	54	841	138	4.179	297	5.847

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

ASN Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tingkat Jabatan tahun 2025 pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.13
ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1.	Eselon II	28
2.	Eselon III	151
3.	Eselon IV	198
4.	Fungsional	4.495
5.	Pelaksana	667
JUMLAH		5.847

Sumber: BKPSDM Tahun 2025

ASN pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.14
Sebaran ASN Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025

NO	SOPD	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Fung sional	Pelak sana	JML
1	Sekretariat Daerah	1	6	10		4		30	54	105
2	Sekretariat DPRD		1	3		1		3	13	21
3	Inspektorat Daerah		1	6		1		31	7	46
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		1	1	5	1		20	13	41
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	1	3	2		9	10	26
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		1	1	4	9		13	14	42
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1	1	3	7		3	11	26
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9			12	26
9	Badan Kesatuan Bangsa & Politik		1	1	2	2		3	9	18
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1	1	5	9		3112	99	3227
11	Dinas Kesehatan		1	1	4	3	1	663	87	760
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			1	5	3	2	17	35	63
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup			1	4	3	1	11	14	34
14	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			1	3	8		20	27	59
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		1	1	4	2	1	10	6	25
16	Dinas Kependudukan Dan		1	1	4	2		2	11	21



NO	SOPD	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Fung sional	Pelak sana	JML
	Pencatatan Sipil									
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1	1	3	2		5	12	24
18	Dinas Perhubungan			1	2	6			31	40
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika		1	1	3	2		10	8	25
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1	1		1		18	7	28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		1	1	2	1		13	8	26
22	Dinas Pangan dan Perikanan		1	1	3	3	1	11	8	28
23	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga		1	1	5	1		10	15	33
24	Dinas Pertanian		1	1	5	2	1	94	22	126
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan		1	1	2	4	2	9	8	27
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1	1	2	6	3	7	15	35
27	Rumah Sakit Umum Daerah			1	4	9		371	43	428
28	Kantor Camat Rambatan			1	1	4	2		4	12
29	Kantor Camat X Koto			1	1	4	2		4	12
30	Kantor Camat Pariangan			1	1	4	2		4	12
31	Kantor Camat Lima Kaum			1	1	4	2		4	12
32	Kantor Camat Tanjung Emas			1	1	4	2		6	14
33	Kantor Camat Sungayang			1	1	4	2		3	11
34	Kantor Camat Sungai Tarab			1	1	4	2		4	12
35	Kantor Camat Salimpaung			1	1	4	2		4	12
36	Kantor Camat Lintau Buo Utara			1	1	4	2		3	11
37	Kantor Camat Lintau Buo			1	1	3	2		5	12
38	Kantor Camat Padang Ganting			1	1	4	2		4	12
39	Kantor Camat Tanjung Baru			1	1	4	2		3	11
40	Kantor Camat Batipuh Selatan			1	1	4	2		6	14
41	Kantor Camat Batipuh			1	1	4	2		6	14
42	Penugasan Diluar Instansi								5	5
43	CLTN								3	3
JUMLAH		1	27	56	95	158	40	4495	667	5539

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dengan target Rp185.887.347.805,17 dan terealisasi Rp182.103.141.737,24 atau 97,96%. Rincian target dan realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar

terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.15
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	53.057.468.625,00	48.527.769.063,68	91,46
2.	Retribusi Daerah	100.681.137.660,00	101.192.685.169,00	100,50
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	26.875.324.215,00	26.876.336.068,00	100,00
4.	Lain-lain PAD yang sah	5.273.417.305,17	5.506.351.436,56	104,41
Jumlah		185.887.347.805,17	182.103.141.737,24	97,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Tahun 2025 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.101.242.147.706,64 dengan realisasi sebesar Rp1.119.062.747.480,00 atau 101,61% terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.047.566.623.160,00	1.063.327.631.062,00	101,50
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.675.524.546,64	55.735.116.418,00	103,83
JUMLAH		1.101.242.147.706,64	1.119.062.747.480,00	101,61

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Tahun 2025 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp7.921.450.552,00 dengan realisasi sebesar Rp11.632.338.458,00 atau 146,84% dengan perincian terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.039.387.906,00	69,29
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Ketentuan Perundang- Undangan	6.421.450.552,00	6.422.950.552,00	100,02
JUMLAH		7.921.450.552,00	11.632.338.458,00	146,84

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.333.857.237.785,87 dengan realisasi sebesar Rp1.249.941.660.830,00 atau 93,70% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.066.732.366.489,87 dengan realisasi sebesar Rp1.001.178.851.223,00 atau 93,85% terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp720.611.344.233,87 dengan realisasi sebesar Rp688.756.962.637,00 atau 95,57% yang terdiri dari:

- Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp438.020.383.601,64 dengan realisasi sebesar Rp416.407.979.473,00 atau 95,06%.
- Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dianggarkan sebesar Rp239.952.754.816,23 dengan realisasi sebesar Rp230.148.887.792,00 atau 95,91%.
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp12.249.954.600,00 dengan realisasi Rp12.185.524.240,00 atau 99,47%.
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp845.129.121,00 dengan realisasi Rp660.152.119,00 atau 78,11%
- Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp710.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp710.879.714,00 atau

99,99%.

- Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp28.832.242.095,00 dengan realisasi Rp28.643.539.299,00 atau 99,34%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp321.865.399.150,00 dengan realisasi Rp289.146.849.698,00 atau 89,83% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp50.953.522.759,00 dengan realisasi sebesar Rp36.511.444.879,00 atau 71,65%.
- Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp120.921.097.991,00 dengan realisasi sebesar Rp112.382.680.656,00 atau 92,93%.
- Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp10.363.329.418,00 dengan realisasi sebesar Rp9.499.936.252,00 atau 91,66%.
- Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp29.576.234.197,00 dengan realisasi sebesar Rp26.616.708.006,00 atau 89,99%.
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.283.149.100,00 dengan realisasi sebesar Rp616.830.000,00 atau 48,07%.
- Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan sebesar Rp31.518.933.607,00 dengan realisasi sebesar Rp31.293.090.881,00 atau 99,28%.
- Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dianggarkan sebesar Rp11.310.004.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.238.714.258,00 atau 81,68%.
- Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp65.939.128.078,00 dengan realisasi sebesar Rp62.987.444.766,00 atau 95,52%

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp485.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp52.906.667,00 atau 10,90%.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp20.996.401.006,00 dengan realisasi sebesar Rp20.805.893.121,00 atau 99,09% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp12.628.624.256,00 dengan realisasi sebesar Rp12.507.843.636,00 atau 99,04%.
- Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp2.795.344.350,00 dengan realisasi sebesar Rp2.746.918.910,00 atau 98,26%
- Bantuan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp966.632.400,00 dengan realisasi sebesar Rp966.632.400,00 atau 100%.

Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp4.605.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.584.498.175,00 atau 99,53%

e. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.774.222.100,00 dengan realisasi sebesar Rp2.416.239.100,00 atau 87,09% dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp2.774.222.100,00 dengan realisasi sebesar Rp2.416.239.100,00 atau 87,09%.

2) Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp107.961.130.379,00 dengan realisasi sebesar Rp99.532.759.288,00 atau 92,19% terdiri dari:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp62.747.882.755,00 dengan realisasi sebesar Rp58.485.926.015,00 atau 93,20%

- b. Belanja modal Bangunan dan Gedung
Belanja Modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp30.637.610.215,00 dengan realisasi sebesar Rp27.609.108.520,00 atau 90,11%.
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp7.940.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.246.505.390,00 atau 91,26%
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.050.727.409,00 dengan realisasi sebesar Rp5.663.631.247,00 atau 93,60%.
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp584.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp527.588.116,00 atau 90,24%.
- 3) Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp6.208.852.998,00 dengan realisasi sebesar Rp3.098.467.998,00 atau 49,90%.
Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer
Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp152.954.887.919,00 dengan realisasi sebesar Rp146.131.582.321,00 atau 95,53% terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp8.690.137.019,00 dengan realisasi Rp4.705.027.319,00 atau 54,14%
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp144.264.750.900,00 dengan realisasi Rp141.426.555.002,00 atau 98,03%

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Datar mencerminkan ketidaksesuaian antara pencapaian yang diinginkan dan kondisi riil yang ada saat ini. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa sektor, seperti infrastruktur dan perekonomian, tantangan besar tetap ada, termasuk rendahnya cakupan layanan dasar, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik yang merata. Hal ini berakar dari kekuatan daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya. Meskipun sektor pertanian dan pariwisata menunjukkan keberhasilan, masih ada potensi yang belum optimal, dan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan dan memaksimalkan potensi yang ada secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Adapun permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan Nilai IPM Kabupaten Tanah Datar (masih rendahnya usia harapan hidup, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, perlunya peningkatan harapan lama sekolah, dan masih rendahnya pengeluaran perkapita);
2. Tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar;
3. Perlunya penurunan Angka Prevalensi *Stunting*;
4. Rendahnya Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja;
5. Rendahnya tingkat pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar (ADHB);
6. Masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar;
7. Masih rendahnya Rasio PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar;
8. Masih rendahnya Rasio Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum);
9. Masih rendahnya Devisa Pariwisata (Jumlah tamu wisatawan mancanegara/kunjungan wisatawan asing) Kabupaten Tanah Datar;
10. Masih perlunya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;

11. Masih rendahnya Rasio Pajak Terhadap PDRB;
12. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan;
13. Belum optimalnya realisasi investasi;
14. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
15. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang belum sesuai peruntukannya;
16. Tingginya alih fungsi lahan;
17. Tingginya timbulan sampah;
18. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup;
19. Belum optimalnya pelestarian pengelolaan keaneka ragaman hayati;
20. Belum optimalnya mitigasi bencana;
21. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum perpipaan;
22. Belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya;
23. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK);
24. Masih rendahnya warisan budaya yang dilestarikan;
25. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
26. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
27. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"** dengan makna sebagai berikut:

- a. **Madani**, adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi serta supremasi hukum.
- b. **Maju**, Kabupaten Tanah Datar yang maju dalam arti mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, kualitas infrastruktur yang baik, dan harapan hidup tinggi, sehingga mampu berdaya saing dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang, ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- c. **Berkelanjutan**, adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Berbudaya**, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan/atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

2. Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi.
- d. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
- e. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- f. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
- g. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah juga dilaksanakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1. Program bantuan membajak lahan pertanian, pupuk bersubsidi, asuransi tani, pembangunan irigasi, dan bantuan bertanam padi.
- 2. Program jaminan kesehatan dan berobat gratis bagi masyarakat (Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat).

3. Program satu rumah satu hafizh/hafizah, kesejahteraan guru surau/tahfidz/TPA, serta optimalkan fungsi surau sebagai tempat belajar agama, adat, budaya dan silek.
 4. Program peningkatan kesejahteraan dan kualitas ASN.
 5. Optimalkan fungsi niniak mamak, ulama, bundo kanduang untuk mewujudkan ABS-SBK dan melestarikan kebudayaan serta mengupayakan peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan.
 6. Program satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari menuju "*One Village One Product*".
 7. Membangun pusat kreativitas anak muda (*creative hub*) dan sarana olahraga di nagari-nagari.
 8. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
 9. Meningkatkan investasi dan peningkatan kualitas usaha mikro untuk membuka lapangan pekerjaan.
 10. Mewujudkan Tanah Datar bersih *zero waste* dengan melaksanakan program satu nagari satu bank sampah, menghidupkan gotong royong dan gerakan toilet bersih di rumah ibadah, sekolah dan fasilitas umum.
- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam perencanaan kinerja, program Perangkat Daerah semestinya berkorelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan

setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2025-2030 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 3) Program Pengembangan Kurikulum
 - 4) Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Urusan Kesehatan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)
 - c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 6) Program Penataan Bangunan Gedung
 - 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 8) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 9) Program Pengembangan Jasa Kontruksi
 - 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - d. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengembangan Perumahan
 - 3) Program Kawasan Permukiman
 - 4) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- e. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 3) Program Penanggulangan Bencana
 - 4) Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - f. Urusan Sosial
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program pemberdayaan social
 - 3) Program rehabilitasi social
 - 4) Program perlindungan dan jaminan sosial
 - 5) Program penanganan bencana
 - 6) Program pengelolaan taman makam pahlawan
 - 7) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
- a. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 4) Program Hubungan Industrial
 - b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
 - 2) Program perlindungan Perempuan
 - 3) Program pengelolaan sistem data gender dan anak
 - 4) Program pemenuhan hak anak (PHA)
 - 5) Program perlindungan khusus anak
 - c. Urusan Pangan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - d. Urusan Pertanahan
 - 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - 3) Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program

- Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- 4) Program Penetapan Tanah Ulayat
- 5) Program Pengelolaan Tanah Kosong
- 6) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- 7) Program Penatagunaan Tanah
- e. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
 - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 8) Program Penanganan Penyadaran Lingkungan Hidup
 - 9) Program Pengelolaan Persampahan
- f. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pendaftaran Penduduk
 - 3) Program Pencatatan Sipil
 - 4) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penataan Desa
 - 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 4) Program Administrasi Pemerintah Desa
 - 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- i. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- j. Urusan Komunikasi Dan Informatika
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- k. Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 5) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian
 - 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 8) Program Pengembangan UMKM
- l. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 3) Program Promosi Penanaman Modal
 - 4) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- m. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- n. Urusan Statistik
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik
- o. Urusan Persandian
 - 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
- p. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan
 - 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - 3) Program Pembinaan Sejarah
 - 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - 5) Program Pengelolaan Permuseuman
- q. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

r. Urusan Kearsipan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Kearsipan
- 3) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 4) Program Perizinan Penggunaan Arsip

3. Urusan Urusan Pemerintahan Pilihan:

a. Urusan Kelautan Dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

b. Urusan Pariwisata

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pemasaran Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

c. Urusan Pertanian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 6) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 7) Program Penyuluhan Pertanian

d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

- 1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

e. Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

f. Urusan Perindustrian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengelolaan Sistem Informasi

4. Urusan Pemerintahan Daerah:**a. Sekretariat Daerah**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Program Perekonomian Dan Pembangunan

b. Sekretariat DPRD

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

c. Perencanaan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

d. Keuangan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

e. Kepegawaian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Kepegawaian Daerah

f. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

g. Inspektorat Daerah

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi

**h. Kewilayahan
Kecamatan**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 4) Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

- i. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya
 - 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan
 - a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum
 - a) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - b) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - d) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran

serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

RSUD

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Peningkatan Pelayanan BLUD
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota

- 6) Program Penataan Bangunan Gedung
 - a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Program Penyelenggaraan Jalan
 - a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - a) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- d. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengembangan Perumahan
 - a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - d) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- e) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 3) Program Kawasan Permukiman
 - a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 4) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- e. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Satpol PP
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c) Investigasi Kejadian Kebakaran
 - d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - e) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

BPBD

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana
 - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

f. Urusan Sosial

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program pemberdayaan sosial
 - a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program rehabilitasi sosial
 - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial
 - a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 5) Program penanganan bencana
 - a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 6) Program pengelolaan taman makam pahlawan
 - a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
- a. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 4) Program Hubungan Industrial
 - a) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Program perlindungan Perempuan
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Program pengelolaan sistem data gender dan anak
 - a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program pemenuhan hak anak (PHA)
 - a) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Program perlindungan khusus anak
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Urusan Pangan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - a) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi



- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- d. Urusan Pertanahan
 - 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
 - a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - a) Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - 4) Program Penatagunaan Tanah
 - a) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
- e. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - a) Penyimpanan sementara Limbah B3
 - b) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (Pplh)
- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
 - a) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Program Penanganan Penyadaran Lingkungan Hidup
 - a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 9) Program Pengelolaan Persampahan
 - a) Pengelolaan Sampah
- f. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pendaftaran Penduduk
 - a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 3) Program Pencatatan Sipil
 - a) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 4) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - a) Penyusunan Profil Kependudukan
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Penataan Desa
 - a) Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - 4) Program Administrasi Pemerintah Desa
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk
 - a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- i. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - g) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- j. Urusan Komunikasi Dan Informatika
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- k. Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian
 - a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan

Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 8) Program Pengembangan UMKM
 - a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- I. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 3) Program Promosi Penanaman Modal
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- m. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - a) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - a) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - c) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - d) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- n. Urusan Statistik
- 1) Program Penyelenggaraan Statistik
 - a) Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- o. Urusan Persandian
- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
 - a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- p. Urusan Kebudayaan
- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
 - a) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - a) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pembinaan Sejarah
 - a) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 5) Program Pengelolaan Permuseuman
 - a) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- q. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pembinaan Perpustakaan
 - a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - a) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- r. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Pengelolaan Kearsipan
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - a) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - b) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan:
 - a. Urusan Kelautan Dan Perikanan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

b. Urusan Pariwisata

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Program Pemasaran Pariwisata
 - a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - a) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

c. Urusan Pertanian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota



- c) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a) Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b) Pembangunan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- 6) Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Program Penyuluhan Pertanian
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
 - a) Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Urusan Perdagangan
 - 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - a) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - a) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengembangan Ekspor
 - a) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 7) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- f. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
4. Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - j) Penataan Organisasi
 - k) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Administrasi Tata Pemerintahan
 - b) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - c) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - d) Fasilitasi Kerja Sama Daerah

- 3) Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - b) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - c) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - d) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- b. Sekretariat DPRD
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - i) Layanan Administrasi DPRD
 - 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 - a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f) Fasilitasi Tugas DPRD
- c. Perencanaan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

d. Keuangan

BPKAD

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAPPENDA

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- e. Kepegawaian
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Kepegawaian Daerah
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - b) Mutasi dan Promosi ASN
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- f. Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- g. Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 3) Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi
 - a) Pendampingan dan Asistensi

h. Kewilayahan Kecamatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3) Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4) Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

i. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM juga disusun sebagai alat pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Dalam penerapan SPM terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

Perangkat daerah dalam menerapkan SPM mengacu kepada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan umum SPM dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Trantibumlinmas
6. Bidang Sosial

Selanjutnya perangkat daerah memprioritaskan anggaran untuk pencapaian pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dalam semua dokumen perencanaan dan tertuang dalam dokumen kebijakan umum anggaran.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar tersebut diantaranya:

- a. SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Pendidikan Dasar
 - 3) Pendidikan Kesetaraan
- b. SPM Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan
 - 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis

- 12) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif pencegahan/preventif
- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas PUPR dan Pertanahan
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perkim LH
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar dan BPBD
 - 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 - 3) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - 4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- f. SPM Bidang Sosial Pada Dinas Sosial PPPA
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
 - 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pemenuhan pelayanan dasar dimaksud merupakan strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Penurunan Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per kapita dan ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Analisa capaian kinerja makro Pembangunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,49	77,04	0,72
2.	Angka Kemiskinan (%)	4,28	3,59	-16,12
3.	Angka Pengangguran (%)	5,30	5,25	-0,94
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85	2,66	-30,91
5.	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	45,07	47,03	3,30
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,258	0,218	-15,50

Sumber : BPS Sumbar, 2026

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan

harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak (pengeluaran perkapita) dan juga mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu.

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 adalah 77,04, meningkat sebesar 0,72% dibandingkan tahun 2024 adalah 76,49.

2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 4,28% dan pada tahun 2025 sebesar 3,59% mengalami penurunan sebesar 16,12 %.

Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Hal ini masih perlu menjadi perhatian, karena berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi hidup beban sosial serta mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Pengangguran merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah dalam era globalisasi ini karena selain ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi juga dengan semakin berhasilnya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Angka pengangguran Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 adalah sebesar 5,25%, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,94% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada angka 5,30%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sebesar 2,66 % atau turun sebesar 30,91% dibandingkan pada tahun 2024

sebesar 3,85%. Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupatn Tanah Datar salah satunya diakibatkan terjadinya banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan terganggu nya akses dan mobilitas, dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

5. Pendapatan Per Kapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.268 ribu sedangkan pada tahun 2025 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 42.899 ribu, terjadi peningkatan sebesar 3,90%.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk secara menyeluruh. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio atau Indeks Gini yang membagi kesenjangan atau ketimpangan dalam kriteria:

1. $G < 0,30$ berarti Ketimpangan Rendah
2. $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti Ketimpangan Sedang
3. $> 0,50$ berarti Ketimpangan Tinggi

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 adalah sebesar 0,218 dan mengalami penurunan sebesar 15,50% dari angka tahun 2024 sebesar 0,258. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk di Kabupaten Tanah Datar masuk kategori rendah.



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

(TERLAMPIR)

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	52,59%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	83,91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52,06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	35,75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	44,66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Urusan Kesehatan	Persentase kematian ibu	0.19%	Dinas Kesehatan	-
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14.72%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	90%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	90%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	92,44%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67,81%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	93,55%	Dinas Kesehatan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	35,37%	Dinas Kesehatan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63,90%	Dinas Kesehatan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	35,05%	Dinas Kesehatan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	69,76%	Dinas Kesehatan dan Dinas Administrasi dan Pencatatan Sipil	-
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	-
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	44,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	60,30%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	62,98%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0,92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	98,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	60,43%	Dinas Perkim LH	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100%	Dinas Perkim LH	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	0,06%	Dinas Perkim LH	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0%	Dinas Perkim LH	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	66,67%	Satpol PP Damkar dan BPBD	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP Damkar dan BPBD	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	Satpol PP Damkar dan BPBD	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.15%	Satpol PP Damkar dan BPBD	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Satpol PP Damkar dan BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	66,22%	Satpol PP Damkar dan BPBD	

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
6	Urusan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1,93%	Dinas Sosial	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	8,62%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	20,40%	Dinas Sosial	

2.URUSAN PEMERINTAHAN NON WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	5,44%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	0%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Belum adanya Perda terkait Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga belum bisa menentukan jumlah dari IKK tersebut.
2	Urusan PP dan PA	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Sosial PP dan PA	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	0%	Dinas Sosial PP dan PA	-
3	Urusan Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42,97%	Dinas Pangan dan Perikanan	-
4	Urusan Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	23,98%	Dinas PUPRP	-
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Dinas PUPRP	-
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0%	Dinas PUPRP	-
5	Urusan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	14,29%	Dnas Perkim LH	-
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	56.00%	Dnas Perkim LH	-
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,64%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	97,98%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	81,93%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	64,27%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	Dinas PMDPPKB	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	Dinas PMDPPKB	-
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100%	Dinas PMDPPKB	-
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	10,39%	Dinas PMDPPKB dan Dinas Kesehatan	-
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	58,66%	Dinas PMDPPKB	-
		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	89,67%	Dinas PMDPPKB	-
9	Urusan Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.44 Rasio	Dinas Perhubungan	-
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.14 Rasio	Dinas Perhubungan	-
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	Dinas Perhubungan	-
10	Urusan Komunikasi dan Informasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Kominfo	-
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83,33%	Dinas Kominfo	-
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Kominfo	-
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	0,08%	DKUKMP	-
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100%	DKUKMP	-
12	Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-8.26%	Dinas PMPTSP	-
		Realisasi total terhadap target investasi	91,73%	Dinas PMPTSP	-
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	33,81%	Dinas Parpora	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,6%	Dinas Parpora	-
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	1,90%	Dinas Parpora	-
		Persentase jumlah atlet berprestasi	40%	Dinas Parpora	-
14	Urusan Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100%	Dinas Kominfo	-
15	Urusan Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	42,81%	Dinas Kominfo	-
16	Urusan Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	12,5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-40,22%	Dinas Parpora	-
17	Urusan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	59,03%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
18	Urusan Arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	3,06%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75,44%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-

3. URUSAN PILIHAN

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	sumber Data	Keterangan
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100,66%	Dnas Pangan dan Perikanan	-
		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	42.87 Kg/ Kap/ Tahun	Dnas Pangan dan Perikanan	-
2	Urusan Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	10,43%	Dinas Parpora	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-5.35%	Dinas Parpora	Pada bulan November terjadi bencana Banjir Bandang di beberapa wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Tanah Datar sehingga menghambat akses wisata di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-51.95%	Dinas Parpora	Pada bulan November terjadi bencana Banjir Bandang di beberapa wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Tanah Datar sehingga menghambat akses wisata di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.
3	Urusan Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	-12.16%	Dinas Pertanian	-
		Peningkatan produksi hortikultura	9,9%	Dinas Pertanian	-
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	0,21%	Dinas Pertanian	-
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	58,55%	Dinas Pertanian	-
4	Urusan Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2,75%	Dinas Perdagangan	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
5	Urusan Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	95	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	3,68%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Kurangnya kepedulian pelaku industri untuk melapor melalui Sinas 2. kendala akun bagi pelaku industri
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	10,91%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	87,18%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-

4. URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1	Urusan Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	82,35%	Bapedalitbang	-
2	Urusan Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	40,33%	BPKD	-
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	13,87%	BPKD	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	68,65%	BPKD	-
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	23,59%	BPKD	-
3	Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,38%	BKPSDM	-
4	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	Bapedalitbang	-
5	Urusan Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	Inspektorat	-
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5	Inspektorat	-
		Manajemen risiko Indeks	4	Inspektorat	-
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	81,43%	Inspektorat	-
6	Urusan Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Bagian PBJ	-
		Pemanfaatan sistem pengadaan	19.31	Bagian PBJ	-
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	18.33	Bagian PBJ	-
7	Urusan Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu	BPKD	-
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	40%	Bagian Hukum	-
8	Urusan Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	76,67	Bagian Organisasi	-



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Sebagai upaya memperhitungkan dan mengelola dampak pembangunan secara berkelanjutan, memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merumuskan kebijakan yang akan dicapai tahun 2025, dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar melakukan penyesuaian target pada Perubahan Perjanjian kinerja sehingga indikator dan target tidak mengalami perubahan sesuai dengan Target Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025

Tujuan Strategis 1			
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat			
IKSS 1.1	Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda	orang	11.200
IKSS 1.2	Jumlah Peningkatan Nilai Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat	Rupiah	12.300.000.000
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Ketahanan Adat dan Budaya berlandaskan ABS-SBK			



IKSS 2.1	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	%	85
-------------	---	---	----

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja yang Berbasis Pertanian, Industri dan UMKM

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian			
IKSS 1.1	Kontribusi Sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	27,61
IKSS 1.2	Niai tukar petani (NTP)	Indeks	>100
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya daya saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif			
IKSS 2.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	13,80
IKSS 2.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14,5
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja			
IKSS 3.1	Jumlah Wirausaha baru	orang	1.061

Tujuan Strategis 3

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu pendidikan			
IKSS 1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,42
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat			
IKSS	Umur harapan hidup	Usia	74,30



2.1			
IKSS 2.2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Indeks	16,6
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
IKSS 3.1	Angka Kemiskinan	Indeks	3,93
IKSS 3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	98,1
IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,91

Tujuan Strategis 4

Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi Pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya, dan sumber daya alam

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial			
IKSS 4.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.250.000
IKSS 4.2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			
IKSS 5.1	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP
IKSS 5.2	Nilai SAKIP	Indeks	71 (BB)



IKSS 5.3	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	71 (BB)
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya birokrasi yang kafabel			
IKSS 5.1	Indeks SPBE	Indeks	3
IKSS 5.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	85,00
IKSS 5.3	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	Indeks	3,20
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
IKSS 5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95,50

Tujuan Strategis 6			
Terwujudnya infrastruktur berkualitas			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas infrasruktur wilayah			
IKSS 6.1	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	Indeks	77,71
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup			
IKSS 6.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,21
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana			
IKSS 6.3	Indeks resiko bencana	Indeks	125,2

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tercermin dari capaian tujuh tujuan strategis dengan tujuh indikator kinerja utama tujuan, dan lima belas sasaran strategis dengan dua puluh enam indikator kinerja utama sasaran, Gambaran progres capaian kinerja Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan Strategis 1					
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat					
IKSS 1.1	Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda	Orang	11.200	11.274	100,7
IKSS 1.2	Jumlah Peningkatan Nilai Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat	Rupiah	12.300.000.000	10.815.218.200	87,92
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Ketahanan Adat dan Budaya berlandaskan ABS-SBK					
IKSS 2.1	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	%	85	92,59	108,92

Tujuan Strategis 2					
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 3 Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian					
IKSS 1.1	Kontribusi Sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	27,61	27,44	99,38
IKSS 1.2	Niai tukar petani (NTP)	Indeks	>100	115,36	115,36
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya daya saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif					



IKSS 2.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
IKSS 2.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14,5	14,13	102,61
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja					
IKSS 3.1	Jumlah Wirausaha baru	orang	1.061	503	47,40

Tujuan Strategis 3

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
-------------------	--------	--------	-----------	-----------

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya mutu pendidikan

IKSS 1.1	Rata-rata lama sekolah	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
----------	------------------------	--	--	--	--

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

IKSS 2.1	Umur harapan hidup	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
----------	--------------------	--	--	--	--

IKSS 2.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat pendek) pada Balita	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
----------	--	--	--	--	--

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

IKSS 3.1	Angka Kemiskinan	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
----------	------------------	--	--	--	--

IKSS 3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	98,1	60,69	61,86
----------	----------------------------------	--------	------	-------	-------

IKSS 3.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,91	97,48	98,55
----------	---------------------------------	--------	-------	-------	-------



Tujuan Strategis 4

Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi Pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya, dan sumber daya alam

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 9 Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial					
IKSS 4.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.250.000 orang	1.115.799 orang	89,26
IKSS 4.2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	100

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel					
IKSS 5.1	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	100
IKSS 5.2	Nilai SAKIP	Indeks	71 (BB)	67,77 (BB)	95,45
IKSS 5.3	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	71 (BB)	79,35 (BB)	111
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya birokrasi yang kafabel					
IKSS 5.1	Indeks SPBE	Indeks	3	-	-
IKSS 5.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	85,00	83,62	98,38
IKSS 5.3	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	Indeks	3,20	n/a	n/a
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
IKSS 5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95,50	92,12	96,46

Tujuan Strategis 6

Terwujudnya infrastruktur berkualitas

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah					
IKSS 6.1	Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas	Indeks	77,71	66,60	85,70

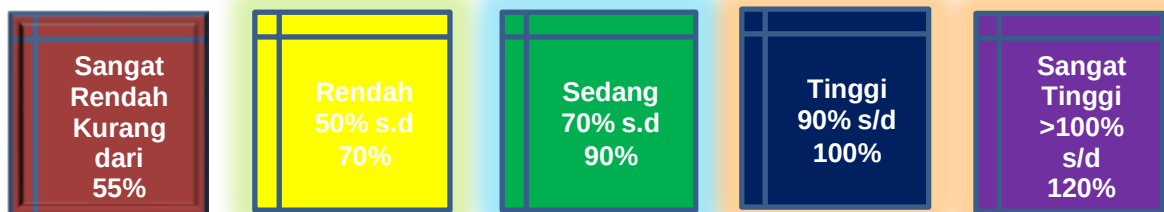
Tujuan Strategis 7

Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan



Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 14 Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup					
IKSS 6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana					
IKSS 6.1	Indeks resiko bencana	Penyusunan Laporan berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025			

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang diperjanjikan pada dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibagi dalam empat kriteria Capaian Kinerja:





Tujuan ke-1

Meningkatkan Aktifitas Pembangunan Bidang Keagamaan, Adat dan Kebudayaan sesuai Nilai-nilai ABS-SBK

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupan beradat dan berbudaya masyarakat kabupaten Tanah Datar telah mengenal “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dalam tatanan bermasyarakat. Strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan misi satu antara lain penguatan lembaga TPA/MDTA dan rumah tahfiz, meningkatkan kapasitas badan amil zakat, penguatan pemahaman tentang adat salingka nagari, meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

IKSS 1.1 Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda

Indikator Jumlah Hafiz/Hafizah yang Bersertifikat mencerminkan jumlah individu yang telah berhasil menghafal Al-Qur’an secara lengkap dan memperoleh sertifikat resmi sebagai pengakuan atas pencapaian tersebut. Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan kualitas dan validitas hafalan, tetapi juga mendorong motivasi bagi para penghafal Al-Qur’an untuk terus mengembangkan kemampuan mereka secara sistematis dan terstandarisasi. Peningkatan jumlah hafiz dan hafizah bersertifikat menjadi cerminan keberhasilan program pembinaan keagamaan dan pendidikan Islam di suatu wilayah, serta memperkuat peran komunitas agama dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Oleh karena itu, indikator ini penting dalam mendukung upaya pelestarian nilai-nilai agama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis spiritual.

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 ditetapkan target hafiz/hafizah yang diwisuda sebanyak 1.000 hafiz/hafizah per tahun. Berdasarkan data Dinas Sosial PPPA, pada tahun 2025 terealisasi sebanyak

1.026 hafiz/hafizah diwisuda dengan capaian 102,6%. 412.

Dalam perkembangannya capaian indikator kinerja jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda juga memperhitungkan kategori hafal lebih dari 2 juz. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda sampai dengan tahun 2025 sebanyak 11.274 hafiz/hafizah. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD yang diwisuda sampai dengan tahun 2025 sebanyak 11.200 hafiz/hafizah, berdasarkan data capaian kinerja tersebut jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 100,7%.

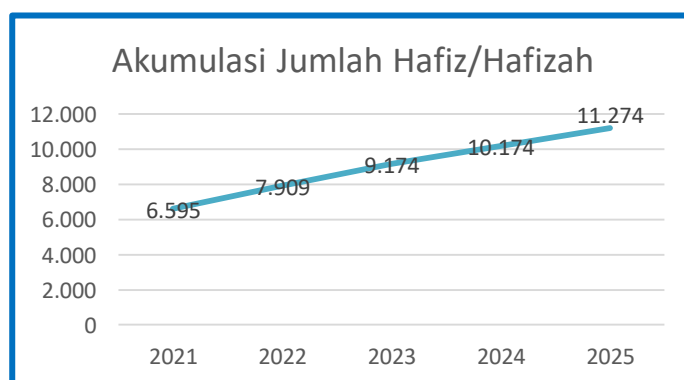
Tabel 2.4

Jumlah Hafiz / Hafizah yang diwisuda Tahun 2021 – 2025

Tahun	Akumulasi Jumlah Hafiz/Hafizah
2021	6.595
2022	7.909
2023	9.174
2024	10.174
2025	11.274

Grafik 2.1

Perkembangan Hafiz / Hafizah dari Tahun 2021 – 2025



Faktor pendukung capaian kinerja indikator hafiz/hafizah yang diwisuda adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan rumah tahfiz serta jumlah guru tahfiz yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2025 terdapat 240 TPA dan 164 rumah tahfiz dan 14 rumah tahfiz binaan Pemerintah Daerah, dengan jumlah guru tahfiz lebih dari 1.000

orang dengan jumlah siswa mencapai lebih 19.000 orang.

2. Gerakan Pemasangan Stiker “Satu Rumah Satu Hafiz”, sampai dengan tahun 2024 telah memasang stiker sebanyak 7.218 buah, yang berarti jumlah rumah yang telah memiliki Hafiz/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 7.218 rumah.
3. Program “Maghrib Menghantar Berkah”, yaitu mengaji bersama para penghafal Alquran yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, Tasmi’ Alquran, dialog dengan Bupati Tanah Datar, dan ditutup dengan sholat Isya’ berjamaah. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 178 rumah tahfiz telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini.

Sasaran strategis meningkatnya keagamaan masyarakat dengan indikator Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda diharapkan memiliki dampak menciptakan generasi muda yang mencintai Al-Quran dan melakukan aktifitas positif melalui pembelajaran Al-Quran sehingga diharapkan akan memperbaiki akhlak generasi muda dan menjadi benteng terhadap pengaruh negatif perkembangan zaman. Untuk mendukung indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan PPPA dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah.

IKSS 1.2 Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat

Indikator “Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.12.300.000.000,- berdasarkan data Bagian Kesra Setda Kabupaten Tanah Datar yang bersumber dari Badan Amil Zakat (BAZ) Tanah Datar, zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.815.218.200,- berdasarkan data tersebut tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 87,92%.

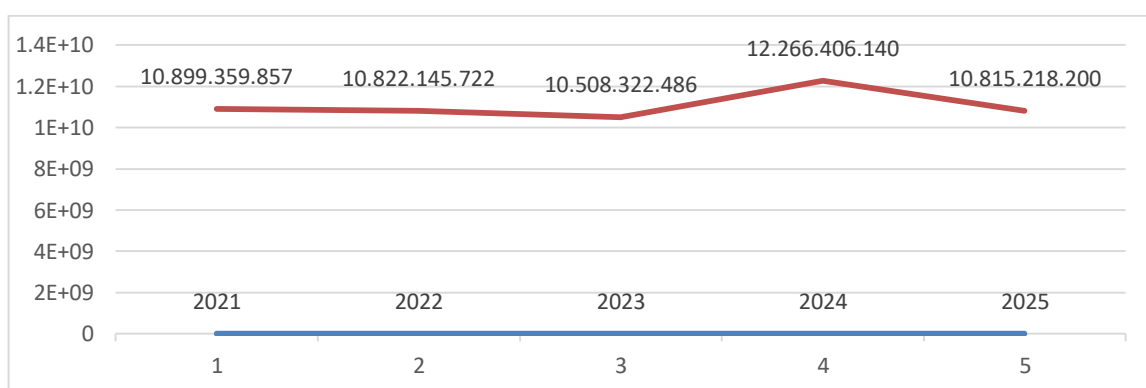
Tabel 2.5

Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Penerimaan Zakat
1	2021	10.899.359.857
2	2022	10.822.145.722
3	2023	10.508.322.486
4	2024	12.266.406.140
5	2025	10.815.218.200

Grafik 2.2

Perkembangan Penerimaan Zakat Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan Penerimaan Zakat pada Baznas kabupaten Tanah Datar tahun 2025 telah dialokasikan untuk beberapa kegiatan diantaranya :

1. Membantu program UHC yang diperuntukan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 1.474.524.000
2. Program Beasiswa bagi mahasiswa yang lulus jalur undangan dan Beasiswa yang ke Timur Tengah sebesar Rp. 2.846.008.000
3. Kegiatan Dai Baznas yang bertugas untuk Dakwah membina masyarakat di setiap Kecamatan Rp. 629.200.000
4. Bantuan berupa usaha produktif di bidang perdagangan, peternakan, perkebunan dan perikanan serta Bantuan konsumsi berupa bantuan lebaran sebesar Rp. 2.053.635.700.

Dalam penanggulangan bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor pemerintah daerah dalam menyalurkan sumbangan bencana yang berasal dari masyarakat telah bekerja sama dengan Baznas untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana dengan total anggaan sebesar Rp. 3.159.850.500.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi pengelolaan zakat ke 75 Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
2. Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di nagari, untuk tahun 2025 sudah terbentuk sebanyak 5 UPZ di Nagari (Batu Bulek, Lubuk Jantan, Tapi Selo, Balai Tengah, Tanjung Bonai)
3. Pembentukan UPZ Masjid, tahun 2025 sudah terbentuk 6 UPZ Masjid (Masjid Syofia Cubadak, Masjid Syura Tabek, Masjid Baburrahim Batu Basa, Masjid Al Amin Lima Kaum, Masjid Koto Tuo Sungai Tarab, Masjid Raya Tanjung Alam)
4. Membentuk relawan Fundraising sebanyak 28 orang, dengan sebaran 2 orang per kecamatan.

Faktor Penyebab tidak tercapainya Target Penerimaan Zakat

1. Berkurangnya penerimaan dari ASN terutama guru pada tingkat SMA, pemotong Zakat langsung ke Provinsi.
2. Belum maksimal pemotongan zakat untuk Sertifikasi Guru.

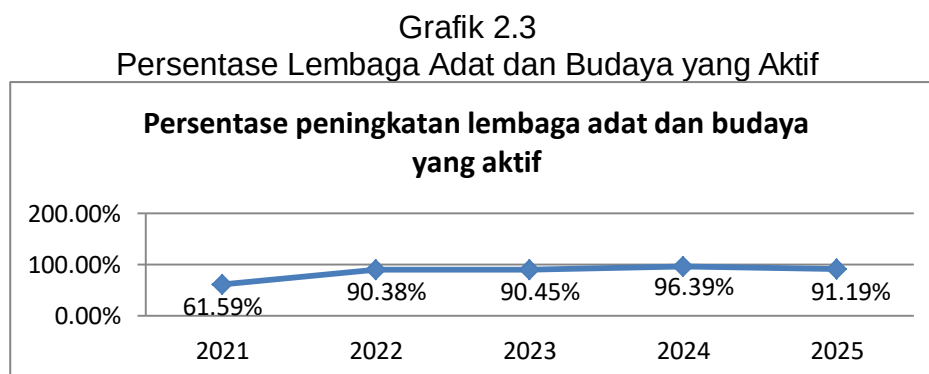
IKSS 1.2 Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif

Berdasarkan data peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif, tercatat bahwa perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan PPPA, serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki total 243 lembaga budaya atau sanggar seni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 lembaga budaya/sanggar seni dinyatakan aktif. Lembaga-lembaga ini bergerak dalam berbagai kegiatan kebudayaan seperti seni tari, pagelaran, qasidah, silat, dan kegiatan budaya lainnya. Selain itu,

terdapat pula peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di tingkat kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung pelestarian adat dan budaya.

Sementara itu, pada Dinas PMD PPKB tercatat sebanyak 75 Lembaga Adat dan seluruhnya dalam kondisi aktif. Lembaga adat tersebut berperan sebagai Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. Data ini menunjukkan adanya komitmen dan peningkatan partisipasi aktif lembaga adat dan budaya dalam mendukung pelestarian serta pengembangan budaya daerah.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator “Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif” tahun 2021 – 2025:



Berdasarkan grafik diatas tahun 2025 terjadi penurunan realisasi pada indikator Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif karena adanya efisiensi anggaran untuk memfasilitasi lembaga adat dan budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, namun dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK”, melalui fasilitasi lembaga adat budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar aktif dalam melestarikan adat dan budaya tahun 2025 capaian indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pembinaan lembaga KAN dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan peraturan nagari tentang adat salingka nagari untuk tahun 2025 telah difasilitasi 16 Lembaga Adat (Panyalaian, Tambangan, Andaleh, Padang Laweh Malalo, Padang



- Magek, Saruaso, Tiga Jangko, Batu Bulek, Balai Tengah, Sungayang, Tanjung, Koto Tuo, Koto Baru, Simpuruik, Situmbuak, Barulak) oleh Dinas PMDPPKB
2. Fasilitasi kegiatan LKAAM Kabupaten Tanah Datar oleh Dikbud
 3. Pembangunan Balai Adat Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang.
 4. Program Niniak Mamak turun ke sekolah, pada tahun 2025 dilaksanakan pada empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 5. Pembinaan terhadap 8 komunitas budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Pembinaan terhadap 20 komunitas kesenian
 7. Pembinaan seni melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang pada tahun 2025 dilaksanakan di empat sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Pemberian bantuan peralatan seni dan budaya kepada 18 kelompok seni dan budaya.
 9. Penyelenggaraan Atraksi seni budaya (seni kreatif) secara rutin yang dilaksanakan di Lapangan Cindua Mato oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Tujuan ke-2

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja yang Berbasis Pertanian, Industri dan

IKSS 2.2 Nilai Tukar Petani / NTP

Capaian indikator NTP diukur dengan menggunakan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, NTP Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebesar 126,80 (>100) yang diperoleh dari hasil pemantauan harga-harga di pedesaan seluruh kabupaten di Sumbar. NTP>100 mengindikasikan Indeks Harga yang diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima

mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. Artinya daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal telah cukup baik.

Perbandingan Nilai Tukar Petani Nasional Provinsi Sumatera Barat 2025 sebesar 126,80. Nilai tukar pertanian Tanah Datar sebesar 115,36. Secara umum angka ini mengindikasikan petani mengalami surplus, dimana harga yang diterima lebih tinggi dari harga yang dibayar untuk produksi dan konsumsi.

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 untuk mencapai NTP >100 sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kacang Tanah)
2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe, Tomat, Bawang dan jeruk)
3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Karet, Tebu, Kopi dan Cassiavera)
4. Peningkatan Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Daging Ayam dan Telur)
5. Peningkatan populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)

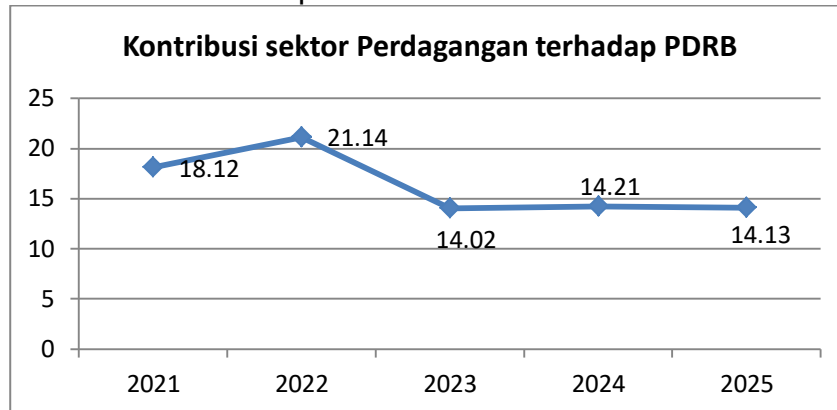
IKSS 2.3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2025 adalah sebesar 14,5% angka ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tanah Datar terjadi peningkatan pada sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan senilai Rp. 1.647,77 Miliar.

Berikut ini adalah perkembangan PDRB sektor sektor perdagangan serta perkembangan kontribusinya pada PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2025:

Grafik 2.4

Perkembangan indikator kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB Tahun 2021-2025



Untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya melalui Dinas KUKMP sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan pasar serikat C Batusangkar yang memfasilitasi 637 kios/loss/toko grosir dan 350 pelataran pedagang dan pembinaan terhadap Pasar Nagari. Kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Pemantauan harga 15 bahan pokok dan 9 barang penting pada Pasar serikat C dan distributor utama untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan ini didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
3. Melaksanakan pengawasan perdagangan sesuai kewenangan daerah yang meliputi pengawasan tertib niaga, pengawasan metrologi legal, barang dan jasa pada Pasar Nagari, Pelaku Usaha SPBU/Pertashop, agen dan pangkalan LPG 3 kg, distributor dan pengecer pupuk dan pestisida bersubsidi, pelaku usaha barang dalam keadaan terbungkus serta edukasi dan literasi peraturan perdagangan kepada siswa SMP dan Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
4. Penyelenggaraan pelayanan tera wajib daerah berupa tera/tera ulang



terhadap 205 alat-alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di pasar serikat C Batusangkar dan 16 SPBU/Pertashop untuk memastikan terjaminnya kebenaran ukuran bagi konsumen/masyarakat. Kegiatan ini didukung oleh program Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.



IKSS 2.4 Jumlah wirausaha baru

Jumah wirausaha baru yang tercipta selama tahun 2025 adalah sebanyak 1061 orang, yang terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan Usaha mikro, Urusan Pertanian dan Urusan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

a. Urusan Tenaga Kerja	175
b. Urusan Koperasi dan Usaha mikro	248
c. Urusan Pertanian	55
d. Urusan Pariwisata	25
Jumlah	503

Upaya menumbuhkan wirausaha baru ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah pengangguran, sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas KUKMP pada tahun 2025 terdapat 9.108 wirausaha yang diterbitkan Nomor Induk Berusaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perdagangan. Wirausaha baru pada urusan Koperasi dan UMKM difasilitasi dalam bentuk subsidi bunga atas pinjaman untuk pengembangan usaha untuk 48 usaha mikro.

Berdasarkan data BPS Tahun 2026, tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar sebesar 224.680 orang, dengan rincian 212.862 orang bekerja dan 11.818 orang pengangguran terbuka, dan bukan angkatan kerja 83.758 orang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menurunkan jumlah pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja (pencari kerja) untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada lapangan usaha yang tersedia. Kesempatan kerja menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri pengolahan. Salah satu peluang untuk menciptakan wirausaha baru adalah melalui peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri pengolahan.

Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya menumbuhkan wirausaha baru antara lain:

1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
2. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan sulaman kapalo samek, instalasi listrik bangunan sederhana dan *Practical Office Advance* (POA) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 48 pencari kerja.
3. Pelatihan kompetensi yang bersumber dari APBN, seperti pelatihan pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi *smartphone* tahap satu dan tahap dua yang dilaksanakan oleh BLK Batusangkar yang diikuti sebanyak 32 pencari kerja
4. Pelatihan keterampilan pemberdayaan ekonomi dan social purna PMI dan keluarganya yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan perindustrian yang diikuti sebanyak 20 orang purna PMI dan keluarga.
5. Memfasilitasi bantuan tenaga kerja mandiri dan lanjutan kepada wirausahawan baru dan calon wirausahawan baru sebanyak 75 orang yang bersumber dari dana APBN.



Tujuan ke-3

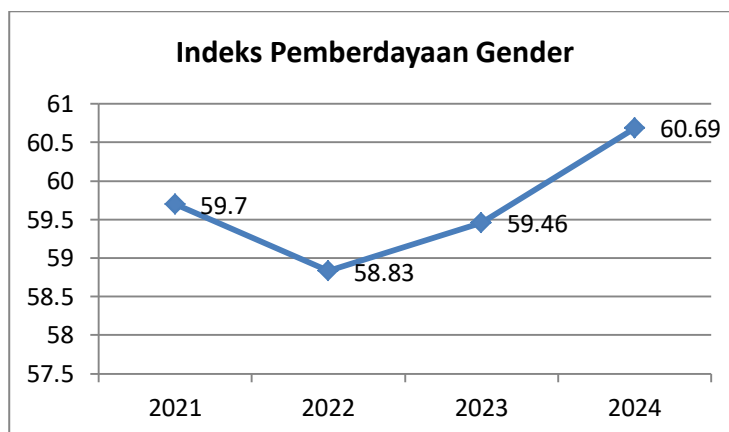
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

IKSS 3.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional, teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2025 sampai laporan ini selesai disusun data capaian belum tersedia.

Grafik 2.5

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan dan Pembangunan Gender



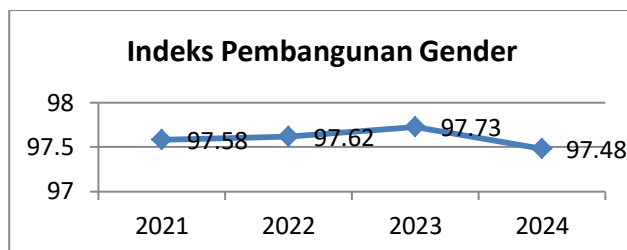
IKSS 3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Data capaian IPG Kabupaten Tanah Datar diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sampai dengan laporan ini selesai disusun, data tahun 2025 belum dapat diperoleh karena belum dirilis oleh BPS. Tahun 2024 dengan target indikator indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 98,91 dan realisasi indikator indeks pembangunan gender sebesar 97,48 dengan capaian sebesar 98,55%. Untuk capaian 2025 sampai laporan ini selesai disusun data belum tersedia. IPG sendiri dihitung dari rasio antara IPM laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, idealnya nilai IPG idealnya mendekati 100. Apabila nilai IPG di bawah 100, hal ini menandakan capaian pembangunan perempuan masih di bawah capaian pembangunan laki-laki.

Grafik 3.6

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Gender



Tujuan ke-4

Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan

IKSS : 4.1 Jumlah kunjungan wisatawan

Pariwisata Tanah Datar sebagai salah satu sektor unggulan daerah terus berupaya dan berbenah untuk meningkatkan daya saing destinasi unggulan. Namun sejak tahun 2024 dan 2025 Kabupaten Tanah Datar menghadapi bencana alam. Hal ini berdampak terhadap Kinerja sektor pariwisata Tanah Datar. Pada tahun 2025 capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan sebesar 11,23%. Dimana jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebanyak 1.250.000 orang dengan realisasi sebanyak 1.115.799 orang.

Capaian kinerja sektor pariwisata tidak dapat tercapai disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penetapan masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Tanah Datar.
2. Kerusakan infrastruktur dan aksesibilitas menuju Kabupaten Tanah Datar yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.
3. Tidak dapat terlaksananya event pariwisata daerah seperti program unggulan daerah satu nagari satu event, festival pesona Minangkabau, event rutin pacu jawi.

Dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Tanah Datar beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2025

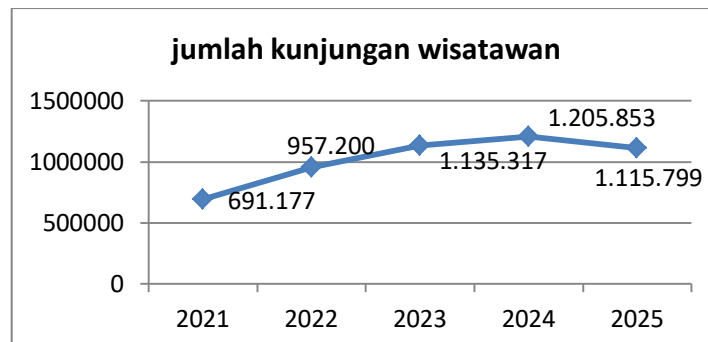
sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pusat informasi pariwisata daerah (TIC) sebagai sarana informasi dan promosi pariwisata dan potensi daerah yang terintegrasi yang berlokasi di kawasan Istano Basa Pagaruyung.
2. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan peran terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna mengembangkan potensi objek wisata daerah.
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
4. Peningkatan dan perluasan promosi pariwisata daerah melalui berbagai media.
5. Pembentukan dan launching tanah datar *creative hub* sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menunjang sektor pariwisata.
6. Melaksanakan tanah datar *ekraf fest* sebagai salah satu wadah untuk menampilkan potensi dari pelaku ekonomi kreatif yang sudah tergabung dalam Tanah Datar *creative hub*.
7. Melaksanakan kegiatan bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif.
8. Melakukan pembinaan terhadap nagari *Creative Hub* untuk aktivasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di nagari tersebut.
9. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif sub sektor seni pertunjukan dan budaya secara rutin di lapangan Cindua Mato Batusangkar dan Istano Basa Pagaruyung.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator Jumlah kunjungan wisatawan.

Grafik 2.7

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan



Berikut adalah data kunjungan wisatawan pada objek-objek wisata di Tanah Datar:

Tabel 2.6 Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 – 2025
per Objek Wisata di Kabupaten Tanah Datar

No.	NAMA OBJEK WISATA	2023 (orang)	2024 (orang)	2025 (orang)
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	Istano Basa Pagaruyung	348.624	251.168	276.453
2	Lembah Anai	96.483	44.044	19.954
3	Panorama Tabek Patah	12.669	6.557	3.885
4	Puncak Pato	28.794	35.905	26.169
5	Tanjung Mutiara	25.239	26.361	7.534
6	Batu Angkek-Angkek	4.051	6.997	4.831
7	Batu Batikam	1.677	1.391	850
8	Batu Basurek	1.108	1.392	623
9	Nagari Tuo Pariangan	127.664	110.886	75.685
10	Aie Angkek Padang Ganting	66.408	49.362	13.999
11	Tan Kayo	70.024	35.729	9.029
12	Puncak Aua Sarumpun	20.161	25.850	9.017
13	Pandai Sikek	3.470	17.940	4.590
14	Pacu Jawi	42.880	67.362	552.624
15	Wisata Pendaki Gunung	2.107	0	4
16	Event Kepariwisataaan	180.392	128.355	6.910



No.	NAMA OBJEK WISATA	2023 (orang)	2024 (orang)	2025 (orang)
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
17	Van der Capellen	1.100	2.045	584
18	Desa Wisata Pagaruyung Pakarak River Park	2.637	390	-
19	Batu Badinding	1.400	3.834	21.863
20	Tanjung Indah	43.594	37.151	12.695
21	Tabek Ganggam	31.304	32.205	7.074
22	Desa Wisata Sumpu	1.598	890	2.369
23	Lubuak Soda	20.424	0	11.241
24	Rumah Tuo Balimbing	818	4.662	1.380
25	Bukit Siduali	691	1.125	265
26	Lapangan Cindo Mato		103.441	16.443
27	Banda Gadang		36.501	14.629
28	Pemandian Ucok		26.948	13.044
29	Rumah Pohon		10.782	2.055
30	Lapangan Gumarang		136.580	
	TOTAL	1.135.317	1.205.853	1.115.799

Sumber sumber data: Dinas Parpora

Peningkatan daya saing pariwisata di Tanah Datar mengalami tantangan meskipun Tanah Datar dianugrahi wilayah yang sangat indah namun karena luas Tanah Datar yang sangat luas dan beragam menciptakan tantangan-tantangan tersendiri yakni:

1. Infrastruktur, pembangunan infrastuktur membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit terutama dalam mendukung destinasi wisata di Tanah Datar mulai dari akses jalan, fasilitas umum pariwisata sehingga perlu skala prioritas dalam pembangunan insfratraktur pendukung pariwisata.
2. Keterbatasan dalam kualitas SDM disektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja, dapat memengaruhi pelayanan kepada wisatawan dan daya saing destinasi serta daya saing pelaku ekonomi kreatif dan pemasaran produk.
3. Status kepemilikan lahan objek wisata sebagian besar milik pribadi

masyarakat dan kaum sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengintervensi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

4. Belum optimalnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Tanah Datar.
5. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keasrian budaya terhadap resiko degradasi lingkungan.

Meskipun berbagai capaian telah diraih dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga dan meningkatkan daya saing Tanah Datar sebagai destinasi unggulan. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi yang terstruktur dan inovatif guna menjawab tantangan tersebut serta memperkuat posisi Tanah Datar di tingkat nasional maupun internasional. Rencana aksi ke depan akan berfokus pada:

1. Penguatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pariwisata, sertifikasi profesi, serta penguasaan teknologi digital guna mendukung pelayanan yang inovatif dan berdaya saing.
2. Strategi Promosi dan Pemasaran Digital, Mengoptimalkan promosi destinasi wisata melalui media sosial dan kampanye interaktif di berbagai platform digital. Selain itu, meningkatkan daya tarik Tanah Datar Festival sebagai ajang promosi unggulan yang terstandar.
3. Pariwisata berkelanjutan, menerapkan ekowisata dan pariwisata ramah lingkungan, memperkuat pengelolaan lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya sebagai daya tarik utama.
4. Penguatan Kolaborasi dan Pemberdayaan, Komunitas Memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi dalam pengembangan pariwisata. Mendorong peran aktif Pokdarwis dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas.
5. Mendorong dan memfasilitasi investasi dalam pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi kreatif.
6. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat untuk memperkuat peran masyarakat dan kelompok sadar wisata.

IKSS 4.2 Lama tinggal wisatawan

Capaian indikator Lama tinggal wisatawan dihitung dengan menggunakan sampel data hunian pada Hotel Emersia yang berada di tengah kota Batusangkar. Hotel Emersia diambil sebagai sampel selain sebagai satu-satunya hotel dengan kapasitas hunian yang cukup besar dan presentatif, juga hotel dengan tingkat hunian yang cukup tinggi sehingga dipandang cukup untuk dijadikan sebagai sampel. Pada tahun 2025, rata-rata lama tinggal wisatawan adalah satu hari. Hal ini masih belum memenuhi target RPJMD, yaitu dua hari. Indikator lama tinggal wisatawan masih dipengaruhi oleh ketertarikan wisatawan untuk menikmati seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan juga jarak tempuh antara satu objek wisata dengan objek wisata lainnya tidak terlalu jauh sehingga bisa dikunjungi dalam 1-2 hari.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya capaian kinerja indikator Lama Tinggal wisatawan yaitu:

1. Kerusakan infrastruktur dan aksesibilitas menuju Kabupaten Tanah Datar yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar.
2. Tidak dapat terlaksananya event pariwisata daerah seperti program unggulan daerah satu nagari satu event, festival pesona Minangkabau, event rutin pacu jawi.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menambah daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Meningkatkan daya saing objek wisata melalui investasi wisata.
2. Mendorong penyelenggaraan konsep pariwisata yang melibatkan peran wisatawan secara langsung.
3. Mendorong pengembangan desa wisata untuk menambah daya tarik
4. Mendorong pembentukan dan pengembangan nagari *creative Hub* untuk mendukung desa wisata



Tujuan ke-5

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien

IKSS 5.1 Opini BPK atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapat prediket wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2009 selama empat belas kali dan tiga belas kali berturut-turut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 21.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini tersebut, maka bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah bebas dari temuan yang material.

Capaian indikator “Opini BPK atas laporan keuangan” dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan opini WTP sehingga diasumsikan, meskipun hasil audit belum keluar, capaian tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu WTP.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.
2. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan dan aset daerah.

Tabel 2.7

Capaian Opini BPK tahun 2022-2025

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	WTP	WTP	100%
2.	2023	WTP	WTP	100%
3.	2024	WTP	WTP	100%

Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan Interim

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2025

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)

IKSS 5.2 Nilai SAKIP

Kabupaten Tanah Datar terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian nilai SAKIP yang diperoleh mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2025, Kabupaten Tanah Datar mencapai nilai SAKIP sebesar 67,77

dengan target yang ditetapkan sebesar 71 Kategori BB, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 95,45%. Dengan hasil ini, Tanah Datar meraih kategori "Baik", yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan yang semakin optimal. Capaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 4 komponen yang dinilai yakni:

1. Perencanaan Kinerja

Kabupaten Tanah Datar menerapkan sistem perencanaan kinerja yang berbasis outcome yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Integrasi antara perencanaan strategis dan perencanaan anggaran juga menjadi kunci efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

2. Perencanaan Kinerja

Kabupaten Tanah Datar menerapkan sistem perencanaan kinerja yang berbasis outcome yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan selanjutnyadituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Integrasi antara perencanaan strategis dan perencanaan anggaran juga menjadi kunci efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

3. Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja dioptimalkan dengan menggunakan aplikasi E-SAKIP Tanah Datar dengan penggunaan indikator yang spesifik, terukur, dan realistis, sehingga capaian program dapat dievaluasi secara objektif dan setiap pegawai dapat terlihat kinerjanya dan kontribusinya dalam pencapaian Kinerja Organisasi, Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi

kendala yang perlu segera diselesaikan guna menjaga kualitas pencapaian kinerja.

4. Pelaporan Kinerja

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ke dalam aplikasi E-SAKIP Tanah Datar menjadikan pengolahan data lebih cepat dan terintegrasi. Selanjutnya dalam penyusunan laporan kinerja dilakukan secara transparan, akurat, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance sehingga proses evaluasi dan perbaikan kebijakan dapat dilakukan lebih responsif.

5. Evaluasi Akuntabilitas Internal

Evaluasi internal dilakukan secara rutin dan ketat oleh Tim Penilai Internal Auditor untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara optimal, sehingga Kabupaten Tanah Datar berhasil meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mencapai predikat SAKIP dengan Kategori “BB” dalam rangka memastikan akuntabilitas tetap terjaga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta seiring dengan meningkatnya nilai akuntabilitas, diperlukan upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depan antara lain:

a. Penguatan Perencanaan Kinerja

Memastikan bahwa sistem perencanaan kinerja yang berbasis outcome semakin matang, dengan penjenjangan kinerja yang lebih terstruktur dan penguatan integrasi antara perencanaan strategis dan anggaran agar setiap program lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

b. Optimalisasi Pengukuran Kinerja

Mengembangkan dan menyempurnakan E-SAKIP Tanah Datar agar lebih efektif dalam memantau kontribusi setiap pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. Penguatan mekanisme reward dan punishment juga diperlukan guna meningkatkan motivasi pegawai dalam mencapai target

kinerja.

c. Peningkatan Kualitas

Pelaporan Kinerja Memaksimalkan penggunaan e-SAKIP Tanah Datar untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam satu sistem yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data akurat guna mempercepat pengambilan keputusan berbasis evidence-based policy.

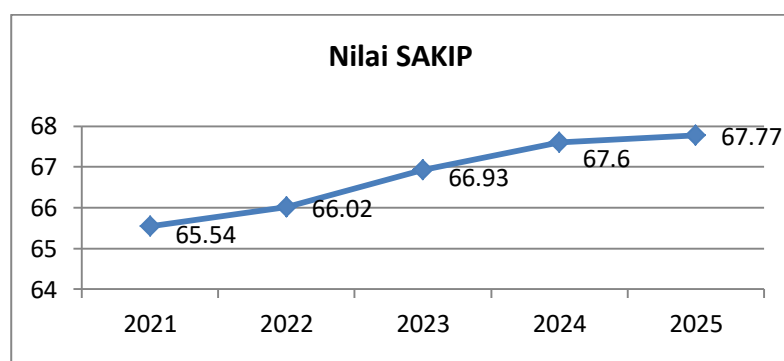
d. Penguatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

Meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan dan audit internal oleh Tim Penilai Internal Auditor, guna memastikan bahwa prinsip akuntabilitas kinerja diterapkan secara optimal di seluruh perangkat daerah. Evaluasi yang lebih mendalam dan berbasis data akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Nilai SAKIP

No	2021	2022	2023	2024	2025
Skor	65,54	66,02	66,93	67,60	67,77
Kategori	B	B	B	B	B

Grafik 2.8
Perkembangan Capaian Indikator Nilai SAKIP



IKSS 5.3 Indeks Pengawasan Kearsipan

Kabupaten Tanah Datar mendapatkan nilai 79,35 (BB) dengan kategori Baik untuk Indeks Pengawasan Kearsipan tahun 2025. Dimana nilai ini melebihi dari target yaitu 71(BB). Pencapaian ini tidak terlepas dari

pengawasan kearsipan Kabupaten Tanah Datar pada setiap perangkat daerah sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut perkembangan data Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024.

Tabel 2.9
Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2022	B	C	50%
2.	2023	B	B	100%
3.	2024	B	BB	150%
4.	2025	BB	BB	100%

Permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk menjaga/memelihara arsip di Depa Arsip seperti :

- a. Alarm Kebakaran
- b. Pengukur Suhu
- c. Mesin Pendingin / AC

Faktor pendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan nagari dengan melakukan sosialisasi serta penilaian setiap tahun dan pemberian reward (berkelanjutan).
2. Peningkatan nilai Indeks Penilaian Kinerja yaitu pelatihan terhadap SDM (tenaga arsiparis) melalui online dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 orang.
3. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip in-aktif.
4. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan arsip pada Depo arsip yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan eksternal, serta lembaga kearsipan daerah melengkapi regulasi kearsipan sesuai dengan instrument yang telah ada.

IKSS 5.4 Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 pemerintah Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang tidak dilakukan penilaian berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PD.03/2025 Tanggal 08 Juli 2025 Perihal pelaksanaan pembinaan pemerintah digital dan pemantauan SPBE 2025 dijelaskan bahwa penilaian SPBE hanya berupa pemantauan SPBE dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah digital. Untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hingga akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 52 aplikasi layanan administrasi Pemerintahan dan layanan publik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.10

Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	LAPOR SP4N	Layanan pengaduan publik
2	SPSE	Layanan pengadaan barang/jasa
3	SIRUP	Informasi rencana umum pengadaan
4	SIPD	Perencanaan, penganggaran dan keuangan daerah
5	SIKAK	Layanan administrasi kependudukan pusat
6	SRIKANDI	Layanan kearsipan
7	SIDEKA	Website dan layanan desa
8	OSS	Layanan perizinan pusat
9	SIMBG	Izin mendirikan bangunan
10	Dapodik	Informasi profil pendidikan
11	Prodeskel	Profil Nagari
12	Siskeudes	Pengelolaan keuangan nagari
13	Simda BMD	Pengelolaan aset daerah
14	Sim Gaji	Pembuatan daftar gaji ASN
15	JDIH	Informasi produk hukum
16	PPID	Layanan informasi publik
17	Portal Tanah Datar	Website Tanah Datar versi mobile
18	Whistleblower	Layanan pengaduan daerah
19	Portal Data	Informasi data daerah
20	Geoportal	Informasi geospasial daerah



21	Diruang data	Informasi pemanfaatan ruang
22	E-SAKIP	Informasi capaian kinerja perangkat daerah
23	Sitampun	Kinerja ASN
24	Abon	Absensi online ASN
25	Silamak	Layanan manajemen kepegawaian bagi ASN
26	Sijabri	Analisa jabatan
27	Sipintar	Layanan perizinan daerah
28	Oasedukcapil	Layanan administrasi kependudukan daerah
29	PPDB Online	Penerimaan peserta didik baru
30	Tanda Preneur	Pemberdayaan calon usahawan baru
31	Bajak Gratis	Layanan bajak gratis
32	Jelita	Informasi harga komoditas pertanian
33	Sidinda	Pengendalian inflasi daerah
34	Simbangda	Monitoring evaluasi kegiatan
35	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kinerja
36	IPKD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah
37	E-Perben	Monitoring realisasi keuangan
38	Smart Gov	Sistem Informasi Pendapatan Daaerah
39	Sipena	Perlindungan anak
40	SIAPPKK	Informasi dasawisma PKK
41	SIMRS GOS	Manajemen rumah sakit
42	Siduri	Sistem informasi data Pustu dan Poskesri.
43	Khanza	Layanan rekam medis Puskesmas
44	QR Code Pariwisata	Informasi inventori wisata
45	Aplikasi KIR	Pengelolaan KIR Kendaraan
46	Menara	Database menara seluler
47	Buku Tamu	Administrasi bagi tamu
48	Antrian MPP	Sistem antrian pada Mal Pelayanan Publik
49	Antrian Dukcapil	Sistem antrian pada Dinas Dukcapil
50	Sejahtera	Sistem Elektronik Jaminan dan Harapan Terpadu untuk Rakyat
51	E-Media	Sistem Informasi Media Elektronik
52	Help Desk	Aplikasi Layanan Bantuan

Aplikasi yang telah terintegrasi hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 23 aplikasi sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.11
Aplikasi yang telah terintegrasi

No.	Nama Aplikasi	Fungsi/Kegunaan	Integrasi
1.	SIPD	Perencanaan, penganggaran, Keuangan	Terintegrasi dalam 1 aplikasi
2.	Portal Data	Informasi data daerah	Portal data nasional
3.	SPSE	Pengadaan barang/Jasa	SIRUP dari LKPP
4.	Simbangda	Monitoring Evaluasi Kegiatan	Simbangda Provinsi
5.	OASE Dukcapil	Layanan adminduk	SIAK
6.	SIAK	Layanan Adminduk	Datawarehouse Kemendagri
7.	Sipintar	Pelayanan perizinan	SIAK dan KWSP Dirjen Pajak
8.	OSS	Pelayanan perizinan	SIAK dan KWSP Dirjen Pajak
9.	SIMBG	Izin mendirikan bangunan	OSS
10.	PPID	Layanan informasi	PPID Nagari
11.	JDIH	Layanan informasi hukum/peraturan perundang-undangan	BPHN Kemenkum
12.	Diruang Data	Informasi Pemanfaatan ruang	Silamak
13.	PPDB Online	Penerimaan Peserta didik Baru	Portal SPLP
14.	Aplikasi PBB	Layanan PBB	Aplikasi Bank Nagari
15.	Silamak	Layanan Manajemen Kepegawaian bagi ASN	Abon, PPID, JDIH, WBS, dll
16.	Abon	Absensi online	Sitampan
17.	Khanza	Layanan Puskesmas	Satu Sehat
18.	Portal Tanah Datar	Website Tanah Data versi mobile	Website Tanah Datar
19.	Geoportal	Informasi Geospasial Daerah	Diruang data
20.	Dashboard	Informasi penggunaan anggaran pengadaan dan data capaian kineja	Simbangda, SAKIP, Sipedal
21.	E-SAKIP	Informasi capaian kinerja perangkat daerah	Silamak
22.	IKPD	Informasi indeks pengelolaan keuangan daerah	PPID
23.	Simasaya	Sistem Layanan Puskesmas	Satu Sehat

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PD.03/2025 Tanggal 08 Juli 2025 Perihal pelaksanaan pembinaan pemerintah digital dan pemantauan SPBE 2025, implementasi transportasi digital pemerintah dalam RPJMN tahun 2025-2029 akan terjadi perubahan dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebijakan Pemerintah Digital (PEMDI). Tahun 2025 menjadi masa

transisi perubahan kebijakan tersebut sehingga juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

IKSS 5.5 Indeks Profesionalitas ASN

Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan profesionalisme aparatur sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2025, Indeks Profesionalisme Aparatur (IP ASN) mencapai 83,62 dari target 85,00, dengan capaian kinerja sebesar 98,38%, yang masuk dalam kategori "sangat baik".

Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur, baik dalam aspek kompetensi, kinerja, disiplin, maupun kualifikasi aparatur, sehingga mampu mendukung optimalisasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dari segi tren capaian IP ASN, dalam empat tahun terakhir terjadi Fluktuasi Nilai Indeks. Pada tahun 2021, IP ASN Kabupaten Tanah Datar tercatat sebesar 73,37, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 84,56. Sementara itu, pada tahun 2025, indeks berada pada angka 83,62, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penambahan indikator baru dalam perhitungan IP ASN, yang memperluas cakupan aspek profesionalisme yang dinilai yakni memasukkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kedalam penilaian IP ASN pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan bahwa aparatur Kabupaten Tanah Datar memiliki profesionalisme yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan standar penilaian yang semakin kompleks.

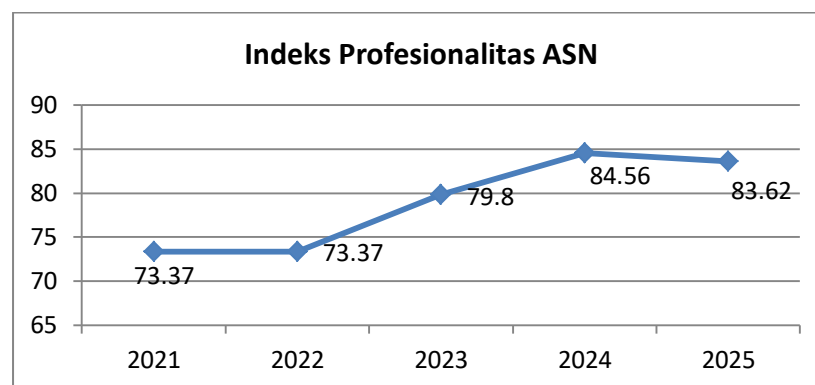
Keberhasilan capaian Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA) Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan disiplin, komitmen pimpinan, serta dorongan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi aspek utama yang mendorong efektivitas kinerja aparatur. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme ASN secara menyeluruh.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang mendorong peningkatan kinerja serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Kesadaran ASN dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan kompetensi serta kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih profesional.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN, yang ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan kapasitas ASN, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Berikut grafik perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2025:

Grafik 2.9
perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2025



Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pencapaian IPA dapat lebih optimal. Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme aparatur di Kabupaten Tanah Datar antara lain :

1. Perubahan sistem penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang mempengaruhi standar dan metode pengukuran profesionalitas ASN, sehingga memerlukan adaptasi dalam penerapannya.

2. Masih rendahnya partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan maupun pendidikan lanjutan, yang berdampak pada optimalisasi kinerja dan penguasaan tugas jabatan.
3. Masih rendahnya ketersediaan anggaran untuk pelatihan kepemimpinan bagi pejabat manajerial. Saat ini pejabat manajerial yang telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan baru mencapai 13,30 %.
4. Budaya kerja yang masih menghambat pengakuan terhadap kinerja sangat baik, terutama dalam proses penilaian oleh pimpinan, sehingga jumlah ASN yang memperoleh penilaian kinerja sangat baik masih terbatas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi perbaikan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan sistem penilaian kinerja berbasis objektivitas, optimalisasi program pengembangan kompetensi, serta penguatan budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan profesionalisme ASN di Kabupaten Tanah Datar dapat terus meningkat, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

IKSS 5.6 Skors dan status kinerja Pemerintah Daerah

Indikator skors dan status kinerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2024 dan 2025 datanya belum tersedia karena menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, data terakhir yang tersedia adalah data pada tahun 2023 dengan skor 3,20 dengan status sedang.

Faktor pendukung untuk indikator skors dan status kinerja Pemerintah Daerah ialah sebagai berikut:

Adapun upaya yang dilakukan dalam memperoleh nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan

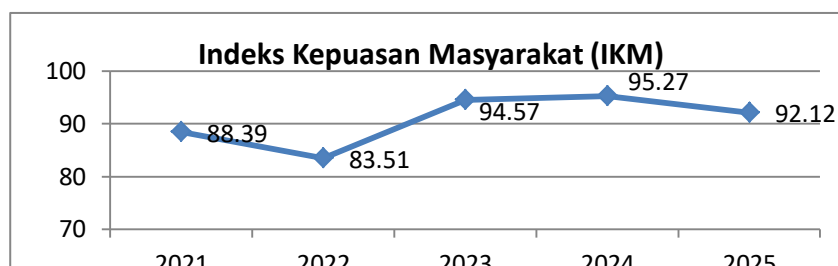
1. pengumpulan data dari OPD
2. melaksanakan verifikasi data dengan tim penyusun

3. membuat draft laporan
4. pembahasan dan finalisasi laporan
5. evaluasi oleh tim provinsi
6. melaksanakan sosialisasi guna menunjang pemahaman OPD dalam pelaporan kinerja pemerintahan daerah.

IKSS 5.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey di seluruh unit pelayanan publik, dengan hasil IKM Tahun 2025 adalah 95,50 (Sangat Baik). Untuk mendukung upaya tersebut, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pada tahun 2025, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman RI, hasil penilaian Maladministrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 76,67 masuk kategori Kualitas Pelayanan Cukup Tanpa Maladministrasi. Pada tahun 2025 sebanyak tiga (3) unit kerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang di evaluasi oleh Ombudsman RI, adapun hasil evaluasi penilaian kepatuhan tersebut yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 76,71 masuk kategori Kualitas Pelayanan Cukup Tanpa Maladministrasi, Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 73,77 masuk kategori Kualitas Pelayanan Cukup Tanpa Maladministrasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai 79,53 masuk kategori Kualitas Pelayanan Baik Tanpa Maladministrasi. Berikut perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025:

Grafik 2.10
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025





Gambar Kegiatan Entry Meeting SKM dengan LPPM Unand dan Penyerahan Nilai Maladministrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025

Hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah 4,15. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar yang dinilai oleh Kementerian PANRB dengan nilai A-.

Untuk mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berikut hal-hal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, oleh karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Tahun 2025 yang mana untuk Mal Administrasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh Skor 75,56 dengan predikat Baik yang peringkat 61 dari 106 Mal Pelayanan Publik yang di nilai se Indonesia.



Tujuan ke-6

Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas

IKSS 6.1 Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas

Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas, dihitung dari penghitungan data sebagai berikut :

- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
- Persentase jembatan dalam kondisi baik
- Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik
- Persentase cakupan pelayanan air minum, dan
- Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak.

Untuk target tahun 2025 Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas sebesar 77,71 dengan realisasi 66,60 Dengan capaian persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas sebesar 85,70%.

Tabel 2.12

Capaian indikator Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas baik

Tahun 2021-2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	69,36 %	69,80%	70,28%	69,89%	60,30%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	84,13%	84,83%	86,20%	87,24%	79,63%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	59,69%	75,55%	76,51%	76,55%	45,67%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase cakupan pelayanan air minum	73,80%	75,55%	76,51%	76,55%	72,62%
4	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	75,67%	75,88%	75,05%	74,84%	74,78%
TOTAL			72,53%	76,32%	76,91%	77,01%	66,60%

Berikut data kondisi jalan Kabupaten Tanah Datar:

1. Total panjang jalan Kabupaten Tanah Datar sepanjang 1.138,66 km
2. Jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 686,61km.
3. Jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 318,6 km.
4. Jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 133,45 km.

Target persentase 69,99% Persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2025 dan realisasi 60,30% dengan tingkat capaian kerja 86,15%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Alokasi Dana Transfer Bidang Infrastruktur Kabupaten Tanah Datar mengalami pemotongan DAU *Earmarked* sebesar Rp. 1.915.191.468,00 dan dana DAK sebesar Rp. 20.199.159.000,00.
2. Terjadinya bencana alam pada tahun 2024 dan 2025 yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar dengan data sebagai berikut:
 - a. Jalan sepanjang 44 km
 - b. Jembatan sebanyak 3 Unit
 - c. Irigasi sepanjang 233 DI dengan luas areal 7.375 Ha.
 - d. Jaringan air bersih sepanjang 3.213 sambungan rumah.
 - e. Tangki septik individual sebanyak 1.490 unit.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan jalan dan jembatan dengan kondisi baik adalah:

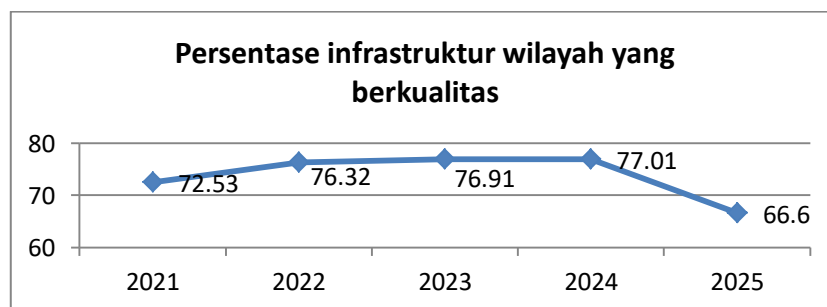
1. Melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui existing jalan saat ini yang dijadikan dasar perencanaan ditahun selanjutnya agar bisa menentukan prioritas perbaikan jalan yang akan dikerjakan.
2. Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih berat.
3. Mengupayakan untuk mendapatkan program pembangunan bidang jalan ke pemerintah pusat dan provinsi.

Luas areal irigasi Kabupaten Tanah Datar adalah 29.585,40Ha. Target persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik tahun 2025 adalah 70%. Realisasi luas areal irigasi yang berkondisi baik 42,87 % atau 12,683.10 Ha dengan tingkat capaian 57,28 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 61,24%. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya irigasi dalam kondisi baik karena curah hujan yang sangat tinggi dan erupsi gunung merapi menyebabkan banjir bandang pada tahun 2024 dan 2025 yang merusak jaringan irigasi, tanggul, sungai dan pendangkalan sungai akibat teritmbun material. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dilakukan upaya mengoptimalkan penjaga pintu air, melakukan pembinaan terhadap petani pamakai untuk pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan mengupayakan program pembangunan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berikut adalah perkembangan capaian indikator Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas:

Grafik 2.11

Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas



Galeri Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2025





Galeri Pembangunan Infrastruktur Jembatan Tahun 2025



Galeri Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2025



Galeri Kuantitas Jaringan Sanitasi Tahun 2025



A. Faktor pendukung persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas

Capaian persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas didukung oleh program dan kegiatan

1) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dilaksanakan program Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dengan Sub Kegiatan :

- Rekonstruksi jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Survey Kondisi Jalan /Jembatan ,
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi dilaksanakan program dan kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya Output sub kegiatan ini berupa

pemeliharaan Embung Koto Baru, Embung Padang Siminyak dan Embung Talago Paninjauan.

- Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, Output sub kegiatan ini berupa normalisasi restorasi sungai Batang Silambiak, Batang Aia Gadang, Batang Gholan, Batang Sibilahan/Sibinuang, Batang Muaro Samuik, Batang Malalo, Batang Lembang dan pengerukan sedimen Daerah Irigasi Bandar Padang Ganting.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai Output sub kegiatan ini berupa rehabilitasi tanggul Sungai Batang Solok, Batang Sigarungguang, Batang Sibilah-bilahan, Batang Parik dan Batang Pangian.
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Output sub kegiatan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Bandar Basiku, Daerah Irigasi Guguak Lelo, Daerah Irigasi Bandar Layah, Daerah Irigasi Bandar Pulang, Daerah Irigasi Bandar Nan Gadang.
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Output sub kegiatan ini berupa operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi sepanjang 80 Km. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota,
- Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Output sub kegiatan ini berupa penambahan pembangunan 7 Sambungan Rumah (SR) SPAM di Nagari Tanjung Bonai.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Output Sub Kegiatan ini berupa Dokumen Feasability Study IPLT.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Output sub kegiatan ini berupa Pengadaan Buis Beton dan Penutup Buis Beton, Tangki Septik Pabrikasi, Jamban dan Bilik Skala Individual di 16 Nagari.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan terhadap 6 Keluarga melalui pemberian bantuan rumah tidak layak huni terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- 4) Dalam rangka penanganan dampak bencana pemerintah daerah telah memfasilitasi untuk masyarakat terdampak bencana pada tahun 2024 dan 2025 sebanyak 199 unit hunian tetap dan untuk hunian sementara sebanyak 66 unit.

B. Faktor Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pencapaian indikator infrastruktur wilayah yang berkualitas sebagai berikut:

1. Kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 untuk penyesuaian alokasi transfer ke Daerah sehingga kegiatan DAK Tahun 2025 di rasionalisasi.
3. Adanya bencana alam pada Kabupaten Tanah Datar di bulan November Tahun 2025 berpengaruh pada jumlah infrastruktur yang rusak.



Tabel 2.13 Perubahan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Tujuan Strategis 1			
Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Meningkatnya pembangunan keagamaan			
IKSS 1.1	Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafizh/hafizah	Rumah Tangga	7.305
IKSS 1.2	Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan Umat	Masjid	14
IKSS 1.3	Tingkat Moderasi Beragama	%	6,67
Meningkatnya pembangunan kebudayaan			
IKSS 1.4	Jumlah peraturan Nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan	Dokumen	21
Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif			
IKSS 1.5	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,92
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			
IKSS 1.6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,30
IKSS 1.7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,91

Tujuan Strategis 2			
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
IKSS 2.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,58
IKSS	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	24,20



2.2			
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata			
IKSS 2.3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,42
IKSS 2.4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,27
Sasaran Strategis: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif			
IKSS 2.5	Tingkat Kemiskinan (%)	%	3,40

Tujuan Strategis 3			
Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian			
IKSS 3.1	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Milyar	3.268,33
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif			
IKSS 3.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,89
IKSS 3.3	Kontribusi Sektor Pariwisata	Milyar	140,35
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, usaha mikro/ IKM, Industri Pengolahan dan BUMD			
IKSS 3.4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,45
Sasaran Strategis: Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja			
IKSS 3.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/orang	66,04
Sasaran Strategis: Meningkatnya Investasi			



IKSS 3.6	Jumlah realisasi investasi daerah	Milyar/ tahun	232
Sasaran Strategis: Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya Saing tinggi			
IKSS 3.7	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	56,14

Tujuan Strategis 4

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
IKSS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	81
IKSS 4.2	Indeks Inovasi Daerah	Indesk	49,23

Tujuan Strategis 5

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas,tangguh bencana,dan ramah lingkungan

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas			
IKSS 5.1	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Indeks	62,51-65,61
Sasaran Strategis: Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup			
IKSS 5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,15
Sasaran Strategis:Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana			
IKSS 5.3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,92

Tujuan Strategis 6

Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat			



IKSS 6.1	Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	50,01
Tujuan Strategis 7			
Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
IKSS 7.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks	3,98
IKSS 7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	5,01
Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah			
IKSS 7.3	Rasio PAD terhadap total pendapatan/ Derajat Otonomi Fiskal	%	14,56
IKSS 7.4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,21
Sasaran Strategis: Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah			
IKSS 7.5	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah	Unit	19
Sasaran Strategis: Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
IKSS 7.6	Persentase Desa Mandiri	%	66,67

Tabel 2.14 Perubahan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD
kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis 1					
Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pembangunan keagamaan					
IKSS 1.1	Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafizh/hafizah	Rumah Tangga	7.305	7.208	98,67
IKSS 1.2	Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan Umat	Masjid	14	14	100
IKSS 1.3	Tingkat Moderasi Beragama	%	6,67	n/a	n/a



Meningkatnya pembangunan kebudayaan					
IKSS 1.4	Jumlah peraturan Nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan	Dokumen	21	14	66,66
Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif					
IKSS 1.5	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,92	65,7	104,41
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak					
IKSS 1.6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,30	n/a	n/a
IKSS 1.7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,91	n/a	n/a

Tujuan Strategis 2					
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
IKSS 2.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,58	77,04	104,06
IKSS 2.2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Indeks	24,20	14,74	60,90
Sasaran Strategis: Meningkatkan Pendidikan berkualitas yang merata					
IKSS 2.3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,42	9,46	100,42%
IKSS 2.4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,27	15,06	98,62
Sasaran Strategis: Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif					
IKSS 2.5	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks	3,40	3,59	105,58

Tujuan Strategis 3				
Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis pertanian				



IKSS 3.1	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Milyar	3.268,33	3.201,81	97,96
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif					
IKSS 3.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,89	0,81	91,01
IKSS 3.3	Kontribusi Sektor Pariwisata	Milyar	140,35	150,24	107,04
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, usaha mikro/ IKM, Industri Pengolahan dan BUMD					
IKSS 3.4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,45	10,71	126,74
Sasaran Strategis: Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja					
IKSS 3.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/ orang	66,04	69,39	105,07
Sasaran Strategis: Meningkatnya Investasi					
IKSS 3.6	Jumlah realisasi investasi daerah	Milyar/ tahun	232.000.000.000	212.820.402.854	91,73
Sasaran Strategis: Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya Saing tinggi					
IKSS 3.7	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	56,14	46,78	83,32

Tujuan Strategis 4

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-------------------	--------	--------	-----------	----------------



Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi

IKSS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	81	78,4	96,79
IKSS 4.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,23	43,17	87,69

Tujuan Strategis 5

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana, dan ramah lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-------------------	--------	--------	-----------	-------------

Sasaran Strategis: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

IKSS 5.1	IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Indeks	62,51- 65,61	66,30	106,06
-------------	--	--------	-----------------	-------	--------

Sasaran Strategis: Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup

IKSS 5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,15	78,41	102,96%
-------------	---	--------	-------	-------	---------

Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana

IKSS 5.3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,92	219,49	56,26
-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-------

Tujuan Strategis 6

Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-------------------	--------	--------	-----------	-------------

Sasaran Strategis: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

IKSS	Indeks penyelenggaraan	Indeks	50,01	50,98	101,93
------	------------------------	--------	-------	-------	--------



6.1	Trantibumlinmas				
Tujuan Strategis 7					
Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
IKSS 7.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks	3,98	2,66	66,83
IKSS 7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	5,01	5,26	95
Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah					
IKSS 7.3	Rasio PAD terhadap total pendapatan/ Derajat Otonomi Fiskal	%	14,56	13,87	95,26
IKSS 7.4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,21	2.63	1252.38
Sasaran Strategis: Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah					
IKSS 7.5	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah	Unit	19	39	205,26
Sasaran Strategis: Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi					
IKSS 7.6	Persentase Desa Mandiri	%	66,67	72	107,99



TUJUAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASIS KELUARGA

IKSS 1.1 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Satu Hafizh/Hafizah

Rumah tangga yang memiliki minimal 1 orang anggota keluarga yang hafizh minimal 1 Juz yang sudah bersertifikat yang di keluarkan oleh Forum Komunikasi Rumah Tahfizh (FKRT) Kecamatan dan Lajnah Tahfizul Qur'an Kabupaten Tanah Datar. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki Hafizh/Hafizah, menandakan semakin meningkat pembangunan keagamaan.

Pada tahun 2025 target jumlah Rumah Tangga yang memiliki satu Hafiz/Hafizah sebanyak 7.305 orang realisasi sebanyak 7.208 dengan capaian sebesar 98,67%. Faktor pendukung capaian kinerja indikator Rumah Tangga yang memiliki satu haafizh/haafizah adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan rumah tahfiz serta jumlah guru tahfiz yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2025 terdapat 240 TPA dan 164 rumah tahfiz dan 14 rumah tahfiz binaan Pemerintah Daerah, dengan jumlah guru tahfiz lebih dari 1.000 orang dengan jumlah siswa mencapai lebih 19.000 orang.
2. Gerakan Pemasangan Stiker “Satu Rumah Satu Hafiz”, sampai dengan tahun 2024 telah memasang stiker sebanyak 7.208 buah, yang berarti jumlah rumah yang telah memiliki Hafiz/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 7.218 rumah.
3. Program “Maghrib Menghantar Berkah”, yaitu mengaji bersama para penghafal Alquran yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, Tasmi' Alquran, dialog dengan Bupati Tanah Datar, dan ditutup dengan sholat Isya' berjamaah. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 178 rumah tahfiz telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini.

IKSS 1.2 Jumlah Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Umat

Masjid binaan merupakan lembaga keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan social keagamaan, ibadah dan toleransi beragama. Tujuan masjid percontohan sebagai pusat kegiatan umat adalah menjadi model atau teladan bagi masjid lain dalam mengoptimalkan fungsi masjid secara terintegrasi sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat sosial, serta pusat pengembangan masyarakat yang modern, ramah lingkungan, dan inklusif, sehingga benar-benar sebagai wadah pusat kegiatan umat ditetapkan target tahun 2025 sebanyak 14 masjid.

Dengan penguatan koordinasi Pemerintah Daerah dalam pembinaan masjid sebagai kegiatan umat terhadap 14 masjid pusat kegiatan umat maka diperoleh realisasi sebanyak 14 masjid dengan capaian 100%.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan visitasi, sosialisasi dan pembinaan administrasi masjid sebagai dasar untuk pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) terhadap 14 masjid yang dilaksanakan pada 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan kriteria seleksi masjid berupa:

1. Memiliki sistem pengurus yang terbuka dan demokrasi.
2. Memiliki jama'ah rutin minimal 50 orang .
3. Diutamakan masjid yang tidak sedang melakukan rehab/renovasi berat.
4. Memiliki layanan minimal pendidikan (TPA, MDTA/ Rumah Tahfiz).
5. Diusulkan oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI Kecamatan).

IKSS 1.3 Tingkat Moderasi Beragama

Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mengukur tingkat moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian serta mencegah konflik agama dan membangun hubungan harmonis antar umat beragama di Kabupaten Tanah Datar.

Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang Beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Capaian indikator tingkat moderasi beragama di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025, data belum tersedia karena penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan pada bulan November sehingga pelaksanaan kegiatan untuk indikator tingkat moderasi beragama belum dapat dilaksanakan.

IKSS 1.4 Jumlah Peraturan Nagari Terkait Adat Salingka Nagari yang Ditetapkan

Jumlah nagari yang menetapkan peraturan nagari terkait adat salingka nagari. Semakin banyak nagari menetapkan peraturan nagari terkait adat salingka nagari menandakan peningkatan pembangunan kebudayaan. Pada tahun 2025 target indikator jumlah peraturan nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan sebanyak 21 peraturan nagari, realisasi sebanyak 14 peraturan nagari dengan capaian kinerja sebesar 66,66%.

Sampai akhir desember tahun 2025 kemarin baru 14 (empat belas) nagari yang telah menyampaikan Peraturan Nagari ke Dinas PMDPPKB hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpahaman nagari dalam melahirkan suatu produk hukum di nagari, untuk itu sejak pertengahan tahun 2025 yang lalu Dinas PMDPPKB selalu aktif melakukan pembinaan ke nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga pada tahun 2025 realisasi jumlah peraturan nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan sebanyak 14 Peraturan Nagari, dengan target sebanyak 21 Peraturan Nagari maka capaian untuk indikator ini sebesar 66,66 %.



IKSS 1.5 Indeks Pembangunan Keluarga

Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebesar 65,7 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga berada pada kategori berkembang/menengah. Angka ini mencerminkan tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diukur melalui beberapa dimensi utama, meliputi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Secara keseluruhan, realisasi 65,7 menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 target indikator indeks pembangunan keluarga sebesar 62,92 berdasarkan indeks pembangunan keluarga tahun 2025 sebesar 65,7 maka capaian indikator ini sebesar 104,41%. Hal ini menunjukkan kondisi cukup baik namun belum optimal, menggambarkan masih adanya keluarga rentan yang membutuhkan intervensi program serta membutuhkan penguatan pada program pemberdayaan ekonomi, edukasi keluarga, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, Pemerintah Daerah akan mempertahankan dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Untuk meningkatkan nilai iBangga ke kategori lebih tinggi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Penguatan program pembangunan keluarga berbasis desa/nagari.
- Peningkatan literasi keuangan dan keterampilan kerja keluarga.
- Optimalisasi peran penyuluh keluarga dan kader pembangunan keluarga.
- Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan kemiskinan keluarga.

Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, terutama nilai-nilai adat dan agama yang berperan dalam membentuk ketahanan keluarga. Skor 65,7 mengindikasikan bahwa:

1. Dimensi Ketentraman Keluarga
Sebagian besar keluarga telah memiliki kehidupan yang relatif aman dan harmonis, dengan tingkat konflik rumah tangga yang terkendali serta kepemilikan dokumen kependudukan yang cukup baik.
2. Dimensi Kemandirian Keluarga
Masih terdapat tantangan dalam aspek ekonomi, seperti pendapatan keluarga, akses pekerjaan layak, dan kepesertaan jaminan sosial. Hal ini memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
3. Dimensi Kebahagiaan Keluarga
Tingkat partisipasi sosial dan kualitas interaksi antar anggota keluarga cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam aspek pendidikan, pengasuhan, dan perencanaan kehidupan berkeluarga.

IKSS 1.6 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/setara ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tingkat laki-laki dan TPAK perempuan. IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang makin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.

Indeks Ketimpangan Gender Tanah Datar sejak tahun 2020 hingga 2024 berfluktuatif dan cenderung menurun. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Datar tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,387 dan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,305 poin yang utamanya



dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Dan untuk tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Pada tahun 2025 target indeks ketimpangan gender (IKG) sebesar 0,30 namun sampai laporan ini selesai disusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) belum tersedia.

IKSS 1.7 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri sendiri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus Meningkat dan sebaliknya.

Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,92, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 ini yaitu sebesar 52,30. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak kembali meningkat. Pada tahun 2025 target indeks perlindungan anak (IPA) sebesar 67,91 namun sampai laporan ini selesai disusun, indeks perlindungan anak tahun 2025 belum tersedia.

TUJUAN STRATEGIS 2

TERWUJUDNYA KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERDAYA SAING

IKSS 2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

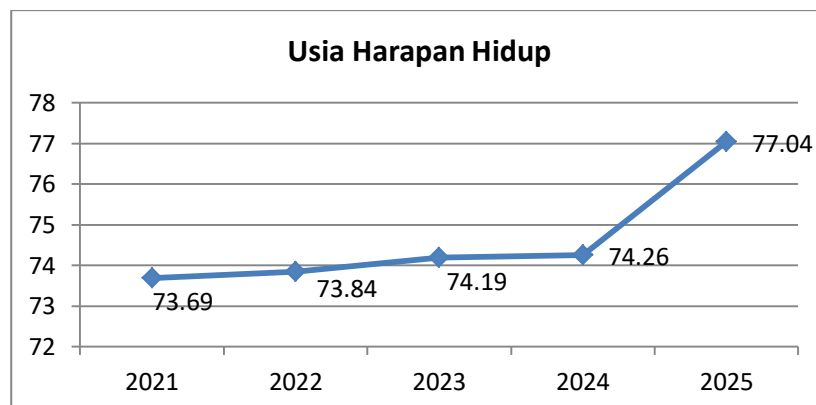
Pada tahun 2025, Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan target yang ditetapkan sebesar 74,58 dengan realisasi 77,04. Capaian ini masuk dalam kategori “Baik Sekali”, yang mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan yang telah dijalankan di Tanah Datar.

Jika melihat tren lima tahun terakhir, Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan yang konsisten, dari 73,69 pada tahun 2021, kemudian 73,84 pada tahun 2022, 74,19 pada tahun 2023, dan 74,26 pada tahun 2024, hingga mencapai 77,04 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan yang terus berkembang, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan, kualitas tenaga medis, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Selama periode 2020 hingga 2025 Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 3,54 tahun yaitu dari angka 73,50 pada Tahun 2020 menjadi angka 77,04 pada tahun 2025, target indikator Umur Harapan Hidup pada tahun 2025 adalah 74,58 dengan tingkat capaian sebesar 104,06%. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Umur Harapan Hidup tahun 2021-2025.

Grafik 2.12
perkembangan capaian indikator Umur Harapan Hidup tahun 2021-2025



Peningkatan umur harapan hidup Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari beberapa faktor Keberhasilan peningkatan kualitas layanan kesehatan, yang mencakup akses kesehatan yang lebih baik, penurunan angka kematian, peningkatan status gizi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.



Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun sarana pendukung lainnya.

Upaya ini tercermin dalam berbagai capaian penting yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan Kesehatan tahun 2025, antara lain:

- a) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan: 87,35%
- b) Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat : 97,42 %
- c) Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus: 100%
- d) Persentase Puskesmas sesuai standar : 100 %
- e) Persentase tenaga kesehatan sesuai standar: 70%
- f) Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin: 73,48%

Peningkatan Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan pangan, Pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan faktor-faktor lainnya.

Dari sisi ekonomi, semakin sejahtera masyarakat, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperpanjang usia hidup. Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu tempat dapat dilihat dari besarnya pendapatan dan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan/pengeluaran, dapat diasumsikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Dari sisi kesehatan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung capaian indikator Umur harapan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pencapaian UHC pada tahun 2025 di Kabupaten Tanah Datar
- 2. Kegiatan penjangkaran kesehatan pada lansia dengan posyandu lansia

3. Kegiatan aksi bergizi pada anak sekolah kegiatannya berupa makan bersama, olahraga dan makan tablet tambah darah untuk remaja putri
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar berupa Kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak sekolah

IKSS 2.2 Prevalensi *Stunting* (*pendek* dan *sangat pendek*) pada balita (%)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan Menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversi ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan standar antropometri anak balita WHO 2005.

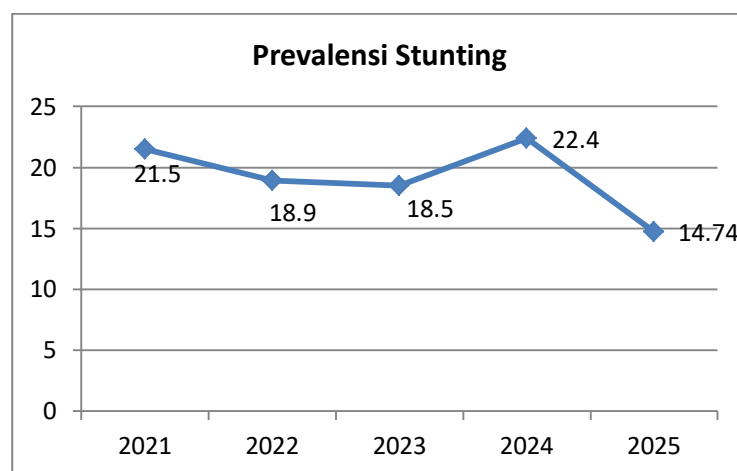
Pada tahun 2021, nilai yang tercatat berada pada angka 21,5, namun mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 18,9. Tren kenaikan ini masih berlanjut meskipun lebih landai pada tahun 2023, dengan nilai sebesar 18,5. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan yang memengaruhi capaian indikator pada dua tahun tersebut. Terbukti pada tahun 2024 dengan penurunan capaian menjadi 22,4%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya program pemulihan atau intervensi kebijakan yang belum optimal, baik dalam bentuk, strategi penguatan, atau peningkatan dukungan pada sektor terkait. Pola naik turun ini memberikan sinyal penting bagi pemangku kebijakan untuk terus mengevaluasi faktor-faktor penyebab penurunan dan memperkuat program yang terbukti efektif dalam mendorong peningkatan.

Realisasi indikator prevalensi stunting tahun 2025 yaitu 14,74%, dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu 16,60% namun mempertimbangan sumber data prevalensi stunting terjadi perubahan target tahun 2025 menjadi 24,20% dengan capaian sebesar 60,90%.

Perubahan target stunting disebabkan oleh perubahan pengambilan data stunting yang awalnya dari RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) dan pada tahun 2023 Kemenkes melakukan Riset berkala dalam bentuk SKI (Survey

Kesehatan Indonesia) yang mengintegrasikan RISKESDAS dan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) untuk memotret Indikator kesehatan terkini. Dengan demikian perubahan target bukan berarti penurunan komitmen, tetapi bentuk penyesuaian kebijakan berdasarkan data dan evaluasi kinerja. Berikut perkembangan nilai Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2025:

Grafik 2.13
perkembangan nilai Prevalensi Stunting
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2025



Dalam rangka mengejar target nasional prevalensi stunting sebesar 18,8% pada tahun 2025, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi stunting tingkat kabupaten secara berkala dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
2. Audit kasus stunting sebagai upaya pencegahan status stunting dalam bentuk identifikasi faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap kasus stunting pada anak.
3. Pendataan kasus stunting sampai ke tingkat Nagari, untuk memastikan perkembangan status stunting di masing-masing nagari.
4. Pemantauan status gizi masyarakat, khususnya balita.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil, baik di Puskesmas, Pustu, maupun Polindes untuk mengantisipasi kegagalan tumbuh kembang janin dan balita pada seribu hari pertama yang terpengaruh langsung



oleh asupan gizi.

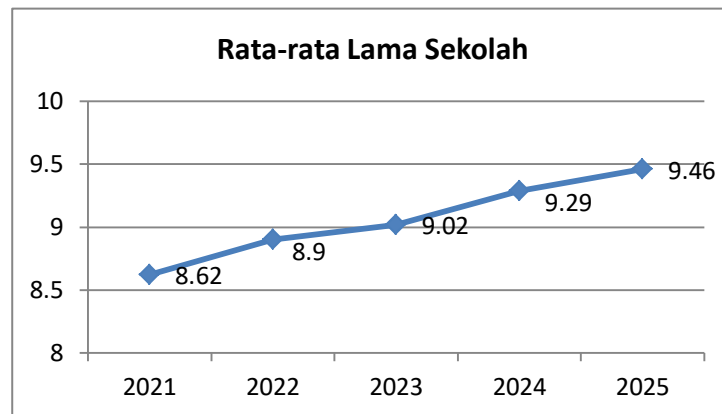
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
7. Pencanangan minum tablet tambah darah bagi remaja putri.

IKSS 2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar adalah “Rata-rata Lama Sekolah”, yaitu rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (<25 tahun) di suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dari 8,61 pada tahun 2020 menjadi 9,29 pada tahun 2024. Rata-rata lama sekolah juga digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, Pada tahun 2025 target rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Datar sebesar 9,42 tahun dengan realisasi sebesar 9,46 tahun maka diperoleh capaian sebesar 100,42% artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Datar baru bisa menikmati Pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP. Angka tersebut sudah sama dengan target program wajib belajar 9 tahun dan sudah memenuhi target RPJMD sebesar 9,42 tahun. Jika dilihat dari kurun waktu tahun 2021 hingga 2025, angka ini meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah perkembangan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025:

Grafik 2.14
Perkembangan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-
2025



Meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah Pada tahun 2025, menyebabkan meningkatnya angka Indeks Pendidikan Tanah Datar tahun 2025 yang mencapai 0,733. Peningkatan Indeks Pendidikan ini tidak terlepas dari dua faktor utama yang membentuknya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana akses dan kualitas pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat Tanah Datar.

Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat disebabkan karena meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2025 di berbagai tingkatan Pendidikan, yaitu :

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini (PAUD) tahun 2024 68,55% tahun 2025 naik menjadi 79,70%.
- 2) APS anak usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD/MI tahun 2024 90,65% tahun 2025 naik menjadi 92,89%.
- 3) APS anak usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP/MTs tahun 2024 82,13% tahun 2025 naik menjadi 82,83%.
- 4) APS anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan tahun 2024 29,15% tahun 2025 naik menjadi 34,24%.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan guna mendorong meningkatnya angka “Rata-rata Lama Sekolah” di Kabupaten

Tanah Datar :

1) Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu dan akses pendidikan di Kabupaten Tanah Datar :

- a. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui kegiatan “Revitalisasi Sekolah” dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 18 Satuan Pendidikan (3 PAUD, 2 SKB, 2 SD dan 11 SMP).
- b. Digitalisasi pembelajaran dengan pemberian bantuan Smart TV kepada Satuan Pendidikan SD dan SMP.

Berikut ini adalah data jumlah SD/MI dan SMP/MTs dan akreditasinya yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 2.15
Tabel Jumlah Sekolah dan Akreditasinya

NO	JENJANG	PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH 2025				BELUM TERAKREDITASI	JUMLAH
		A	B	C	D		
1	SD	106	187	7	0	7	307
2	MI	3	1	3	0	0	7
	JUMLAH	109	188	10	0	7	314
3	SMP	20	32	5	0	1	57
4	MTs	16	25	5	0	2	48
	JUMLAH	36	57	10	0	3	106
	TOTAL	145	245	20	0	10	420

2) Peningkatan Kompetensi Guru.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Di Kabupaten Tanah Datar, telah dilakukan peningkatan kapasitas Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi pendidik (Guru) pada beberapa aspek :

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus Komunitas Belajar.
2. Peningkatan kapasitas Guru Mata Pelajaran.
3. Peningkatan kapasitas Guru dan Orang Tua/wali Murid.
4. Peningkatan kapasitas Kepala Sekolah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 2.488 Guru SD dan 850 guru SMP dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Pendidikan Guru SD dan SMP Tahun 2025

Pendidikan Guru PNS SD dan SMP Tahun 2025							
	D1/di bawa h D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
SD	-	12	1	4	2.565	35	2.617
SMP	-	0	10	0	789	35	834
Jumlah	-	12	11	4	3.354	70	3.451

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3) Inovasi di bidang pendidikan

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar mengembangkan 4 (empat) buah inovasi, yaitu:

a. Klinik Kurikulum.

Klinik Kurikulum bertujuan untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan coaching kepada kepala sekolah dan guru dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka. Klinik ini dilayani oleh seluruh pengawas sekolah, baik secara tatap muka maupun secara online.

b. Pendidikan Inklusi.

Pendidikan Inklusi merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan Inklusi dilaksanakan diseluruh sekolah SDN dan SMPN.

c. Forum Arrijal dan Forum Annisa serta Ekstra Kurikuler Wajib.

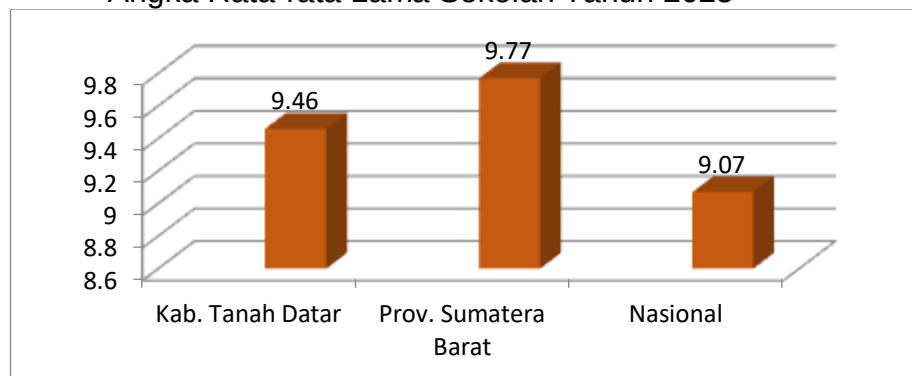
Forum Ar-Rijal adalah wadah atau forum diskusi yang biasanya diadakan di sekolah atau lembaga pendidikan untuk siswa laki-laki. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan karakter siswa, terutama dalam hal Forum Arrijal dan Forum Annisa. Forum ini seringkali menjadi sarana bagi siswa untuk berbagi pengetahuan,

pengalaman, dan ide-ide cemerlang.

Forum Annisa adalah kegiatan ekstrakurikuler yang sering diadakan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah keagamaan Islam, untuk membina dan mengembangkan kemampuan siswa perempuan dalam bidang keagamaan dan keterampilan yang relevan. Forum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis seputar fiqih wanita, akhlak, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslimah.

- d. Dekati Masyarakat Untuk Dapatkan Akses (DIMAUDA) menyukseskan Wajib Belajar 13 tahun.

Grafik 3.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025



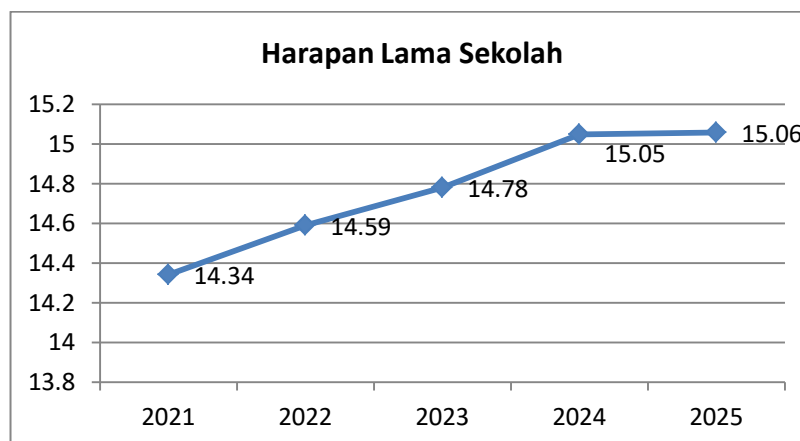
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

IKSS 2.4 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang di daerah.

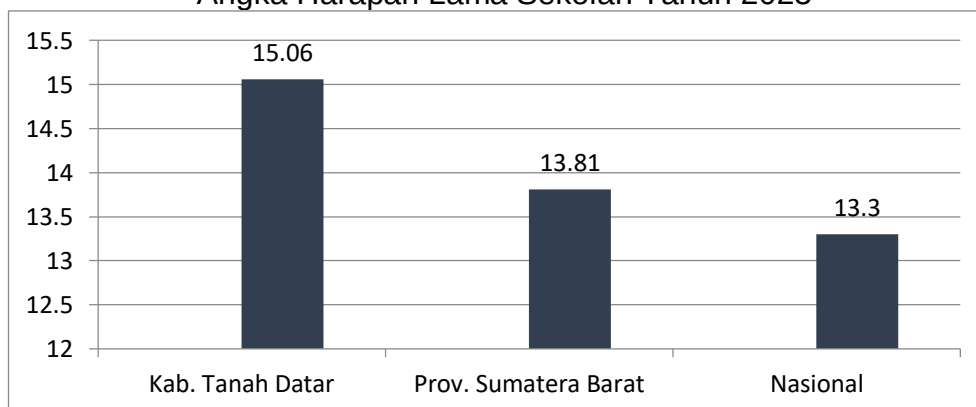
Target harapan lama sekolah di kabupaten Tanah Datar sebesar 15,27 tahun, dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 15,06 Tahun maka capaian kinerja sebesar 98,62%. Berikut perkembangan angka Harapan Lama Sekolah tahun 2021-2025:

Grafik 3.16
Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah tahun 2021-2025



Berdasarkan Badan Pusat Statistik Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 13,81 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional Indonesia Tahun 2025 adalah 13,30 Tahun. Untuk perbandingan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.17
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2025



Sumber Data : Badan Pusat Nasional (BPS)

IKSS 2.5 Tingkat Kemiskinan (%)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025, pada tahun 2025 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar adalah 3,59 dan menjadikan Tanah Datar daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah ke-4 di Sumatera

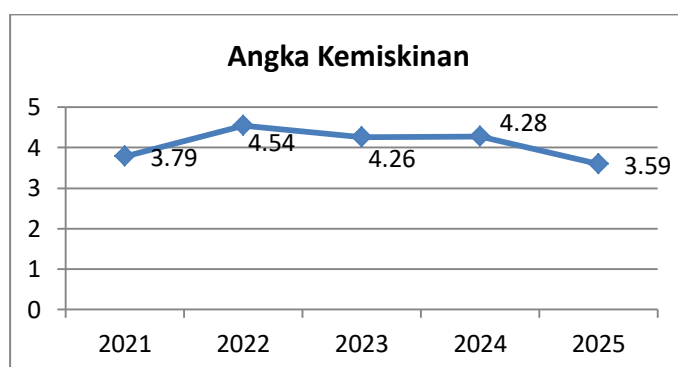
Barat. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Sumatera Barat, angka kemiskinan Tanah Datar adalah yang paling rendah.

Tabel 2.17
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Sumbar Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	% Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
		2024	2025
	PROVINSI SUMATERA BARAT	5,75	5,35
1	Kota Sawahlunto	2,33	2,72
2	Kota Solok	3,07	2,91
3	Kota Padang	4,06	3,63
4	Kota Bukittinggi	4,08	3,78
5	Kota Pariaman	4,26	3,83
6	Kab. Tanah Datar	4,28	3,59
7	Kota Payakumbuh	5,19	4,95
8	Kota Padang Panjang	5,31	4,97
9	Kab. Dharmasraya	5,32	4,61
10	Kab. Sijunjung	5,78	5,05
11	Kab. Padang Pariaman	6,27	5,86
12	Kab. Solok Selatan	6,56	6,00
13	Kab. Pasaman	6,74	6,02
14	Kab. Agam	6,83	5,97
15	Kab. Lima Puluh Kota	6,92	6,10
16	Kab. Pasaman Barat	7,00	6,30
17	Kab. Solok	7,31	6,52
18	Kab. Pesisir Selatan	7,49	6,52
19	Kab. Kepulauan Mentawai	13,89	13,22

Perkembangan persentase penduduk miskin dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3.18
Perkembangan persentase penduduk miskin





Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah, berupa:

1. Perlindungan sosial, baik berupa bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung kepada masyarakat. Bantuan langsung diberikan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Bantuan langsung, Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa Bantuan Sosial uang Rp.2.000.000 per orang sebanyak 167 orang lanjut usia miskin, 162 orang penyandang disabilitas miskin, dan 467 orang anak miskin di luar panti asuhan dan bantuan alat usaha bagi 100 orang pelaku Industri Rumahan (IR) dan 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. Bantuan tidak langsung, Bantuan tidak langsung diberikan dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan maupun bantuan pendidikan.
4. Bantuan pendidikan berupa bantuan social uang yang diberikan kepada 1.433 orang mahasiswa miskin dan siswa SLTA miskin.
5. Pemerintah juga melaksanakan program untuk mengurangi beban produksi masyarakat, di antaranya adalah bantuan bajak gratis untuk petani, program Makan Rendang untuk mengatasi masalah rentenir dan bantuan untuk UMKM. Selain itu, mengingat masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak inflasi, pemerintah melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian yang menjadi penyumbang inflasi, seperti cabe merah, beras, bawang merah, tomat dan telur. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Dinas Koperindag bersama dengan Bagian Perekonomian Setda melaksanakan operasi pasar untuk beberapa jenis komoditi, seperti gula, minyak goreng, bawang merah, cabe, dll.

Salah satu program perlindungan sosial dan kerawanan pangan adalah penyaluran cadangan pangan berupa beras untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang/galodo yang terjadi pada bulan Mei 2025 sebanyak 25 ton dan penyerahan paket Sembako untuk balita di Kecamatan X Koto



pada bulan April 2024 sebanyak 61 paket yang terdiri dari 1 sak telur, susu lactogen sesuai umur, kacang hijau dan beras. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan memberikan akses kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan yang disediakan pemerintah.

TUJUAN STRATEGIS 3

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS PRODUK

IKSS 3.1 Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

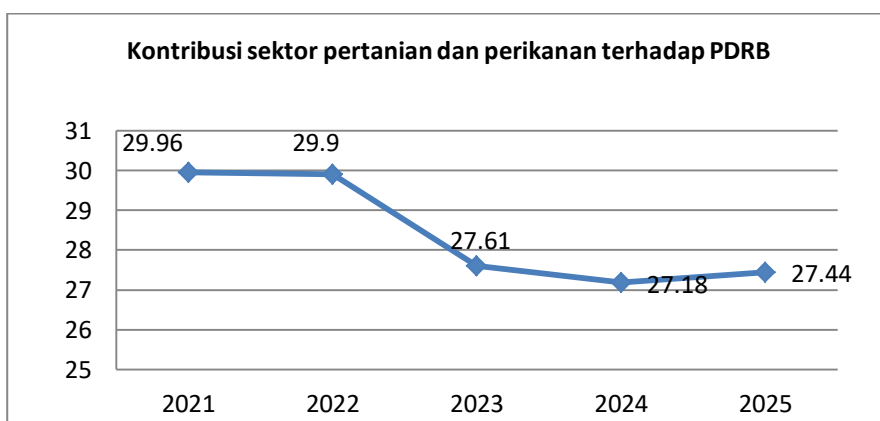
PDRB Kabupaten Tanah Datar dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan harga konstan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3.201,81 milyar, dengan target sebesar Rp 3.268,33 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 3.151,72 milyar atau tumbuh sebesar 1,59%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tercatat sebagai penyokong perekonomian utama di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 27,44%.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, total nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025 sekitar Rp. 5.069,25 miliar. Sebagai salah satu daerah agraris di Sumatera Barat, PDRB Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian. Meningkatnya produk pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan memberikan dukungan kuat terhadap meningkatnya nilai tambah sektor Pertanian. Dengan demikian, harapan perekonomian Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan masih tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2025 target indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB sebesar 27,61% dengan realisasi 27,44% dan tingkat capaian sebesar 99,38%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan pada sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Tanah Datar seperti sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (7,15%), penyediaan akomodasi makan minum (2,73%) dan jasa lainnya (2,22%) dan

Berikut ini adalah perkembangan capaian kinerja indikator “Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB” dalam kurun waktu 2021 – 2025:

Grafik 2.19
Perkembangan Kontribusi sektor pertanian
dan perikanan terhadap PDRB 2021–2025



Berdasarkan grafik tersebut di atas, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2025 semakin meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp 50,09 miliar. Berikut perbandingan Kontribusi dan nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi dan Nasional tahun 2021-2025.

Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar didukung oleh produksi sektor pertanian dan perikanan, berikut ini adalah data produksi pertanian tahun 2021 – 2025:

Tabel 2.18

Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021 – 2025

No.	Komoditi Pertanian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	343.120,84	327.777,46	332.146,58	287.516,35	289.336,61
2.	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)	48.737,32	52.223,89	47.871,49	42.562,86	49.899,89
3.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	18.428,55	18.577,69	18.764,52	18.863,75	19.039,36
4.	Peningkatan produksi peternakan (kg)	15.936,07	15.356,07	17.580,53	16.812,94	17.660,26
5.	Peningkatan populasi ternak (ekor)	2.642.918	2.779.006	2.805.268	2.850.182	2.854.212
6.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.084,50	12.827,81	13.002,81	11.050,70	9.559,34
	a. Perikanan budidaya (ton)	9.782,54	10.062,30	10.131,79	8.119,86	6.640,16
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.301,95	2.765,51	2.871,02	2.930,84	2.919,18

Pencapaian target indikator kinerja Pertanian Tahun 2025 dapat dilaksanakan karena adanya upaya dan dukungan dari pelaksanaan program/kegiatan yang didukung dari APBD Kabupaten Tanah Datar maupun Non APBD antara lain :

1. Pelaksanaan Program unggulan sektor pertanian seperti layanan bajak gratis Dimana pada tahun 2025 anggaran yang tersedia untuk fasilitasi bajak gratis pada APBD hanya untuk 2.636 Ha, namun realisasi yang dicapai adalah seluas 4.239 Ha (160,81%), hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan dana dari kegiatan APBN berupa optimasi lahan.
2. Upaya Pengembangan kawasan dan bantuan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dari dana APBD.
4. Gerakan pengendalian OPT oleh masyarakat yang didukung dengan dana APBD.



5. Adanya program unggulan bantuan bertanam padi yang telah di *launching* pada tanggal 2 Oktober tahun 2025
6. Upaya optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi pertanian (teknologi padi salibu, pemakaian varietas unggulan)
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan lahan pertanian (Bantuan alsintan) baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sumatera barat maupun APBN).
8. Peningkatan upaya pembangunan/rehabilitasi sarana pertanian seperti saluran irigasi, jalan usaha tani.
9. Pengadaan Alat-alat mesin pertanian seperti Hand Tractor, cultivator, mesin pemotong rumput dan alat alsintan lainnya
10. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, baik dari dana APBD Kabupaten Tanah Datar maupun Provinsi Sumatera Barat.
11. Pembinaan dan peningkatan SDM petani melalui Penyuluhan Pertanian
12. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) pada sektor peternakan
13. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dari dana APBD.
14. Pembangunan/Pengadaan prasarana dan sarana untuk Puskesmas, Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan dari dana APBD.
15. Pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan dan perdagangan ternak.
16. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dari dana APBD.
17. Upaya penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mulai terjangkit di akhir tahun 2004 pada Kabupaten Tanah Datar.
18. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 6 (enam) unit, pada tahun 2025 dari hasil produksi benih ikan BBI sebanyak 618.350 ekor untuk dijual 606.750 ekor, untuk kegiatan sosial 11.600 ekor
19. Pembinaan terhadap pembudidaya ikan
20. Pemberian bantuan benih, pakan dan sarana prasarana perikanan budidaya
21. Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Dari Realiasi capaian kinerja pada tahun 2025 terdapat beberapa penyebab penurunan produksi adalah:

1. Secara umum faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi komoditi pertanian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - Adanya erupsi gunung Marapi pada bulan desember 2023 dan masih berulang sampai akhir tahun 2025 sehingga abu vulkanik yang keluar dari erupsi gunung Marapi menyebabkan banyak tanaman masyarakat yang mati dan gagal panen terutama tanaman cabe dan jeruk
 - Alih fungsi lahan pertanian terutama sawah untuk pembangunan diluar sektor pertanian;
 - Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi;
 - Adanya serangan hama dan penyakit tanaman
2. Penurunan produksi padi disebabkan oleh terjadinya banjir bandang pada di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan rusaknya lahan sawah dan jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu adanya serangan hama tikus pada lahan petani di kabupaten Tanah Datar.
3. Penurunan Produksi Jagung dipengaruhi karena adanya penurunan luas tanam yang menyebabkan terjadinya penurunan luas panen. Penurunan luas tanam dipengaruhi adanya kenaikan harga benih jagung dan ketersediaan bantuan benih jagung kepada kelompok tani/petani. Untuk penanaman jagung, petani masih sangat bergantung kepada bantuan benih yang diberikan.
4. Sementara penurunan produksi ternak komoditi ternak besar dan ternak kecil disebabkan adanya bencana erupsi gunung Marapi yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pakan ternak, sehingga banyak ternak masyarakat yang mati karena kekurangan bahan makanan dan juga termakan abu vulkanik dari erupsi gunung Marapi, selain itu bencana banjir bandang yang terjadi pada menyebabkan banyak ternak petani yang hanyut terbawa arus banjir.

5. Penurunan produksi perikanan disebabkan belum adanya program rehabilitasi kolam akibat bencana tahun 2024 dan adanya kerusakan kolam dan fasilitas alat tangkap yang hanyut akibat dampak bencana akhir tahun 2025.
6. Minimnya bantuan sarana dan prasarana budidaya tahun 2025, sehingga tidak mencapai sasaran dalam peningkatan produksi

Untuk mengukur sasaran meningkatnya produksi pertanian ditetapkan indikator sasaran:

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan,
- 2) Peningkatan produksi tanaman hortikultura,
- 3) Peningkatan produksi tanaman perkebunan,
- 4) Peningkatan produksi peternakan, dan
- 5) Peningkatan populasi ternak.
- 6) Fasilitasi layanan bajak gratis.

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.19
Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)			
	a. Padi	267.698,69	239.008,87	89,28
	b. Jagung	24.275,28	17.247,65	71,05
	c. Kacang Tanah	590,92	439,04	74,30
	d. Ubi jalar	41.522,00	32.641,05	78,61
	T o t a l	334.086,89	289.336,61	86,61

Peningkatan produksi tanaman pangan dihitung dari jumlah produksi 4 (empat) komoditi tanaman pangan utama yaitu: padi, jagung, kacang tanah dan ubi jalar. Target peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 334.086,89 ton dengan realisasi total sebesar 289.336,61 ton (86,61%). Untuk realisasi produksi padi sebesar 239.008,87 ton (89,28%)



belum mencapai target yang telah ditetapkan sementara produksi jagung sebesar 17.247,05 ton (71,05%) juga belum mencapai target yang telah ditetapkan, produksi kacang tanah sebesar 439,04 ton (74,30%) juga belum mencapai target yang ditetapkan, serta realisasi produksi ubi jalar sebesar 32.641,05 ton (78,61%) masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ini adalah sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih output kegiatan ini berupa Fasilitas Layanan Bajak Gratis seluas 4.008,50 Ha, 11 unit Mesin Potong Rumput, 6 (enam) unit Handspayer, 1 (satu) unit Hand Traktor dan pengembangan varietas unggul daerah bujang marantau di kelompok tani Padang Tewe Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dengan bantuan pupuk NPK dan urea sebanyak 200 Kg.





2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih output kegiatan ini pengembangan varietas unggul daerah bujang marantau di kelompok tani Padang Tewe Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dengan bantuan pupuk NPK dan urea sebanyak 200 Kg.



3. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Pasca Panen tanaman pangan, output kegiatan ini berupa pelaksanaan Inventarisasi sarana pasca panen, pelaksanaan validasi data CP/CL penerima sarana pasca panen, pelaksanaan pemeriksaan sarana pasca panen di tingkat penerima/kelompok tani, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan sarana pasca panen, serta terlaksananya pertemuan/rapat dalam rangka mendukung penyediaan data hasil produksi tanaman pangan.



4. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/kota, output kegiatan ini berupa Pelaksanaan sekolah lapang Padi Salibu 1 unit pada kelompok tani Bodi Nagari Tabek Kecamatan Pariangan dengan memberikan bantuan pupuk NPK dan urea sebanyak 200 kg.



5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan memberikan bantuan berupa Pengadaan 15 Kg Fungisida Victory 80 WP Berbahan aktif Mankozeb, 55 kotak Rodentisida Petrokum 0.005 BB Rodentisida berbentuk kipang, 32 liter Insektisida Bassa 500 EC Berbahan aktif Fenobukarb untuk Kepinding Tanah, 38 Kg Insektisida Applaud 10 WP Berbahan aktif Buprofezin untuk hama wereng, 30 Kg Bakterisida Nordox 56 WP Berbahan aktif Copper Oxide 56%.



6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani sebanyak 4 paket, Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan target sebanyak 4 unit, dan hanya terlaksana 1 unit di jorong Piliang Nagari Limo Kamu Kec Lima Kaum, sementara 3 unit lainnya yang terdapat di Nagari Guguak Malalo kecamatan Batipuh selatan tidak dapat dilaksanakan karena terdampak banjir pada tanggal 27 November 2025, dan memutus akses jalan ke lokasi kegiatan, sehingga 3 unit kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan



7. Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian berupa *launching* program unggulan Pemerintah Daerah Bantuan Bertanam Padi (BABENDI).



2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
Peningkatan produksi tanaman hortikultura Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20 Pengukuran capaian kinerja peningkatan produksi tanaman hortikultura Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (ton)			
	a. Cabe	19.960,89	19.263,00	96,50
	b. Tomat	20.666,79	24.855,69	120,27
	c. Bawang Merah	4.868,61	4.124,44	84,71
	d. Jeruk	3.333,21	1.656,76	67,66
T o t a l		48.829,50	49.899,89	102,19

Sumber Data : Statistik Pertanian Bidang Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman hortikultura dihitung dari produksi 4 (empat) komoditi hortikultura utama yaitu: cabe, tomat, bawang merah dan Jeruk. Target peningkatan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2025 adalah sebesar 48.829,50 ton dengan realisasi total telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 49.899,89 ton (102,19%). Realisasi target produksi untuk 3 komoditi cabe sebesar 19.263,00 ton (96,50), bawang merah sebesar 4.124,44 ton (84,71%) dan jeruk sebesar 1.656,76 ton (67,66%), belum mencapai target yang ditetapkan sementara komoditi Tomat sebesar 24.855,69 ton (120,27%).

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura ini adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi dengan output kegiatan berupa :
 - a. 4 (empat) sachet benih cabe, 4.000 batang bibit sayuran, 4 (empat) sachet bibit terong, 4 (empat) sachet bibit tomat, 20 batang bibit alpukat, 20 batang bibit jambu kristal, 20 batang bibit durian, 15 kg polybag dan 500 kg pupuk kompos.
 - b. Uji adaptasi Cabe Lemarsi pada Kelompok Tani Kubu Gadang Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto.



- c. Sarana Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe) untuk 5 kelompok tani dengan saprodi berupa 750 kg pupuk NPK, 10 buah mulsa Plastik, 20 liter POC dan 5.000 kg Pupuk Kompos.
- d. Sarana Produksi Tanaman Hortikultura (Bawang Merah) berupa 600 Kg pupuk NPK, 8 buah mulsa plastik, 12 Liter POC, 4.000 kg pupuk kompos untuk 4 kelompok tani.
- e. Sarana produksi tanaman sayuran berupa 100 Kg pupuk NPK, 2 (dua) unit mulsa plastik, 2 (dua) botol sida, 2 (dua) kg sida, 2 (dua) unit sprayer dan 500 kg kompos untuk kelompok Bahagia Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto.
- f. Pengembangan Kawasan Cabe berupa 500 Kg pupuk NPK, 12 unit mulsa plastik, 12 botol Insektisida, 12 Kg Fungisida, 2 unit handsprayer, 6 Kg Benih Cabe, 4 sachet benih tomat dan 5.000 Kg pupuk kompos. 700 batang bibit alpukat untuk kelompok tani Balerong sari dan 250 batang untuk Kelompok Tani Data Indah Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.



3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
- Peningkatan produksi tanaman perkebunan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21 Pengukuran capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)			
	a.Karet	7.265,22	7.338,00	101,00
	b.Kakao	4.153,54	4.195,00	101,00
	c.Tebu	4.983,90	5.033,75	101,00
	d.Kopi	1.358,56	1.365,60	100,52
	e. Casiavera	1.097,06	1.107,00	100,91
T o t a l		18.858,28	19.039,35	100,96

Sumber Data : Statistik Pertanian Bidang Perkebunan

Peningkatan produksi tanaman perkebunan dihitung dari jumlah produksi 4 (empat) komoditi perkebunan utama yaitu: karet, kakao, tebu, kopi dan casiavera. Target produksi komoditi perkebunan pada tahun 2025 sebesar 18.858,28 ton rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian target produksi sebesar 19.039,35 ton (100,96%).

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ini adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dan sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian dengan output kegiatan berupa Bantuan pupuk NPK 16:16:16 sebanyak 1.680 Kg untuk 11 Kelompok Tani, Pengadaan 18 botol obat-obatan tanaman Perkebunan, 12 bungkus Pengendalian serangan hama jamur dan 20 botol Insektisida pengendalian serangan serangga serta rehabilitasi kakao melalui penyambungan sebanyak 800 batang pada kelompok tani Alam Organik Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, serta Bantuan 1.700 batang bibit kayu manis untuk kelompok tani Sejahtera Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung.



2. Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota dengan output kegiatan berupa Sekolah Lapang komoditi kopi pada 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Guguak Panjang Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang dan kelompok tani Banda Pauah Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan.



4. Peningkatan Produksi Peternakan
Peningkatan produksi produksi peternakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.22 Pengukuran Capaian Kinerja
Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi peternakan (ton)			
	a. Daging Sapi	1.467,38	1.463,50	99,74
	b. Daging Kerbau	121,10	121,40	100,25
	c. Daging Kambing	190,81	190,69	99,94
	d. Daging Ayam	5.088,72	5.078,04	99,79
	e. Telur	10.825,43	10.806,13	99,82
Total		17.693,42	17.659,77	99,81

Sumber Data : Statistik Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peningkatan produksi peternakan dihitung dari produksi 5 (lima) peternakan yaitu: daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam dan telur. Target peningkatan produksi peternakan pada tahun 2025 adalah sebesar 17.693,42 ton dengan realisasi total belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya sebesar 17.659,77 ton (99,81%). Realisasi target produksi untuk 1 komoditi Daging kerbau sebesar 121,40 ton (100,25) telah mencapai target yang telah ditetapkan sementara untuk 4 komoditi lainnya yaitu sapi sebesar 1.463,50 ton (99,74), daging kambing sebesar 190,69 ton (99,94%), daging ayam sebesar 5.078,04 ton (99,79%) dan telur 10.806,13 ton (99,82) hampir mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Produksi Peternakan ini adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan rincian kegiatan Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH).
2. Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dengan output kegiatan berupa pelaksanaan penjarangan/penangkapan

hewan penular rabies terutama anjing liar di beberapa lokasi. Dengan anggaran tersedia penjarangan/ penangkapan dan eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR) hanya terlaksana pada 7 lokasi. Jumlah HPR yang dapat tereliminasi sebanyak 300 ekor dan Pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban dilaksanakan pada beberapa mesjid utama di Kota Batusangkar dan mesjid utama di 14 kecamatan.

3. Kegiatan Pengawasan dan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Sub Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Lintas Daerah kabupaten/Kota dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan serta penyemprotan desinfektan pada 6 pintu masuk Kab. Tanah Datar yaitu :
 1. Kubu Kerambil, Kecamatan Batipuh
 2. Ombilin, Kecamatan Rambatan
 3. Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting
 4. Sitangkai, Kecamatan Lintau Buo
 5. Simpang Baso, Kecamatan Tanjung Alam
 6. Kecamatan Lintau Buo Utara
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan rincian kegiatan Pengambilan, dan pengiriman dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan dan terlaksananya pengambilan sampel medis veteriner.

Pengambilan dan pemeriksaan jenis sampel yang diambil sebanyak 5 sampel bakso, 5 sampel daging ayam, 5 sampel daging sapi dan 50 butir telur ayam (5 sampel). Pengujian yang dilakukan adalah pengujian cemaran residu antibiotika, uji pemalsuan daging dan pengujian boraks untuk sampel bakso. Bahan pangan asal hewan ini dilakukan pengujian pada Balai Veteriner Bukittinggi.

5. Peningkatan populasi ternak

Peningkatan populasi produksi peternakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23 Pengukuran Capaian Kinerja
Peningkatan Populasi Ternak Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
5.	Peningkatan populasi ternak (ekor)			
	a. Ternak besar (sapi, kerbau)	43.600	43.612	100,00
	b. Ternak kecil (kambing, domba)	31.130	31.227	100,31
	c. Unggas	2.781.152	2.779.373	99,94
T o t a l		2.855.882	2.854.212	99,94

Sumber Data : Statistik Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peningkatan populasi ternak terdiri dari: 3 (tiga) jenis indikator komoditi yaitu ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Target peningkatan populasi ternak telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2.855.882 ekor dengan capaian sebesar 2.854.212 ekor (99,94%).

Realisasi 2 komoditi populasi ternak yaitu ternak besar (sapi, kerbau) sebesar 43.612 ekor (100,03%) dan ternak kecil (kambing, domba) sebesar 31.227 ekor (100,31%) telah mencapai target yang telah ditetapkan, sementara untuk ternak unggas sebesar 2.779.373 ekor (99,94) telah mencapai target yang ditetapkan.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Peningkatan Populasi Ternak ini adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/pakan output kegiatan ini adalah pengadaan N2 Cair sebanyak 300 liter untuk Inseminasi Buatan (IB) oleh petugas IB,
2. Sub Kegiatan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, Output Sub Kegiatan ini berupa 1 paket obat-obatan, 6900 Kg konsentrat, 510 zak rumput dan aneka makanan ternak.

3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan benih/bibit ternak yang bersumber dari Daerah Kabupaten/Kota lain. Output Sub Kegiatan ini berupa 54 ekor kambing, 110 ekor ayam kampung, 2 (dua) ekor sapi lokal, 3 (tiga) ekor sapi simental, 86 ekor itik, 1 (satu) unit mesin tetas dan 200 butir telur tetas, 1 (satu) unit kandang kambing, 1 (satu) paket galo-galo dan 500 Kg konsentrat.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kegiatan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dengan uraian kegiatan pelayanan medis untuk hewan dan ternak masyarakat.

Sementara itu untuk mencapai semua target kinerja diatas, juga didukung oleh peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dari Dinas Pertanian dalam menjalankan program kegiatan secara langsung dilapangan dan melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani, adapun program Penyuluhan Pertanian Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Output sub kegiatan ini berupa mimbar sarasehan, Programa Penyuluh dan *Forum Group Discussion* (FGD) Peran BPP dalam Pembangunan Pertanian.
2. Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Output Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya produksi pertanian ditetapkan 2 strategi yaitu:

- 1) Meningkatkan produktivitas pertanian.
- 2) Meningkatkan luas areal pertanian.

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai strategi meningkatnya produktivitas pertanian adalah:

- 1) Menurunnya biaya produksi pertanian
- 2) Meningkatkan intensifikasi pertanian.
- 3) Optimalisasi penerapan teknologi pertanian.
- 4) Sarana dan prasarana pertanian.
- 5) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular.
- 6) Meningkatkan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan petani dan pelaku agribisnis.
- 7) Meningkatkan AOTP dan AOTS.

Sedangkan arah kebijakan untuk mencapai strategi Meningkatnya luas areal pertanian adalah dengan melaksanakan penambahan areal pertanian (ekstensifikasi).

2. Produksi Perikanan

Peningkatan kinerja bidang perikanan diukur dari indikator peningkatan produksi perikanan. Tolak ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan berasal dari peningkatan jumlah produksi komoditi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap di danau dan perairan umum lainnya.

Tabel 2.24
Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2025

No.	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan produksi perikanan (ton)	12.827,81	13.002,81	11.050,70	9.559,34
	a. Perikanan budidaya (ton)	10.062,30	10.131,79	8.119,86	6.640,16
	b. Perikanan tangkap (ton)	2.765,51	2.871,02	2.930,84	2.919,18

Produksi perikanan terdiri atas produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebagian besar bersumber dari produksi ikan nila dan ikan mas, dua komoditi yang paling tinggi permintaannya karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi dua jenis ikan tersebut. Sementara, budidaya jenis ikan

yang lain tidak begitu tinggi produksinya, sebagai contoh ikan gurami karena masa pembudidayaannya yang lama sehingga masyarakat beralih ke jenis ikan lain yang lebih pendek masa budidayanya. Berikut adalah data produksi ikan budidaya pada tahun 2022 – 2025:

Tabel 2.25
Produksi Ikan Budidaya 2022 – 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (dalam ton):				
Ikan Mas	3.315,40	3.282,80	1.891,29	1.335,6
Ikan Nila	4.756,90	5.055,90	4.683,78	3.944,5
Gurami	646,05	478,37	268,95	163,6
Lele	1.327,74	1.309,99	1.084,44	1.186,4
Ikan lainnya	16,17	4,76	11,40	10,06

Terlihat bahwa produksi ikan mas, ikan nila, ikan gurame dan ikan lele mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan banyaknya kolam masyarakat yang mengalami kerusakan. Produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 s/d 2024 terjadi peningkatan produksi ikan bilih karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap bagan dan penggunaan KJA (Keramba Jaring Apung) di Danau Singkarak sehingga meningkatnya populasi ikan bilih di Danau Singkarak. Pembangunan perikanan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis dan maupun manajerial serta fasilitasi terhadap akses teknologi. Program pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana serta peningkatan kelestarian sumber



daya perikanan.

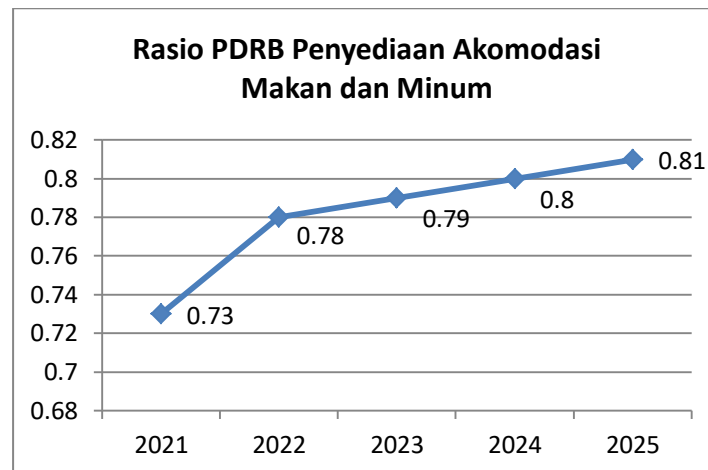
IKSS 3.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional (PDRB) yang dikontribusikan oleh kegiatan terkait pariwisata meliputi, Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, serta Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh kegiatan terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari kegiatan/aktivitas yang terkait pariwisata.

Sektor akomodasi makan minum merupakan salah satu faktor pendukung dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB khususnya bidang pariwisata di Kabupaten Tanah Datar. Rasio PDRB akomodasi makan minum merupakan perbandingan antara nilai tambah bruto dari sektor akomodasi makan minum dalam suatu wilayah dengan total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, sektor akomodasi makan minum mencakup bisnis-bisnis seperti hotel, restoran, kafe, kantin, dan layanan makanan lainnya.

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari 0,71% pada tahun 2020 menjadi 0,80% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 target rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 0,89 dengan realisasi rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 0,81 dan tingkat capaian sebesar 91,01%. Hal ini didukung oleh 46 unit fasilitas akomodasi (9 hotel, 2 bungalow, 1 villa, 3 penginapan, 5 *guest house*, dan 26 *homestay*), 49 unit untuk rumah/warung makan/restoran/café dan warung kopi, serta 197 situs objek wisata yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Berikut perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2021-2025:

Grafik 2.20
perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi
Makan dan Minum tahun 2021-2025



IKSS 3.3 Kontribusi Sektor Pariwisata

Nilai PDRB (ADHB) yang bersumber dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB ADHB dari kegiatan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum, semakin mencerminkan adanya peningkatan pada sektor pariwisata.

Pada tahun 2025 target kontribusi sektor pariwisata sebesar 140,35 milyar dengan realisasi sebesar 150,24 milyar dan tingkat capaian sebesar 107,04%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan banyaknya event-event yang dilaksanakan pada Objek Wisata Unggulan Istano Basa Pagaruyung dan meningkatkan promosi yang dilakukan di berbagai baliho di tempat strategis untuk menarik kunjungan wisatawan. Upaya lainnya dengan pembangunan fisik yang dilakukan untuk pengembangan objek wisata unggulan Istano basa pagaruyung dan Pelatihan peningkatan SDM Kepariwisataan untuk pelaku wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

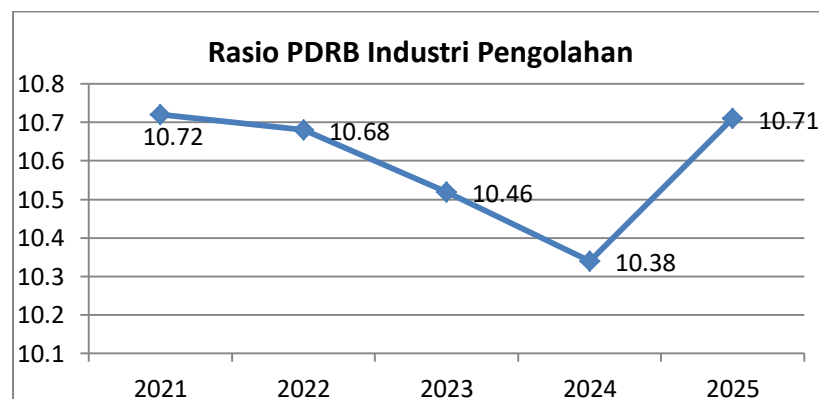
IKSS 3.4 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Target indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2025 sebesar 13,80% dengan realisasi sebesar 10,71% dan tingkat capaian

sebesar 77,60%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 sebesar 10,71% atau sebesar Rp. 1.265,02 Miliar menurut PDRB harga konstan.

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang menjadi penunjang ekonomi dalam wilayah. Dari data statistik, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu diantara daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup baik diketahui dari sektor-sektor yang membentuk PDRB dan pertumbuhan PDRB Tanah Datar. Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami penurunan dari 10,48 pada tahun 2020 menjadi 10,38 pada Tahun 2024. Berikut perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan tahun 2021-2025:

Grafik 2.21
Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan tahun 2021-2025



Berdasarkan data Rasio Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Datar periode 2020–2024, terlihat bahwa kontribusi sektor ini mengalami tren penurunan setelah sempat meningkat pada awal periode. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 10,48% dan naik menjadi 10,72% pada tahun 2021, yang merupakan titik tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, mulai tahun 2022 rasio sedikit menurun menjadi 10,68%, diikuti penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi 10,46%, dan kembali turun ke level terendah 10,38% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan melemahnya daya saing industri pengolahan di daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku lokal, kurangnya inovasi teknologi, berkurangnya investasi, atau persaingan dengan produk dari luar daerah. Sektor industri berdasarkan data BPS adalah penyumbang PDRB terbesar

ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Pada tahun 2025 rasio perkembangan kontribusi industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar sebesar 10,71% hal ini menunjukkan peningkatan pada sektor industri pengolahan karena didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM dan daya saing IKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian antara lain Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan teknis dan/atau pendampingan produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pendampingan Persiapan Dokumen GMP dan HACCP, Pendampingan Persiapan Dokumen ISO 9001, serta sosialisasi sertifikasi Halal dan TKDN yang diikuti oleh sebanyak 140 IKM.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM yang meliputi Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM dan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM yang diikuti 100 IKM.
3. Pelaksanaan pembangunan sentra olahan komoditi hortikultura di Kecamatan Salimpaung.
4. Fasilitasi standarisasi produk dan pelaku IKM (sertifikat halal, sertifikat TKDN dan HKI merek).
5. Fasilitasi promosi produk IKM (promosi pameran Dekranasda Provinsi, Inacraft, Bazar Cindua Mato) Bantuan peralatan bagi kelompok IKM.

IKSS 3.5 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besar kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi.

Pada tahun 2025 tingkat produktivitas tenaga kerja ditargetkan sebesar 66,04 juta per orang, realisasi sebesar 69,39 juta per orang dengan capaian sebesar 105,07%. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja ini adalah karena sudah banyaknya pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, penggunaan teknologi dan peralatan yang lebih modern, lingkungan kerja yang nyaman dan motivasi serta semangat kerja tinggi.

IKSS 3.6 Jumlah realisasi investasi daerah

Jumlah realisasi investasi adalah nilai yang menggambarkan penambahan nilai investasi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang besar di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan investasi juga meningkatkan lebih banyak peluang usaha dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2025 target jumlah realisasi investasi daerah sebesar Rp. 232.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 212.820.402.854 dengan capaian kinerja sebesar 91,73%. Adapun penyebab tidak tercapainya target realisasi investasi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 diantaranya adalah kemungkinan adanya pengaruh kondisi ekonomi dan politik global sehingga lahir berbagai kebijakan yang turut mempengaruhi ekonomi regional dan nasional dan ini sedikit banyaknya berdampak kepada perkembangan investasi daerah, selain itu faktor bencana alam yang terjadi khususnya di Kabupaten Tanah Datar pada 2 tahun terakhir juga mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh dimana bencana alam merenggut korban jiwa dan berdampak terhadap rusaknya beberapa infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan adalah dengan melakukan beberapa langkah berikut, yaitu:

1. Mengikuti kegiatan pameran APKASI Otonomi Expo, guna untuk

mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Tanah Datar.

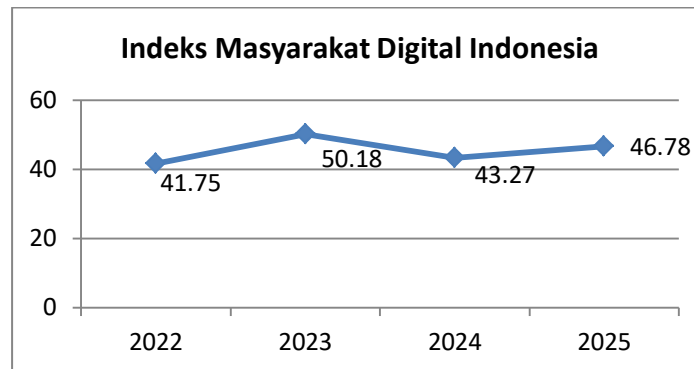
2. Fasilitasi penyelesaian hambatan perizinan berusaha, dalam rangka penyelesaian hambatan perizinan berusaha Dinas PMPTSP Kabupaten Tanah Datar memberikan fasilitasi yaitu dengan melaksanakan rapat dengan stakeholder terkait serta para pelaku usaha.
3. Pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berupa pelaksanaan inspeksi lapangan. Kegiatan ini merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKSS 3.7 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks masyarakat digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan. Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi infrastruktur dan ekosistem serta keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi.

Pada tahun 2025 target untuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia sebesar 56,14, realisasi pada tahun 2025 yaitu 46,78 dengan capaian sebesar 83,32%. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu literasi kepada murid SMP dan peningkatan kualitas/coverage sinyal seluler melalui surat ke provider telekomunikasi. Berikut grafik perkembangan IMDI Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 2.22
Perkembangan IMDI Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2025



TUJUAN STRATEGIS 4

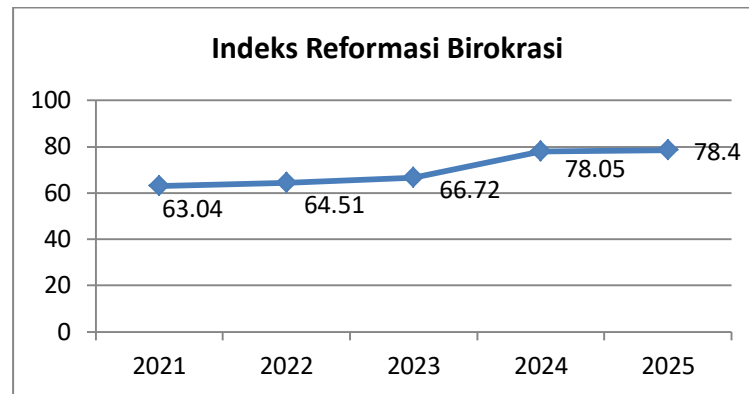
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG KOLABORATIF, KAPABEL DAN BERINTEGRITAS

IKSS 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola birokrasi, termasuk aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Pada tahun 2025 target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Datar sebesar 81 diperoleh realisasi sebesar 78,40 dengan capaian sebesar 96,79. Angka ini menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2024 yaitu sebesar 78,05.

Grafik 3.23
Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan dalam tata kelola birokrasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Peningkatan indeks tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dari instansi pemerintah.

IKSS 4.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan proses pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Penilaian ini menjadi dasar pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA)

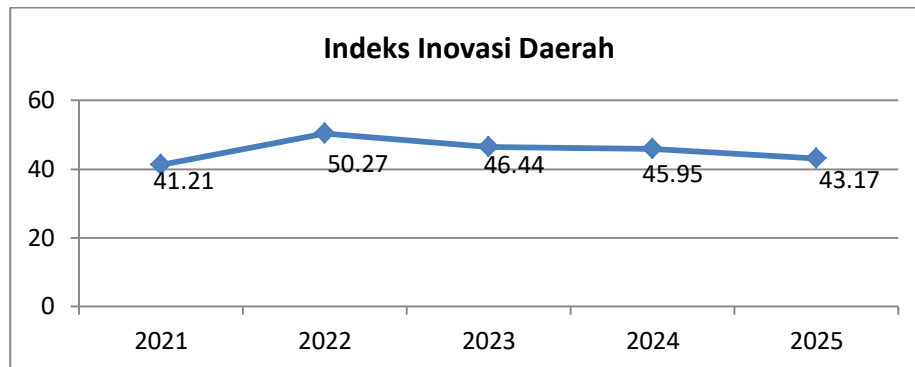


kepada daerah yang dinilai berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi secara efektif. Melalui penilaian ini, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan berbagai terobosan baru yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penilaian IID Kab. Tanah Datar mencakup dua aspek utama, yaitu aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID). Aspek SPD menilai dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan inovasi, seperti adanya regulasi, kelembagaan inovasi, dukungan anggaran, komitmen pimpinan daerah, serta ketersediaan sumber daya manusia. Sementara itu, aspek SID menilai kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dengan indikator seperti tingkat kebaruan inovasi, manfaat bagi masyarakat, efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemudahan replikasi oleh daerah lain, serta keberlanjutan inovasi.

Dari aspek penilaian tersebut Kab. Tanah Datar mendapat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 43,17 dengan target tahun 2025 sebesar 49,23 dengan capaian kinerja sebesar 87,69%. Proses penilaian Indeks Inovasi Daerah Kab. Tanah Datar dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan inovasi oleh pemerintah daerah melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data oleh tim penilai. Pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian lebih mendalam terhadap inovasi yang diajukan, termasuk kemungkinan presentasi dan klarifikasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, daerah kemudian diklasifikasikan dalam kategori seperti sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, atau tidak dapat dinilai, yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemberian penghargaan IGA. Berikut perkembangan Indeks Inovasi daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2025. Berikut perkembangan Indeks Inovasi daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2025.

Grafik 2.24
Perkembangan Indeks Inovasi daerah tahun 2022-2025



TUJUAN STRATEGIS 5

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, TANGGUH BENCANA, DAN RAMAH

IKSS 5.1 IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)

Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu :

1. Ketersediaan Fisik (ketersediaan)
2. Kualitas Fisik (kualitas)
3. Kesesuaian (Kesesuaian)
4. Efektifitas Pemanfaatan (Utilitas)
5. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)
6. Kontribusi pada Perekonomian

Table 2.26

Nilai interval kepuasan berada dengan nilai dan indeks sebagai berikut:

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi	Kategori
1-1.75	25.00-43.75	Tidak Puas
1.76-2.5	43.76-62.50	Kurang Puas
2.51-3.25	62.51-81.25	Puas
3.26-4.00	81.26-100.00	Sangat Puas

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebesar 66,31 merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur di daerah. Nilai tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden di 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi riil di lapangan secara menyeluruh.

Aspek yang menjadi objek penilaian dalam penghitungan IKLI meliputi sektor jalan, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta penerangan jalan umum (PJU). Masing-masing aspek dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu ketersediaan, kualitas, kesesuaian dengan kebutuhan dan penggunaan, tingkat pemanfaatan, serta kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, IKLI tidak hanya menggambarkan keberadaan infrastruktur secara fisik, tetapi juga mengukur sejauh mana infrastruktur tersebut berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil pengukuran ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur secara berkelanjutan.

IKSS 5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tanah Datar tahun 2025 berhasil mencapai 113,29 % yang masuk dalam kategori "sangat memuaskan". Target IKLH yang ditetapkan sebesar 69,21

dapat terlampaui dengan hasil nyata sebesar 78,41. IKLH ini merupakan indikator utama untuk menilai kualitas lingkungan di suatu daerah. Tanah Datar dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari pegunungan, hutan, dan memiliki potensi sumber daya air yang besar yang membuatnya sangat potensial untuk sektor industri dan pariwisata sehingga membawa tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Namun, Tanah Datar berhasil menjaga kualitas lingkungan hidupnya dengan sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan wilayah sekitarnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari sub indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh dari penjumlahan komponen Indeks (IKA, IKU dan IKL) dikalikan dengan masing-masing bobot. Rumus Perhitungan IKLH sebagai berikut :

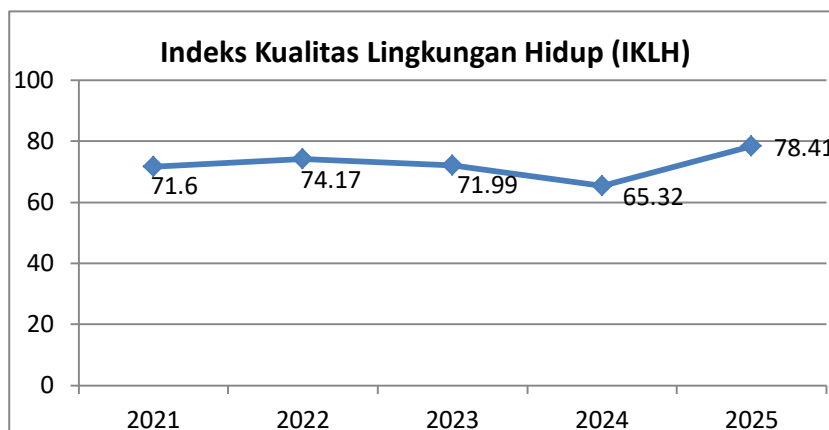
$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Target dan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kualitas Air (IKA)	40,71	76,76	188,55 %	Sangat Memuaskan
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,82	83,95	91,43 %	Sangat Baik
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	58,59	70,99	121,16 %	Sangat Memuaskan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,21	78,41	113,29 %	Sangat Memuaskan

Grafik 2.25
Perkembangan Capaian Indikator IKLH Tahun 2021-2025



Tabel 2.28
Target dan Realisasi IKLH Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,61	71,60	68,01	74,17	68,41	71,99	61,46	65,32	69,21	78,41
Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	53,33	55,89	57,36	55,99	60,87	32,86	40,71	40,71	76,76
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,57	90,39	85,67	91,06	85,78	89,74	85,88	91,82	91,82	83,95
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54,69	68,27	56,15	71,72	57,61	58,26	58,26	58,59	58,59	70,99

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai IKLH yang merupakan komposit dari nilai IKA, IKU dan IKL cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKLH seperti perubahan iklim, polusi, *deforestasi* (penggundulan hutan), pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan, bencana alam, serta aktivitas manusia lainnya yang mempengaruhi lingkungan.

Kegiatan indeks kualitas lingkungan hidup terdiri atas:

1. Uji kualitas air

Kegiatan uji kualitas air dilakukan pada Sungai Batang Selo dengan 3 (tiga) titik pantau (hulu, tengah, hilir) dan dilaksanakan pada musim hujan dan musim kemarau.

Kegiatan pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air



2. Uji kualitas udara

Kegiatan uji kualitas udara dilakukan pada 4 lokasi titik pantau dengan menggunakan *Metode Passive Sampler* dan dilaksanakan pada musim hujan dan musim kemarau yaitu:

1. Perkantoran di depan Kantor Bupati Tanah Datar
2. Industri di depan Industri Kopi Rangkang Kaum Malana Ponco
3. Pemukiman di Perumahan Dobok Indah
4. Transportasi di Jalan Soekarno Hatta

Kegiatan pengambilan sampel udara dengan metode passive sampler



Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan iklim secara global mengganggu pola cuaca dan menyebabkan badai, kekeringan

dan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi kualitas udara sehingga perlu adanya peran berbagai pihak dan melibatkan multi sektor bukan hanya pada aspek pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup saja tetapi juga diperlukan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

3. Uji kualitas lahan

Kegiatan uji kualitas lahan dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan pemantauan lahan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis tutupan lahan yang berbeda di suatu wilayah.

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tutupan vegetasi terutama luas tutupan hutan dan lahan yang menunjukkan adanya upaya pengelolaan, rehabilitasi serta pengendalian ekosistem di Kabupaten Tanah Datar serta adanya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan kualitas lahan.

Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Faktor pendukung yang dilakukan dalam peningkatan nilai IKLH adalah :

1. Pelaksanaan program unggulan satu nagari satu bank sampah yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2025 sudah dibentuk kelompok bank sampah sebanyak 43 unit bank sampah yang berada di 40 nagari, bank sampah yang aktif terdapat 12 unit.
2. Melakukan penertiban pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar pada masing-masing Nagari.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Penegakan hukum terhadap usaha/kegiatan yang tidak taat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Melaksanakan kebijakan program *Car Free Day* yang rutin diadakan

setiap minggu untuk mengurangi emisi kendaraan dan menciptakan udara yang lebih bersih.

5. Pemasangan alat ONLIMO (online monitoring) merupakan sistem untuk memonitoring kualitas air yang beroperasi secara kontinu, otomatis, online (daring) serta terhubung langsung dengan server KLHK. Lokasi alat ONLIMO ada di 2 tempat yaitu di sungai batang selo dan sungai batang sumpur.
6. Pembentukan kelompok peduli lingkungan seperti kelompok proklam (program kampung iklim) dan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Penghargaan ProKlim Tahun 2025 untuk Kategori Nominasi ProKlim Lestari dan Nominasi ProKlim Utama.
7. Dalam rangka penanganan sampah melalui kegiatan persuasif melalui media elektronik.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara sinergis, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Faktor Penghambat dan Solusi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah :

1. Laboratorium yang belum terakreditasi dan teregistrasi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Rekomendasi dalam rangka peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Pembentukan regulasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Melakukan reboisasi pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang terdampak bencana pada tahun 2024 dan 2025.
3. Dalam rangka perluasan cakupan pelayanan persampahan perlu adanya tambahan dukungan sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran.
4. Optimalisasi pengelolaan TPA melalui kerjasama.

IKSS 5.3 Indeks Resiko Bencana (IRB)

Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan kemajuan dalam pengurangan risiko bencana dengan capaian kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tanah Datar tahun 2025 mencapai 219,49%. Target IRB yang ditetapkan sebesar 123,92% dapat dengan capaian sebesar 56,26%. Tidak tercapainya target IRB Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Basis Data Nasional, BNPB melakukan pembaruan data spasial dan histori kejadian bencana yang mempengaruhi skor risiko wilayah secara nasional. IRB merupakan hasil pemodelan makro yang mencakup komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas.
2. Peningkatan Intensitas Kejadian Bencana, Sepanjang Tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan kejadian banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang berdampak langsung pada peningkatan parameter bahaya dalam model penghitungan IRB nasional.
3. Karakteristik Geografis Wilayah, Kabupaten Tanah Datar memiliki topografi perbukitan, daerah aliran sungai, serta kawasan rawan longsor yang secara struktural memiliki tingkat eksposur tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
4. Kapasitas pengurangan risiko yang belum merata, Walaupun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas, intervensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan bahaya pada tahun berjalan.

Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi strategi penurunan indeks risiko bencana dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana yang mencakup tujuh prioritas utama dalam penguatan kapasitas daerah terhadap bencana, yaitu:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Salah satu langkah

utama adalah penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana (PB) serta telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab atas perencanaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga telah dibentuk untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, kebijakan daerah seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Perda Tata Ruang berbasis PRB telah diterapkan guna memastikan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Sebagai Langkah mitigasi, Kabupaten Tanah Datar telah menyusun peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas untuk seluruh ancaman bencana di wilayahnya. Peta-peta ini digunakan dalam perencanaan mitigasi, tanggap darurat, serta rekonstruksi pasca-bencana. Rencana Penanggulangan Bencana yang berbasis pada hasil kajian ini memastikan kesiapsiagaan yang lebih efektif dalam menghadapi potensi bencana.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik

Pemerintah daerah terus mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses masyarakat. Sosialisasi pencegahan bencana serta pelatihan bagi tenaga tanggap darurat juga dilakukan secara berkala. Penyediaan logistik menjadi fokus utama melalui sistem *supply chain* yang siap digunakan dalam situasi darurat. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama stakeholder yang ada di Tanah Datar untuk meningkatkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Penataan ruang berbasis PRB telah diterapkan untuk meminimalisir dampak bencana, termasuk informasi tata ruang yang dapat diakses publik. Program Desa Tangguh Bencana dan sosialisasi di Nagari juga

terus dikembangkan untuk memastikan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan bencana ke 27 Nagari, dan pelatihan peningkatan kapasitas satgas nagari se Kabupaten Tanah Datar.
- b. Pemasangan EWS (*early warning system*) banjir dan longsor di 6 titik kawasan aliran sungai yang berhulu di Gunung Api Marapi.
- c. Melakukan pemantauan pada sungai-sungai yang berhulu di Gunung Api Marapi, Sago dan Singgalang yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir bandang dan longsor.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Jalur dan tempat evakuasi sementara telah ditetapkan, bersama dengan sistem komando operasi darurat yang memastikan koordinasi cepat dan tepat saat terjadi bencana. Tim Kaji Cepat dan Tim Penyelamatan telah dilatih dan siap diterjunkan ke lokasi bencana dalam waktu singkat. Upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan merespons seluruh laporan kejadian bencana yang masuk baik dari masyarakat atau dari pihak lain dan melakukan penanganan kejadian bencana dengan semaksimal mungkin dengan melibatkan OPD dan instansi terkait serta satgas nagari bencana.

Dalam hal bencana yang berskala besar maka perlu ditetapkan status bencana menjadi tanggap darurat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Penetapan Status Tanggap Darurat melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 100.3.3.2/427/BPBD-2025 tanggal 27 November 2025 yang menjadi dasar mobilisasi sumber daya, personil dan anggaran darurat. Pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan 1 kali status tanggap darurat untuk banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tanah Datar selama 14 hari.



Berikut data jenis bencana yang terjadi dan data korban bencana pada tahun 2025:

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	KUANTITAS
1	Angin Kencang	41
2	Pohon Tumbang	68
3	Longsor	8
4	Banjir	7
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	184
6	Pergerakan Tanah	1
7	Bahu Jalan Terban	1
Jumlah		310

NO	KORBAN JIWA	KUANTITAS
1	Meninggal Dunia	3
2	Hilang	0
3	Luka-Luka	5
4	Pengungsi	7814
Jumlah		7822

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan infrastruktur penting menjadi prioritas utama. Penyediaan hunian sementara bagi penduduk yang rumahnya hanyut, rusak berat, rusak sedang dan masuk dalam zona merah serta pemulihan penghidupan masyarakat dilakukan melalui berbagai program bantuan dan dukungan ekonomi, upaya ini semakin diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Meskipun Kapasitas Kabupaten Tanah Datar dalam penanggulangan bencana terus meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana di Kabupaten Tanah Datar terutama pada beberapa tantangan yang ada yakni:

1. Perlunya pengkajian ulang terhadap penetapan kajian resiko

- bencana yang terdiri dari rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi bencana.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem peringatan dini ancaman bencana.
 3. Belum memadainya ketersediaan jalur dan tempat evakuasi sementara.
 4. belum efektifnya pengerahan Tim Kaji Cepat dan Tim Penyelamatan Korban.
 5. Tantangan dalam pengorganisasian bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah terpencil.
 6. Belum maksimalnya tahapan penetapan status darurat bencana.

Strategi kinerja kedepan akan diterapkan sebagai bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan terutama diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan meningkatkan kerja sama multi-sektor sehingga risiko bencana dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan.

TUJUAN STRATEGIS 6

TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH

IKSS 6.1 Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas

Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum) dan perlindungan masyarakat (linmas). Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas.

Pada tahun 2025 target indikator indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sebesar 50,01 dan untuk realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 50,98 maka diperoleh capaian sebesar 101,93%. Tahun 2025 terdapat kasis trantibum sebanyak 10 laporan kasus trantibum sedangkan linmas yang sudah dikukuhkan sebanyak 2.997.

Faktor pendorong tercapainya kinerja yaitu Target kinerja

disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan orang yang ada, memiliki sarana prasarana pendukung kegiatan dan telah memiliki orang PPNS sedangkan untuk faktor penghambat tercapainya kinerja yaitu penegakan perda baru secara non yustisi, Kegiatan patroli rutin baru sekitar Kecamatan Lima Kaum, Personil masih kurang tidak sesuai dengan luas wilayah, Personil Satpol PP sebanyak 34 orang belum mengikuti pelatihan dasar Satpol PP, sarana dan prasarana belum lengkap.

TUJUAN STRATEGIS 7

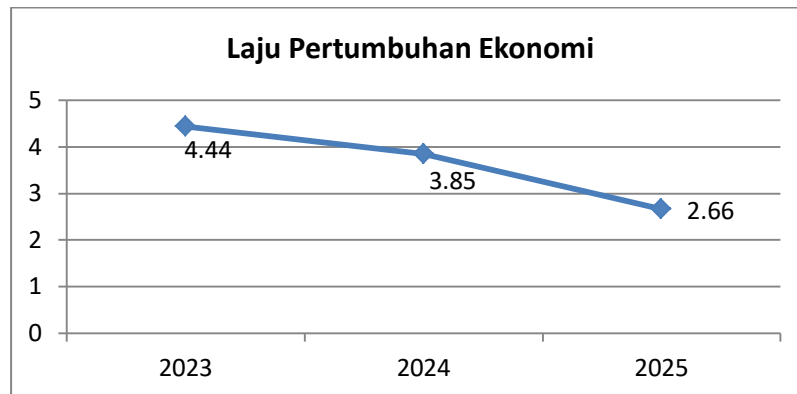
TERWUJUDNYA STABILITAS MAKRO EKONOMI DAERAH

IKSS 7.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara atau daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP Riil / PDRB Riil di Negara atau daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut.

Pada tahun 2025 target indikator laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 3,98 dan untuk realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,66, maka diperoleh capaian sebesar 66,83%. Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025 Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomii Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025:

Grafik 2.26
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomii Tahun 2023-2025



Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Di Kabupaten Tanah Datar, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi. Data PDRB yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sebesar 2,66% sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,36%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, seperti ketergantungan terhadap sektor primer, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan investasi di sektor industri pengolahan. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapangan usaha berdasarkan PDRB Harga konstan mengalami penurunan yang signifikan pada sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor lain yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda

motor), informasi dan komunikasi.

Struktur ekonomi Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis daerah. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, industri pengolahan, serta jasa pemerintahan turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Sebagai daerah dengan karakteristik agraris, stabilitas produksi pertanian sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan, dukungan infrastruktur pertanian, serta penguatan peran UMKM menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

IKSS 7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

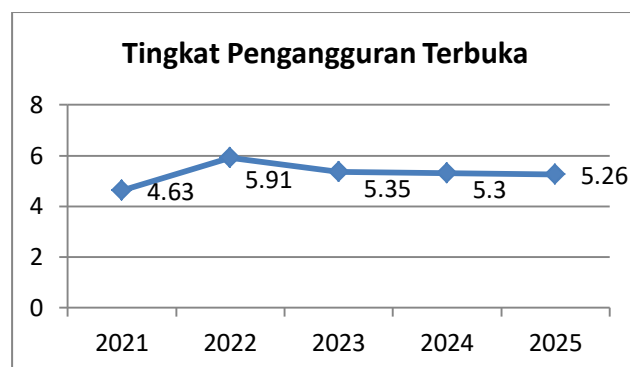
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok (4) penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan terapan di lapangan kerja antara

kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar nilainya berfluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,79%, turun menjadi 4,63% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 menjadi 5,91%, akan tetapi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan menjadi 5,35% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 5,30%. Pada tahun 2025 target indikator tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,01 realisasi sebesar 5,26 dengan capaian sebesar 95%. Berikut grafik perkembangan lima tahun terakhir untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Datar.

Grafik 3.27
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021-2025



IKSS 7.3 Rasio PAD terhadap total pendapatan

Rasio PAD terhadap total pendapatan/ Derajat Otonomi Fiskal merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025 ini tingkat capaian target indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah hanya 96.86% dan dibandingkan pada Tahun 2024 yang capaiannya mencapai 103.07%, terjadi sedikit penurunan, namun jika dilihat dari angka Penerimaan Asli Daerah dan Target Penerimaan Asli Daerah, terjadi peningkatan Penerimaan Asli Daerah dari 163.268.531.407 menjadi 182.074.491.249. walaupun tingkat capaian pada tahun 2025 tidak

mencapai 100% namun masih dalam kriteria Sangat Baik.

Sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah Pusat yang ingin mendorong Pemerintah Daerah agar dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu tergantung kepada Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Penggalian dan pendataan potensi PAD;
2. Mengintensifkan kegiatan pemungutan PAD;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pemungutan PAD;
4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pertumbuhan PAD;
5. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah;
6. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pengurusan perpajakan melalui pelayanan yang dilaksanakan baik di kantor maupun di Mal Pelayanan Publik;

b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat

Minimnya kesadaran pajak: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya edukasi mengenai kewajiban ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Sikap enggan membayar pajak dengan adanya persepsi bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak langsung pada kesejahteraan atau pembangunan daerah juga menjadi penghalang dalam peningkatan

PAD.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Asli Daerah, ditambah lagi dengan jumlah personil serta belum adanya personil yang memiliki kemampuan ilmu dalam menghitung dan memeriksa pajak

3. Bencana Alam

Terjadinya bencana alam pada tanggal 27 November 2025 berdampak sangat besar pada beberapa objek pajak PBB, objek pajak Restoran, objek pajak reklame terbawa arus bencana serta menyebabkan banyaknya lahan dan bangunan yang rusak dan tidak berfungsi lagi.

c) Faktor Antisipatif

Pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya sebagai berikut:

1. Mendorong kesadaran pajak dan retribusi melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi;
2. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
3. Pemutakhiran data objek pajak.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta cara kerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Objek pajak yang terkena bencana banjir bandang akan diberikan keringanan pajak berupa pengurangan besaran pajaknya atau penghapusan/ penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan ulang bagi wajib pajak dan objek pajak yang terkena bencana banjir bandang.

IKSS 7.4 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

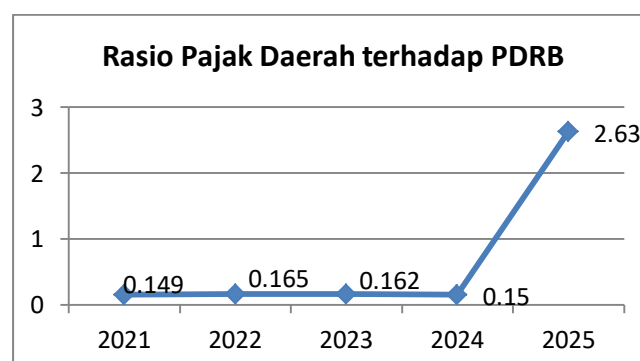
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib terhadap Daerah yang terutang oleh orang perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah/negara yang timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah.

Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. berikut perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB:

Grafik 2.28
perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB



Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanah Datar tahun 2025 tercatat sebesar 2,63 persen. Angka ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total aktivitas perekonomian di



daerah tersebut. Rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.

Pada tahun 2025, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh mulai diterimanya penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan opsen memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten/kota dari jenis pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan adanya penerapan opsen PKB dan BBNKB, pemerintah daerah memperoleh tambahan kontribusi penerimaan pajak yang secara langsung meningkatkan total pendapatan pajak daerah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya rasio pajak daerah terhadap PDRB, yang mencerminkan semakin besarnya peran penerimaan pajak daerah terhadap aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Peningkatan rasio ini juga menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

IKSS 7.5 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperkuat sektor keuangan berbasis syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan jumlah lembaga jasa keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan yang halal dan adil. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.



Selain itu, peningkatan jumlah lembaga jasa keuangan syariah di RPJMD juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika Islam. Indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan akan dimulai dilakukan perhitungan pada tahun 2025. Pada tahun 2025 target jumlah lembaga jasa keuangan syari'ah sebanyak 19 unit realisasi sebanyak 39 unit dengan capaian sebesar 205,26%. Capaian kinerja ini diperoleh dengan adanya program strategis nasional tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 39 unit lembaga jasa keuangan syari'ah tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 2. 29
Lembaga Jasa Keuangan Syariah

NO	NAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH	KET
I	KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH	
1	KDMP SYARIAH NAGARI TAMBANGAN TANAH DATAR	
2	KDMP SYARIAH NAGARI LABUH KABUPATEN TANAH DATAR	
3	KDMP SYARIAH NAGARI TIGO JANGKO TANAH DATAR	
4	KDMP SYARIAH NAGARI TANJUNG KABUPATEN TANAH DATAR	
5	KDMP SYARIAH NAGARI KOTO TUO TANAH DATAR	
6	KDMP SYARIAH NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR	
7	KDMP SYARIAH NAGARI CUBADAK KABUPATEN TANAH DATAR	
8	KDMP SYARIAH NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR	
9	KDMP SYARIAH NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK TANAH DATAR	
10	KDMP SYARIAH NAGARI SUNGAYANG	
11	KDMP SYARIAH NAGARI MINANGKABAU TANAH DATAR	
12	KDMP SYARIAH NAGARI PADANG LAWEH TANAH DATAR	
13	KDMP SYARIAH NAGARI TALANG TANGAH	
14	KDMP SYARIAH NAGARI SUNGAI PATAI TANAH DATAR	
15	KDMP SYARIAH NAGARI RAMBATAN TANAH DATAR	
16	KDMP SYARIAH NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN	
17	KDMP SYARIAH NAGARI III KOTO TANAH DATAR	
18	KDMP SYARIAH NAGARI SIMAWANG	
19	KDMP SYARIAH NAGARI SUNGAI JAMBU TANAH DATAR	
20	KDMP SYARIAH NAGARI TANJUANG BARULAK KECAMATAN BATIPUH	



NO	NAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH	KET
21	KDMP SYARIAH NAGARI GUNUANG RAJO TANAH DATAR	
22	KDMP SYARIAH NAGARI BATIPUAH ATEH	
23	KDMP SYARIAH NAGARI TAPI SELO	
24	KDMP SYARIAH NAGARI SUPAYANG KABUPATEN TANAH DATAR	
25	KDMP SYARIAH NAGARI SUMPUR	
26	KDMP SYARIAH NAGARI GUGUAK MALALO	
27	KDMP SYARIAH NAGARI SIMPURUIK TANAH DATAR	
28	KDMP SYARIAH NAGARI PASIE LAWEH KABUPATEN TANAH DATAR	
29	KDMP SYARIAH NAGARI RAO RAO TANAH DATAR	
30	KDMP SYARIAH NAGARI SUNGAI TARAB TANAH DATAR	
31	KDMP SYARIAH NAGARI GURUN TANAH DATAR	
32	KDMP SYARIAH NAGARI KUMANGO TANAH DATAR	
33	KDMP SYARIAH NAGARI LAWANG MANDAHILING SALIMPAUNG	
34	KDMP SYARIAH NAGARI SUMANIK TANAH DATAR	
35	KDMP SYARIAH NAGARI SALIMPAUNG TANAH DATAR	
II	KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH	
1	KPN Syariah Al Ikhlas IAIN Bts	
2	KPN Syariah RSUD Batusangkar	
3	KPN Dinas Kesehatan	
4	KPN Harapan SMPN 1 Batipuh	
5	UJKS Berkah Illahi Salimpaung	
6	KPN Al Hikmah P.Agama	
7	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten T.Datar	
8	Koperasi Pegawai Negeri Ikhlas SMAN 1 Rambal	
9	KPN SMAN 1 Sungai Tarab	
10	KPN SMA N 1 Salimpaung	
11	Koperasi Konseumen Syariah Masjid Raya Lubuak Jantan	
12	KPN Tuah Sepakat	
III	UNIT SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH	
1	KJKS BMT Darussalam	
2	KJKS BMT EL AMIN	
3	KJKS BMT AL HIKMAH	
4	KJKS BMT Al Barokah Sei Tarab.	
5	KSPPS BMT Al Makmur	
6	KJKS BMT Ampek Jurai MR Lantai Batu	
7	KJKS Kube Sejahtera	
8	KSPPS BMT Sakinah Masjid Baburrahman Batu Basa	
IV	BANK PERKREDITAN RAKYAT	
1	Bpr syariah balerong bunta rao2	

NO	NAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH	KET
2	Bpr syariah malibu lintau	
3	Bprs haji miskin	

IKSS 7.6 Persentase Desa Mandiri

Persentase nagari mandiri mengacu pada proporsi nagari atau wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar. Ini mencerminkan kemampuan suatu nagari untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.

Capaian persentase desa mandiri Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah 72% yang terdiri dari desa mandiri dengan jumlah 54 nagari dan desa maju dengan jumlah 21 nagari dengan capaian kinerja sebesar 107,99%. Hal ini menunjukkan bahwa desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kemampuan yang relatif kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang tercermin dari terpenuhinya dimensi Layanan Dasar, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Enam dimensi ini merupakan komponen utama dalam Indeks Desa (Permendes PDT No. 9 Tahun 2024) untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan desa secara komprehensif, mencakup layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola, guna mencapai Desa Mandiri.

- Dimensi Layanan Dasar, Fokus pada ketersediaan dan kualitas pemenuhan kebutuhan pokok warga, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi
- Dimensi Ekonomi, menilai pertumbuhan ekonomi desa, keberadaan BUMDes, pusat perdagangan, dan keterbukaan lapangan kerja bagi warga Bappenas.
- Dimensi Sosial, mengukur modal sosial, kerukunan, ketahanan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan Bappenas.

- Dimensi Lingkungan, mengukur pengelolaan lingkungan, ketahanan bencana, dan upaya pelestarian alam serta mitigasi risiko.
- Dimensi Aksesibilitas, menilai kemudahan jangkauan transportasi, infrastruktur jalan, dan layanan komunikasi/internet.
- Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, fokus pada akuntabilitas, transparansi, efektivitas administrasi, dan kualitas pelayanan aparat desa kepada masyarakat.

Klasifikasi Status Desa :

- Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang sudah sangat baik.
- Desa Maju merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan
- Desa Berkembang: merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.
- Desa Tertinggal: ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.
- Desa Sangat Tertinggal: merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar.

Berikut Strategi yang dilakukan untuk peningkatan status kemandirian desa/nagari adalah:

- a. Peningkatan Kemandirian Desa melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek.
- b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan

- c. Peningkatan sinergi antara nagari, kecamatan, perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal

Tabel 2.30 Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

	Kecamatan	Nagari	Dimensi layanan dasar	Dimensi sosial	Dimensi ekonomi	dimensi lingkungan	Dimensi aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemerintah	SKOR	Status Desa
1	X KOTO	Tambangan	147	80	112	70	48	50	0,7984	Mandiri
2		Singgalang	126	83	124	79	41	73	0,8283	Mandiri
3		Koto Baru	149	74	136	74	48	68	0,8646	Mandiri
4		Pandai Sikek	125	74	147	78	48	74	0,8598	Mandiri
5		Paninjauan	157	74	112	68	48	70	0,8331	Mandiri
6		Aia Angek	134	75	130	78	45	73	0,8425	Mandiri
7		Panyalaian	155	72	136	58	45	78	0,8567	Mandiri
8		Jaho	128	79	106	82	49	66	0,8031	Mandiri
9		Koto Laweh	126	78	129	82	49	70	0,8409	Mandiri
10	BATIPUH	Andaleh	132	75	125	82	49	57	0,8189	Mandiri
11		Tanjung Barulak	157	65	133	50	47	72	0,8252	Mandiri
12		Pitalah	144	78	143	71	46	62	0,8567	Mandiri
13		Batipuh Baruah	158	59	124	74	49	66	0,8346	Mandiri
14		Batipuh Ateh	125	55	105	60	46	70	0,7260	Maju
15		Gunung Rajo	119	76	84	64	48	63	0,7150	Maju
16		Bungo Tanjung	142	74	141	71	47	71	0,8598	Mandiri
17		Sabu	112	81	109	66	49	65	0,7591	Maju
18	BATIPUH SELATAN	Guguak Malalo	147	57	140	72	47	63	0,8283	Mandiri
19		Batu Taba	131	78	109	82	49	59	0,8000	Mandiri
20		Padang Laweh Malalo	155	74	102	67	48	64	0,8031	Mandiri
21		Sumpur	117	61	130	82	49	68	0,7984	Mandiri
22	PARIANGAN	Pariangan	148	78	119	60	48	69	0,8220	Mandiri
23		Batu Basa	134	74	125	60	47	54	0,7780	Maju
24		Sawah Tengah	112	65	106	64	37	66	0,7087	Maju
25		Sungai Jambu	117	72	96	62	49	66	0,7276	Maju
26		Tabek	138	75	104	66	47	59	0,7701	Maju
27		Simabur	148	75	125	70	48	60	0,8283	Mandiri
28	RAMBATAN	Balimbing	147	85	140	72	47	74	0,8898	Mandiri
29		Simawang	150	83	120	74	47	67	0,8520	Mandiri



30		Padang Magek	155	83	150	84	48	58	0,9102	Mandiri
31		III Koto	130	84	144	86	49	74	0,8929	Mandiri
32		Rambatan	156	75	141	86	48	64	0,8976	Mandiri
33	LIMA KAUM	Labuh	139	72	114	68	46	66	0,7953	Maju
34		Parambahan	137	55	96	64	46	56	0,7150	Maju
35		Baringin	153	83	154	86	49	65	0,9291	Mandiri
36		Cubadak	148	76	123	74	46	73	0,8504	Mandiri
37		Limo Kaum	140	72	130	72	49	59	0,8220	Mandiri
38	TANJUNG EMAS	Saruaso	151	78	148	70	49	76	0,9008	Mandiri
39		Koto Tengah	152	56	136	64	47	64	0,8173	Mandiri
40		Pagaruyung	154	75	141	68	49	65	0,8693	Mandiri
41		Tanjung Barulak	143	66	117	58	46	65	0,7795	Maju
42	PADANG GANTING	Padang Ganting	117	69	146	55	44	71	0,7906	Maju
43		Atar	109	60	114	68	47	65	0,7291	Maju
44	LINTAU BUO	Pangian	120	74	143	57	45	70	0,8016	Mandiri
45		Taluk	147	73	126	52	48	65	0,8047	Mandiri
46		Buo	139	60	134	61	48	73	0,8110	Mandiri
47		Tigo Jangko	151	48	139	63	49	58	0,8000	Mandiri
48	LINTAU BUO UTARA	Tanjung Bonai	147	61	126	46	44	71	0,7795	Maju
49		Lubuak Jantan	144	55	142	64	48	62	0,8110	Mandiri
50		Batu Bulek	130	75	130	49	47	60	0,7732	Maju
51		Balai Tengah	125	74	150	54	43	67	0,8079	Mandiri
52		Tapi Selo	133	51	135	60	48	51	0,7528	Maju
53	SUNGAYAN G	Andaleh Baruh Bukik	134	80	141	74	49	75	0,8709	Mandiri
54		Sungayang	130	84	159	70	49	80	0,9008	Mandiri
55		Sungai Patai	127	73	117	68	48	68	0,7890	Maju
56		Tanjung	150	80	139	74	49	61	0,8709	Mandiri
57		Minangkabau	138	81	132	64	44	73	0,8378	Mandiri
58	SUNGAI TARAB	Simpuruik	153	77	148	74	49	75	0,9071	Mandiri
59		Kumango	136	75	130	70	49	74	0,8409	Mandiri
60		Gurun	144	75	122	66	43	70	0,8189	Mandiri
61		Koto Baru	137	53	131	70	47	76	0,8094	Mandiri
62		Koto Tuo	95	66	119	64	48	55	0,7039	Maju
63		Padang Laweh	109	64	133	79	47	75	0,7984	Mandiri
64		Pasia Laweh	122	70	106	86	49	77	0,8031	Mandiri
65		Talang Tengah	130	74	111	80	45	67	0,7984	Mandiri
66		Sungai Tarab	142	81	152	78	49	76	0,9102	Mandiri

67		Rao-rao	131	53	148	80	49	61	0,8220	Mandiri
68	SALIMPAUNG	Tabek Patah	135	58	128	66	47	80	0,8094	Mandiri
69		Lawang Mandahiling	121	49	102	60	47	71	0,7087	Maju
70		Sumanik	134	71	105	68	47	59	0,7622	Maju
71		Salimpaung	145	70	116	68	40	78	0,8142	Mandiri
72		Situmbuk	132	68	101	48	46	54	0,7071	Maju
73		Supayang	142	60	81	48	49	65	0,7008	Maju
74	TANJUNG BARU	Tanjung Alam	140	72	123	63	47	69	0,8094	Mandiri
75		Barulak	161	61	139	84	45	76	0,8913	Mandiri

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebagai ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2025 adalah sebesar Rp. 1.215.239.677.779,- dengan realisasi anggaran Rp. 997.469.303.140,- atau sebesar 82,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.31 Ralisasi Anggaran dalam APBD

NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
	JUMLAH	1.447.885.018.926,00	1.333.857.237.785	1.110.322.081.395
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	870.562.169.995	842.866.695.416	684.550.633.261
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.917.682.374	70.630.370.369	37.416.870.033
3.	Program Pengembangan Kurikulum	35.000.000	33.890.000	32.448.891
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.266.488.312	135.687.135.402	126.347.415.076
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.375.000	520.375.000	498.740.495
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.664.951.000	1.625.777.250	1.571.986.789
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	16.871.970.000	3.713.600.700	3.333.042.200
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	811.000.000	323.214.400	322.705.816



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
	Penyediaan Air Minum			
9.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.691.640.000	6.221.640.000	6.208.316.466
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.482.000.000	492.164.400	789.998.060
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	9.473.493.200	4.206.830.700	3.931.246.986
12.	Program Penyelenggaraan Jalan	50.646.318.948	8.072.763.900	7.714.556.066
13.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20.000.000	2.746.948	0
14.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.050.000.000	314.473.400	222.700.200
15.	Program Pengembangan Perumahan	111.500.000	63.250.000	49.023.000
16.	Program Kawasan Permukiman	65.000.000	8.500.000	8.034.600
17.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	30.000.000	15.000.000	12.301.700
18.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.021.870.885	1.199.430.243	1.222.281.710
19.	Program Penanggulangan Bencana	2.466.344.352	916.865.559	867.096.979
20.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.759.856.000	1.948.239.000	1.334.063.594
21.	Program Pemberdayaan Sosial	122.000.000	379.500.000	365.643.923
22.	Program Rehabilitasi Sosial	14.942.520.908	13.063.445.107	11.881.912.145
23.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	626.473.500	620.473.500	604.654.620
24.	Program Penanganan Bencana	114.000.000	84.000.000	83.810.000
25.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000	28.000.000	27.333.600
26.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	707.640.500	558.217.750	445.735.783
27.	Program Penempatan Tenaga Kerja	55.376.800	50.874.800	31.649.800
28.	Program Hubungan	8.500.000	4.250.000	4.142.000



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
	Industrial			
29.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	469.000.000	390.589.000	290.920.467
30.	Program Perlindungan Perempuan	81.047.200	78.547.200	49.642.500
31.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.600.000	7.600.000	7.488.300
32.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	55.000.000	47.720.000	47.489.645
33.	Program Perlindungan Khusus Anak	483.012.800	468.162.800	379.799.171
34.	Program sifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	70.415.439	406.292.539	406.172.700
35.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000	27.500.000	27.334.650
36.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	50.000.000	10.000.000	9.966.100
37.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	323.070.000	235.470.000	229.664.030
38.	Program Penatagunaan Tanah	100.000.000	62.100.000	24.169.250
39.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45.000.000	42.700.000	40.627.600
40.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	555.000.000	578.710.000	557.861.440
41.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000	7.483.500	7.241.650
42.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.000.000	34.700.000	33.706.050
43.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk	70.000.000	39.950.000	38.266.700



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
	Masyarakat			
44.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000	5.500.000	5.459.700
45.	Program Pengelolaan Persampahan	3.557.746.733	4.457.947.523	3.745.710.789
46.	Program Pendaftaran Penduduk	444.887.954	486.598.352	481.252.430
47.	Program Pencatatan Sipil	136.942.000	136.942.000	136.022.720
48.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000	12.200.000	12.166.250
49.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	892.000	892.000	892.000
50.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.500.000	1.500.000	1.390.000
51.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.047.072.500	1.825.786.250	1.681.925.816
52.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	859.024.950	941.100.625	891.872.498
53.	Program Pengendalian Penduduk	37.929.980	31.542.580	17.941.890
54.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.279.903.692	5.277.903.692	4.606.746.897
55.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.227.068.570	2.151.999.195	1.850.465.555
56.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.574.507.517	13.117.784.296	12.417.734.308
57.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	743.504.619	1.459.219.711	1.110.779.158
58.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	760.000.000	753.144.600	741.874.292
59.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.480.221	28.722.311	28.539.150
60.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	250.000.000	0	0
61.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	6.000.000	3.000.000	2.957.900
62.	Program Pengembangan UMKM	538.928.800	535.928.800	103.595.717



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
63.	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000	181.700.000	171.275.000
64.	Program Pelayanan Penanaman Modal	568.500.000	535.760.000	531.702.050
65.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	71.184.484	52.889.484	51.336.450
66.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10.000.000	5.330.000	5.072.000
67.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	50.000.000	43.000.000	29.446.500
68.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.318.171.200	1.853.241.600	1.711.367.060
69.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	450.000.000
70.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	82.000.000	55.928.816	54.229.400
71.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	8.000.000	5.050.000	4.245.000
72.	Program Pengembangan Kebudayaan	650.000.000	920.000.000	625.403.125
73.	Program Pembinaan Sejarah	75.000.000	65.700.000	39.282.650
74.	Program Pembinaan Perpustakaan	150.505.900	154.265.900	147.787.775
75.	Program Pengelolaan Arsip	58.540.000	47.252.400	43.585.750
76.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	16.125.000	400.000	399.900
77.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	19.925.000	3.224.800	2.958.700
78.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	384.743.550	372.925.900	357.054.050
79.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	17.150.000	16.953.450
80.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.746.601.400	2.329.212.990	1.766.448.645
81.	Program Pemasaran Pariwisata	920.000.000	498.000.000	156.341.850
82.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	180.000.000	136.550.000	131.011.000
83.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.289.212.060	3.914.096.192	3.851.688.746



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
84.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.658.727.760	376.126.360	284.243.290
85.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	407.144.520	246.904.520	245.486.450
86.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	184.099.223	97.771.323	96.733.285
87.	Program Penyuluhan Pertanian	669.962.527	766.054.142	685.301.555
88.	Program Pengelolaan Energi industri Terbarukan	8.000.000	4.000.000	3.928.000
89.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	361.000.000	310.020.100	305.253.600
90.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	48.964.400	50.951.900	49.836.850
91.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	62.028.520	31.014.260	30.899.300
92.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	61.928.800	54.928.800	51.726.800
93.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.542.226.380	1.019.648.990	929.849.933
94.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.863.006.563	6.348.189.530	4.850.278.131
95.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	510.765.886	456.610.698	439.841.042
96.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.523.619.000	13.872.645.449	12.010.614.872
97.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	437.400.000	337.820.180	301.321.290
98.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	344.764.400	217.735.777	196.763.029
99.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	180.881.015.378	160.503.949.524	150.519.044.629
100.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.723.122.950	1.510.313.950	1.463.367.141



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
101.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.354.686	811.891.104	667.331.656
102.	Program Kepegawaian Daerah	1.413.767.800	1.112.904.600	1.042.324.649
103.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	372.000.000	536.050.000	296.941.716
104.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.238.010.660	1.218.560.660	1.214.864.780
105.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	223.470.322	21.700.000	11.430.000
106.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	648.775.050	579.696.800	579.494.850
107.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	72.285.000	28.388.400	26.802.500
108.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.865.600	0	0
109.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	902.887.555	20.378.250	19.385.540
110.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.187.110.182	1.029.812.508	1.016.550.950
111.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	893.043.521	789.503.210	745.123.008
112.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	986.632.400	975.497.400	975.470.450
113.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.200.000	451.100.000	451.100.000
114.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	32.500.000	15.923.000	15.600.250
115.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	788.924.500	632.507.450	631.504.132



NO	PROGRAM	APBD 2025	APBD – P 2025	REALISASI
	Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
116.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	30.000.000	27.559.500
117.	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	-	115.000.000	97.566.000
118.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	25.000.000	24.932.000



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk Tugas Perbantuan.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terbaru sebagaimana yang diatur melalui Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor :1422/MDM.A./PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal : indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pedoman Tata Cara Perhitungan Indek Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan telah dituangkan dalam Rapor Pendidikan setiap tahunnya. Rincian Indikator SPM Bidang Pendidikan:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari 3 (tiga) indikator:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (5-6)
- 2) Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi B
- 3) Proporsi guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

- b. Pendidikan Dasar (7-15)

- Sekolah Dasar (SD), terdiri dari:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (7-12)
- 2) Skor Kemampuan Literasi
- 3) Skor Kemampuan Numerasi
- 4) Iklim Inklusivitas
- 5) Iklim Keamanan
- 6) Iklim Kebinekaan

- Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdiri dari:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (7-12)
- 2) Skor Kemampuan Literasi
- 3) Skor Kemampuan Numerasi

- 4) Iklim Inklusivitas
- 5) Iklim Keamanan
- 6) Iklim Kebinekaan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.4/2851/ST tanggal 28 Mei 2025 tentang Penetapan target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan standar pelayanan minimal di daerah guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan Standar Teknis SPM, dengan memperhatikan:

1. Menghitung dan Menetapkan target capaian SPM, yaitu:
 - a. Target dan jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar;
 - b. Target jumlah warga negara yang menjadi prioritas yaitu warga negara yang miskin atau tidak mampu, tidak dapat mengakses barang dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri; dan
 - c. Target jumlah warga negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan warga negara di wilayahnya sesuai dengan identitas dan tata pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Target capaian SPM 100% ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah tentang target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan.

Uraian target indikator SPM masing-masing jenjang dan jenis pendidikan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 4.1

Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Penerima Layanan Dasar			
	- Jumlah yang harus dilayani (target Prioritas)	Orang	483	2025
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi			
	- Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan	%	49.66	2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
	minimal akreditasi B			
	- Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) Diploma empat (D-IV)	%	78.12	2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

2. Pendidikan Dasar

Tabel 4.2

Target Pencapaian SPM Sekolah Dasar Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Penerima Layanan Dasar			
	- Jumlah yang harus dilayani	Orang	18.894	2025
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi			
	a. Sekolah Dasar (SD)			
	- Kemampuan Literasi	Nilai	65.22	2025
	- Kemampuan Numerasi	Nilai	57.71	2025
	- Iklim Keamanan	Nilai	76.85	2025
	- Iklim Kebhinekaan	Nilai	73.54	2025
	- Iklim Inklusivitas	Nilai	61.79	2025
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	- Kemampuan Literasi	Nilai	77.56	2025
	- Kemampuan Numerasi	Nilai	67.85	2025
	- Iklim Keamanan	Nilai	75.13	2025
	- Iklim Kebhinekaan	Nilai	73.84	2025
	- Iklim Inklusivitas	Nilai	64.22	2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

3. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.3

Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
1.	Penerima Layanan Dasar			
	- Jumlah yang harus dilayani (target prioritas)	Orang	49	2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Tahun Capaian
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi			
	- Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	%	23,5	2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

3. Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Pendidikan tahun 2025 berjumlah Rp. 14.682.956.400,- dan pada Perubahan APBD menjadi Rp. 16.097.260.340,- bertambah sebesar Rp. 1.414.303.940,- adapun alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	Relasisasi	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	16.097.260.340	8.138.128.243	50,56
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.097.260.340	8.138.128.243	50,56
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.569.850.340	4.252.293.353	36,75
1	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	825.000.000	743.398.900	90,11
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar	3.495.813.940	3.363.853.800	96,23
3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	172.552.500	70.253.338	40,71
4	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	13.599.900	13.358.800	98,23
5	Bimbingan teknis, pelatihan. Dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan	188.125.000	59.478.515	31,62
6	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	6.606.831.000	-	-
7	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	267.928.000	1.950.000	0,73
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.344.240.000	1.179.837.850	58,29
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.600.000	3.085.500	67,08
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.239.590.000	1.153.373.000	93,04

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	Relasisasi	%
3	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	84.350.000	14.636.350	17,35
4	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	15.700.000	8.743.000	55,69
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.050.870.000	2.604.419.040	40,74
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	2.714.640.000	2.483.112.620	91,47
2	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	140.610.000	89.483.920	63,64
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD	110.000.000	-	-
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	35.620.000	31.822.500	89,34
5	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD	20.000.000	-	-
6	Penambahan ruang kelas baru	30.000.000	-	-
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	132.300.000	101.578.000	81,93
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	7.300.000	6.403.000	87,71
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	125.000.000	95.175.000	76,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

4. Dukungan Personil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas besar yang jangkauan pelayanannya sampai ke jorong-jorong diseluruh wilayah kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Datar didukung oleh ribuan personil yang tersebar diseluruh jajaran dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Jumlah personil tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL		
		ASN	NON ASN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Dinas Dikbud	61	18	79
2	Pengawas	13	-	13

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL		
		ASN	NON ASN	TOTAL
3	Penilik	12	-	12
4	TK	122	529	651
5	SD	2.036	452	2.488
6	SMP	676	174	850
7	SKB	25	59	84
	J u m l a h	2.945	1.232	4.177

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

5. Hasil Capaian SPM

Realisasi SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025, sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.6

Hasil Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Penerima Layanan Dasar			0	100%
	- Jumlah yang harus dilayani (target Prioritas)	483	483	0	100%
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi			0	100%
	- Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	49.66	49.66	0	100%
	- Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) Diploma empat (D-IV)	78.12	78.12	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

b. Pendidikan Dasar

Tabel 4.7

Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2025

No.	Indikator	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Penerima Layanan Dasar			0	100%
	- Jumlah yang harus dilayani	18.894	18.894	0	100%
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi			0	100%
	a. Sekolah Dasar (SD)				
	- Kemampuan Literasi	65.22	65.22	0	100%
	- Kemampuan Numerasi	57.71	57.71	0	100%
	- Iklim Keamanan	76.85	76.85	0	100%
	- Iklim Kebhinekaan	73.54	73.54	0	100%
	- Iklim Inklusivitas	61.79	61.79	0	100%
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
	Kemampuan Literasi	77.56	77.56	0	100%
	- Kemampuan Numerasi	67.85	67.85	0	100%
	- Iklim Keamanan	75.13	75.13	0	100%
	- Iklim Kebhinekaan	73.84	73.84	0	100%
	- Iklim Inklusivitas	64.22	64.22	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

c. Pendidikan Kesenjangan

Tabel 4.8

Hasil Capaian SPM Pendidikan Kesenjangan Tahun 2025

No.	Indikator	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan (Target)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia (Realisasi)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Jumlah yang harus dilayani	1.313	1.313	0	100%
1.	Penerima Layanan Dasar			0	100%
	- Jumlah yang harus dilayani (target prioritas)	49	49	0	100%
2.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi			0	100%
	- Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesenjangan	23,5	23,5	0	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

6. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal terhadap masyarakat, namun ada beberapa permasalahan antara lain :

Tabel 4.9

Permasalahan Dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi/ Saran
1	2	3
	Pengumpulan Data	
	Rapor pendidikan hanya menampilkan data dalam bentuk persentase dan tidak menampilkan data secara rinci sehingga menyulitkan kita mencari angka rill nya.	Rapor pendidikan juga menampilkan data Rill.
	Belum tersedianya data warga negara tidak mampu atau miskin sesuai usia sekolah di Dinas Sosial pada tahun 2025	Agar data warga negara tidak mampu atau miskin tersedia sesuai usia sekolah di Dinas Sosial

No	Permasalahan	Solusi/ Saran
	Perencanaan dan Penganggaran	
	Penganggaran belum maksimal dalam pemenuhan SPM berdasarkan rapor pendidikan.	Perencanaan dan penganggaran didasarkan pada hasil rapor pendidikan.
	Capaian SPM	
	Rapor Pendidikan 2025 dirilis bulan Maret Tahun berikutnya.	Capaian SPM untuk akhir tahun 2025 sesuai target indikator Pendidikan dari SE Mendikdasmen.
	Realisasi anggaran SPM yang rendah disebabkan: 1. Untuk kegiatan pendampingan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir tahun anggaran, belum ada petunjuk teknis terkait kontribusi daerah terhadap MBG tersebut. 2. Ada beberapa kegiatan pendukung indikator SPM lainnya yang tidak terlaksana karena adanya penyesuaian prioritas anggaran.	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkolosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*)

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
1	2	3	4
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	3810
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	508
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	685800
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	3810
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3810
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3810
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	572
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3810
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3810
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4191
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	254
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	177
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	383
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	73
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	50
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	3810
	(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)		
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	3431
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Formulir partograf	Formulir	3431
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3431
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4191
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	177
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	432
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	73
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	50
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	3427
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3427
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	3427
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	3427
	(sesuai standar 12-59 bulan)		
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3427
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	3427
	(sesuai standar 12-59 bulan)		
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4191
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	432
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	432
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	73
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	23
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50
	14 . Kader Kesehatan	Orang	3202
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	18268
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	18268
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	18268
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18268
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	1731
	(sesuai standar 6-11 bulan)		
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	29392
	(sesuai standar 12-59 bulan)		
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1736
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	579
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	868
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	1157



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	1157
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	1387
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1387
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	51646
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	615
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	23
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	153
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	432
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50
	20 . Guru PAUD	Orang	1
	21 . Kader kesehatan	Orang	3202
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	52422
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Form pencatatan/buku rapor sehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	52422
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	1
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	52422
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	4290
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA,	Formulir	1



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)		
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	614120
	(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)		
	7 . Alat pemeriksaan Hb	Alat	46
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	5970
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	23
	(Media khusus remaja sehat)		
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	6523
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)		
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	46
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	69
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	429
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	4290
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	175068
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur	Paket	46



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)		
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	233
	4 . Alat : Glukometer	Unit	76
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	23
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	175068
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	24
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	46
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	23
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	175068
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	47
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	23
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	23
	c. Vasektomi set	Unit	1
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	9756
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3202
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	43547
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	800
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	43547
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	43547
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	43547
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3202
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	20045
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	23
	2 . Obat Hipertensi	Paket	20045
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	233
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	23
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	23
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	23
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	73
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	3071
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	3071
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	23
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3071
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	23
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	73
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	51
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	786
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	23
	(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)		
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Paket	786
	(pengobatan/medikasi)		
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	304915
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)		
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	23
	(pencatatan dan pelaporan)		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	23
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109
11 .	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	46
	(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)		
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	730
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	5000
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5000
	2 . Reagen Zn TB	Kit	167
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	30000
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5000
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	5000
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5000
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	35
	8 . Tuberkulin	Vial	3000
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	43
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	58
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	24
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	24
	15 . Kader Kesehatan	Orang	3202
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	3810
	PERSentase PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3810
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	3810
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril,	Paket	3810

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai		
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3810
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	31
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	54

3. Anggaran

Alokasi anggaran Pemerintah Kab. Tanah Datar di Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.11

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TANAH DATAR				1,761,791,647	1,028,597,770	58.38 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,761,791,647	1,028,597,770	58.38 %
1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,761,791,647	1,028,597,770	58.38 %
	1.02.02.2.02.0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	<u>189,342,289</u>	<u>124,326,910</u>	65.66 %
	1.02.02.2.02.0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	<u>225,678,000</u>	<u>39,483,400</u>	17.50 %
	1.02.02.2.02.0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	<u>392,785,329</u>	<u>274,133,525</u>	69.79 %
	1.02.02.2.02.0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	<u>104,600,000</u>	<u>42,424,500</u>	40.56 %
	1.02.02.2.02.0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	<u>21,995,000</u>	<u>21,903,775</u>	99.59 %
	1.02.02.2.02.0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada	Orang	<u>187,160,000</u>	<u>125,828,875</u>	67.23 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Usia Produktif				
	1.02.02.2.02.0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	<u>111,348,500</u>	<u>58,854,270</u>	52.86 %
	1.02.02.2.02.0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	<u>60,819,729</u>	<u>36,494,200</u>	60.00 %
	1.02.02.2.02.0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	<u>62,000,000</u>	<u>53,599,730</u>	86.45 %
	1.02.02.2.02.0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	<u>214,222,000</u>	<u>68,108,235</u>	31.79 %
	1.02.02.2.02.0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	<u>140,840,800</u>	<u>132,440,350</u>	94.04 %
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	<u>51,000,000</u>	<u>51,000,000</u>	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,761,791,647	1,028,597,770	58.38 %
	JUMLAH PROGRAM				1,761,791,647	1,028,597,770	58.38 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Untuk mendukung capaian 12 indikator SPM Bidang Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1,761,791,647 ,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1,028,647,245,- (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 58,38 %.

4. Dukungan Personil

Dinas Kesehatan juga merupakan salah satu dinas besar yang jangkauan pelayanannya sampai ke kecamatan diseluruh wilayah kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dinas Kesehatan kabupaten Tanah Datar didukung oleh ribuan personil yang tersebar diseluruh jajaran dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Jumlah personil tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.12
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan

No.	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian	Jumlah
1	X. KOTO I	2	1	0	4	13	1	1	2	1	2	27
2	X. KOTO II	3	1	0	4	13	2	1	1	1	1	27
3	SINGGALANG	1	1	0	6	11	1	1	1	2	2	26
4	BATIPUH I	2	1	0	3	16	2	1	2	2	2	31
5	BATIPUH SELATAN	1	1	0	8	17	2	1	1	2	2	35
6	RAMBATAN I	1	1	0	8	15	1	2	1	1	2	32
7	LIMA KAUM I	3	1	0	7	8	1	1	2	2	3	28
8	LIMA KAUM II	2	1	0	6	10	2	1	1	1	2	26
9	TANJUNG EMAS	2	6	0	7	19	2	2	1	1	2	42
10	BATIPUH II	1	1	0	5	8	1	1	1	1	2	21
11	PAGARUYUNG	1	1	0	4	6	2	1	1	2	2	20
12	PADANG GANTING	2	1	0	8	12	1	1	1	3	3	32
13	LINTAU BUO	2	1	0	11	19	4	1	1	1	2	42
14	LINTAU BUO UTARA II	1	1	0	7	16	2	1	1	1	2	32
15	SUNGAYANG	2	1	0	6	15	1	1	1	1	1	29
16	SUNGAI TARAB I	3	1	0	6	11	2	1	1	2	1	28
17	SUNGAI TARAB II	5	6	0	4	8	1	1	1	1	3	30
18	GURUN	1	1	0	5	11	1	1	1	1	1	23
19	SALIMPAUNG	2	1	0	8	19	4	1	1	3	2	41
20	TANJUNG BARU	1	1	0	6	11	2	1	1	1	2	26
21	PARIANGAN	2	2	0	9	15	1	0	1	1	2	33
22	RAMBATAN II	6	1	0	6	17	2	1	0	1	1	35
23	LINTAU BUO UTARA I	2	1	0	10	18	4	0	2	3	1	41
24	RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	19	1	29	199	30	0	4	17	9	23	331
Total		67	35	29	347	338	42	27	43	44	66	1038

5. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian SPM terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahun 2025, sebagai berikut :



Tabel 4.13

Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			87.48 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					94.55 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	75.61 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	3810	3601	209	94.51 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.93 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	508	424	84	83.46 %	
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	685800	685620	180	99.97 %	
	(180 tablet x jumlah ibu hamil)						
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	3810	3706	104	97.27 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3810	3706	104	97.27 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3810	3706	104	97.27 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	572	572	0	100.00 %	
	(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)						
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3810	3809	1	99.97 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3810	3809	1	99.97 %	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4191	4191	0	100.00 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	254	254	0	100.00 %	
	(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)						



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	177	96	81	54.24 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)						
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	383	390	-7	100.00 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)						
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432	392	40	90.74 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	73	71	2	97.26 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
2 .	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	3810	3809	1	99.97 %	
	(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)						
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					89.94 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	72.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	3431	3088	343	90.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.94 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.70 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	3431	3468	-37	100.00 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3431	3468	-37	100.00 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4191	3468	723	82.75 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	177	96	81	54.24 %	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)						



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	432	390	42	90.28 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	432	392	40	90.74 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	73	71	2	97.26 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					90.31 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	73.95 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		Orang	3427	3168	259	92.44 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	16.36 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						81.81 %	
1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)		Vaksin	3427	3	3424	0.09 %	
2 . Vitamin K1 Injeksi		Ampul	3427	3168	259	92.44 %	
3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)		Orang	3427	3168	259	92.44 %	
4 . Formulir bayi baru lahir		Formulir	3427	3168	259	92.44 %	
5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)		Formulir	3427	9504	-6077	100.00 %	
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		Buku	4191	3168	1023	75.59 %	
7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)		Paket	23	23	0	100.00 %	
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak		Orang	432	95	337	21.99 %	
9 . Tenaga kesehatan : Bidan		Orang	432	390	42	90.28 %	
10 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang	432	392	40	90.74 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	73	71	2	97.26 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	23	37	-14	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	3202	3202	0	100.00 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					70.25 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	54.25 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	18268	12387	5881	67.81 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.02 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	18268	12387	5881	67.81 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	18268	12387	5881	67.81 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18268	12387	5881	67.81 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1731	1255	476	72.50 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	29392	13263	16129	45.12 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1736	1896	-160	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	579	2611	-2032	100.00 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	868	739	129	85.14 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	1157	1831	-674	100.00 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	1157	969	188	83.75 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	1387	1164	223	83.92 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1387	323	1064	23.29 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	51646	26178	25468	50.69 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	615	615	0	100.00 %	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	23	23	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	153	91	62	59.48 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	432	390	42	90.28 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	432	392	40	90.74 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	1	0	1	100.00 %	
	21 . Kader kesehatan	Orang	3202	3202	0	100.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					93.82 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	74.84 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	52422	49039	3383	93.55 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.98 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.91 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/Buku	52422	49039	3383	93.55 %	
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)						
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	1	1	0	100.00 %	
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)						
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	52422	49039	3383	93.55 %	
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)						



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	4290	4240	50	98.83 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00 %	
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	614120	614120	0	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	46	46	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	5970	5970	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	6523	1470	5053	22.54 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	46	126	-80	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	390	-344	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	69	392	-323	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	46	-23	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	71	-48	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	37	-14	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	429	429	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	4290	4290	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					54.79 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	38.23 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	175068	83664	91404	47.79 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.56 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.79 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	46	23	23	50.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	233	233	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	76	76	0	100.00 %	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	23	23	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	175068	83664	91404	47.79 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	24	24	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	46	23	23	50.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	23	23	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	175068	83664	91404	47.79 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	47	47	0	100.00 %	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	23	23	0	100.00 %	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	23	23	0	100.00 %	
	c. Vasektomi set	Unit	1	1	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	23	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	9756	1107	8649	11.35 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109	91	18	83.49 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402	390	12	97.01 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419	392	27	93.56 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	37	-1	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3202	3202	0	100.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					99.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	79.76 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	43547	43418	129	99.70 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.46 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.32 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	800	800	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23	23	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23	23	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	43547	43418	129	99.70 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	43547	43418	129	99.70 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	43547	43418	129	99.70 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109	91	18	83.49 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402	390	12	97.01 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419	392	27	93.56 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	37	-1	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3202	3202	0	100.00 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					62.82 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	44.18 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	20045	11070	8975	55.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.64 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.21 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	20045	11070	8975	55.23 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	233	233	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	23	23	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	23	23	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109	91	18	83.49 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402	390	12	97.01 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419	392	27	93.56 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	23	37	-14	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	73	71	2	97.26 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	37	-1	100.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					99.29 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	3071	3294	-223	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.29 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.45 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3071	3294	-223	100.00 %	
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)						
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	23	23	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3071	3294	-223	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	23	23	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109	91	18	83.49 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	402	390	12	97.01 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	419	392	27	93.56 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	73	71	2	97.26 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	36	37	-1	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	50	46	4	92.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	51	48	3	94.12 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					95.70 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	786	786	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.70 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.51 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	23	23	0	100.00 %	
	(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)						
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Paket	786	786	0	100.00 %	
	(pengobatan/medikasi)						
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	304915	7861	297054	2.58 %	
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)						
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	23	23	0	100.00 %	
	(pencatatan dan pelaporan)						
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	23	23	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	109	91	18	83.49 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	46	46	0	100.00 %	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	730	150	580	20.55 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					99.11 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS		Orang	5000	5087	-87	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	19.11 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						95.56 %	
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		Paket	5000	5087	-87	100.00 %	
2 . Reagen Zn TB		Kit	167	167	0	100.00 %	
3 . Masker bedah dan Masker N95		Paket	30000	30000	0	100.00 %	
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		Paket	5000	5087	-87	100.00 %	
5 . Katrid tes cepat molekuler		Tes	5000	5087	-87	100.00 %	
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan		Dokumen	5000	5087	-87	100.00 %	
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)		Dokumen	35	35	0	100.00 %	
8 . Tuberkulin		Vial	3000	3000	0	100.00 %	
9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru		Orang	43	97	-54	100.00 %	
10 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang	58	392	-334	100.00 %	
11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian		Orang	35	71	-36	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	37	-14	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	24	48	-24	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	24	8	16	33.33 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	3202	3202	0	100.00 %	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	3810	4687	-877	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3810	4687	-877	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	3810	4687	-877	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3810	4687	-877	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3810	4687	-877	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	31	95	-64	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	390	-363	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	392	-365	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27	48	-21	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23	37	-14	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	54	54	0	100.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Pada Tahun 2025 hampir semua Penerima Layanan Dasar tidak mencapai hasil 100% termasuk pada pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penting melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit factor resiko penyakit tidak menular.
2. Pada indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit faktor resiko penyakit tidak menular.
3. Pada indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit faktor resiko penyakit tidak menular.

Solusi:

1. Diharapkan kedepannya tumbuh kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini sehingga resiko akan penyakit dapat di minimalisir.
2. Petugas agar lebih dalam sosialisasi ke masyarakat, ataupun jemput bola ke masyarakat.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah Kab. Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

Tabel 4.14
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Rekap Target
			(Harus Dilayani)
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	1404
	*tidak masuk dalam hitungan		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1404
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	JARINGAN PERPIPAAN		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	351
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	351
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		Rekap Target
			(Harus Dilayani)
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	1600
	*tidak masuk dalam hitungan		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1600
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	KUANTITAS SPALD		
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400
	KUALITAS SPALD		
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	400
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	400

3. Anggaran

Alokasi anggaran Pemerintah Kab. Tanah Datar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Penerapan SPM urusan pekerjaan umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TANAH DATAR				8,514,854,400	8,501,025,210	99.84 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				323,214,400	322,705,816	99.84 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			323,214,400	322,705,816	99.84 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1.03.03.2.01.00 32	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	323,214,400	322,705,816	99.84 %
	JUMLAH INDIKATOR				323,214,400	322,705,816	99.84 %
	JUMLAH PROGRAM				323,214,400	322,705,816	99.84 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6,191,640,000	6,178,319,394	99.78 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			6,191,640,000	6,178,319,394	99.78 %
	1.03.05.2.01.00 22	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	6,191,640,000	6,178,319,394	99.78 %
	JUMLAH INDIKATOR				6,191,640,000	6,178,319,394	99.78 %
	JUMLAH PROGRAM				6,191,640,000	6,178,319,394	99.78 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	PAMSIMAS 2025		2,000,000,000	2,000,000,000	100.00 %

Berdasarkan tabel alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Datar dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 8.514.854.400,- dengan realisasi Rp. 8.501.025.210,- sehingga pada bidang pekerjaan umum diperoleh persentasi realisasi anggaran mencapai 99,84%.

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemerintah Kab. Tanah Datar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.16

Jumlah Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	NAMA	JUMLAH (ORANG)
A.	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Magister Teknik	-
2.	Sarjana Teknik	8
3.	Sarjana Muda	-
4.	SMA/Sederajat	3
B.	Pegawai Honor/Tenaga Kontrak	
1.	Pegawai Honor/Tenaga Kontrak	-
Total		11

5. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian SPM terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah

Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025, sebagai berikut

Tabel 4.17

Hasil capaian SPM Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					97.83 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	1404	1916	-512	1,916.00 %	
	*tidak masuk dalam hitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1404	1916	-512	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
						100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	351	510	- 1.590.000	100.00 %	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	351	510	- 1.590.000	100.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					95.65 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	1600	1513	87	1,513.00 %	
	*tidak masuk dalam hitungan						



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			-80%		75.65 %	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum Terlayani		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1600	1513	87	94.56 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)			-20%		20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	KUANTITAS SPALD					100.00 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	400	0.0000	100.00 %	
	KUALITAS SPALD					100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	400	400	0.0000	100.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.0000	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	400	400	0.0000	100.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.18
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada nya data by name by address yang valid	-
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	
	Masih belum optimalnya anggaran untuk kegiatan SPM	Dilakukan Penyesuaian target
4.	Pelaksanaan	
	Khusus untuk sanitasi masih kurang nya pemikiran masyarakat tentang sadar stunting	-
5.	Pelaporan	
	Tidak ada permasalahan	-
6.	Lain-Lain	
	Tidak ada permasalahan	-

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS DILAYANI)	BATAS WAKTU CAPAIAN (TAHU N)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota				Dinas Perkim LH
1	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	138	2026	
2	Mutu Barang/ Jasa				
	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	-	
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		1	2026	
	c. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	-	
	d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana		138	2026	
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota				Dinas Perkim LH
1	Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	-	
2	Mutu Barang/ Jasa				
	a. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		0	-	
	b. Subsidi uang sewa		0	-	
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	-	

3. Anggaran

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan perumahan rakyat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	4.000.000	2.605.050	65.13
2.	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	9.000.000	7.107.300	78.97
3.	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	4.000.000	3.484.250	87.11
4.	Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat atau sukarelawan tanggap bencana	5.000.000	3.162.000	63.24
5.	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	25.000.000	20.098.500	80.39
6.	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana	5.000.000	4.676.000	93.52
7.	Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	2.500.000	2.013.000	80.52
Total				54.500.000	43.146.100	79.17

Berdasarkan tabel alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Datar dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 8,349,500,000 dengan realisasi Rp 8,349,500,000 sehingga pada bidang perumahan rakyat diperoleh persentasi realisasi anggaran mencapai 60.31%.

Anggaran diatas sudah termasuk bantuan stimulan perbaikan/pembangunan rumah terdampak bencana sebanyak 139 unit dari BNPB dengan anggaran sebesar Rp. 8.295.000.000.

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.21

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JUMLAH (ORANG)
1	Sarjana Teknik Sipil	2
2	Sarjana Teknik Elektro	1
3	Sarjana Hukum	1
4	Sarjana Muda (A.Md) Akuntansi	1
5	Sarjana Muda (A.Md) Teknik Sipil	1
Total		6

5. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian SPM terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.22

Hasil capaian SPM Perumahan rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (JUMLAH YANG HARUS TERLAYANI)	REALISASI		
				JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	JUMLAH TOTAL YANG BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota					100
	1. Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	138	109	29	78.99
	2 Mutu Barang/ Jasa					
	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	0	0	0
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		1	1	0	100
	c. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	0	0	0
	d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana		138	83	55	60.14
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota					100
	1. Yang Harus Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang terkena relokasi akibat program	0	0	0	0

		Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
2	Mutu Barang/ Jasa					
	a. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		0	0	0	0
	b. Subsidi uang sewa		0	0	0	0
	c. Penyediaan rumah layak huni		0	0	0	0

Catatan : Pada tahun 2025 tidak ada relokasi program pemerintah yang ditetapkan oleh kepala daerah

6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.23

Permasalahan dan Solusi

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Agak sulit melakukan pendataan pada lokasi rawan bencana melalui wawancara karena kejenuhan masyarakat terhadap kegiatan pendataan rumah	Memberikan penjelasan kepada masyarakat dibantu oleh pihak Pemerintahan Nagari agar masyarakat bersedia untuk dilakukan pendataan
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	penghitungan kebutuhan baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana	Melakukan perhitungan kebutuhan sesuai anggaran yang tersedia
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	
	- Karena pemenuhan SPM terkait bencana maka agak sulit untuk membuat perencanaan karena tidak bisa memprediksi kejadian bencana - Terbatasnya anggaran	- Tetap dianggarkan kegiatan untuk penunjang SPM - Memberikan penjelasan kepada TAPD terkait kewajiban pemenuhan SPM
4.	Pelaporan	
	- Pelaporan melalui aplikasi e-SPM masih terkendala	-Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaporan SPM

E. BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a. Trantibum (Satpol PP)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Pelayanan Dasar yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi kabupaten/kota dan Peraturan Meteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar teknis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub Urusan ketentraman dan ketertiban yang berhak di peroleh oleh setiap warga Negara Indonesia yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari} \\ \text{penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak mendapat} \\ \text{layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada}} \times 100 \%$$

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan perda dan perkada meliputi :

- a. Pelayanan Kerugian materil
- b. Pelayanan pengobatan

Satpol PP dan damkar Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 belum mengganggu pelayanan tersebut.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target pelayanan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi kabupaten/kota dan Peraturan Meteri dalama Negeri nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.

Di tahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada. Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capaiannya:

Tabel 4.24

Target Pencapaian SPM Daerah Urusan Trantibum

No	Jenis Layanan	Indikator Kinerja	target
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%

3. Anggaran

Anggaran yang dialokasi untuk pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Trantibum

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1.199.430.243	1.122.281.710	93,57
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.315.200,00	88.676.200	69,11
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan	110.315.200,00	1.500.000	100,00
2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	16.500.000,00	72.499.600	65,72
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	1.500.000,00	14.676.600	88,95
	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.068.615.043,00	1.031.113.010	96,49
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.068.615.043,00	1.031.113.010	96,49
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.492.500	99,70
1	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	2.500.000,00	2.492.500	99,70

4. Dukungan Personil

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas didukung oleh 62 orang anggota terdiri dari:

Tabel 4.26

DAFTAR PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	27 orang
2	PPPK	3 orang
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	32 orang



Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar lebih sedikit Pegawai Negeri Sipil (ASN) dibandingkan dengan Tenaga Harian Lepas (THL).

5. Hasil Capaian SPM

Hasil Capaian SPM Urusan Trantibum (Satpol PP dan Damkar) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27

Hasil capaian SPM urusan Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						95.13 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					95.13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	115	-15 %	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20% 15.13 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP					
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	324	324	0	100.00 %
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023					
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	5	5	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***					
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	63	34	29	53.97 %
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil					
	(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	0	1	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan					
	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	0	1	100.00 %

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Belum semua mutu layanan terpenuhi, karena belum lengkapnya sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan
2. Belum tersedia anggaran yang memadai untuk mencapai target SPM
3. Kurangnya SDM dalam pencapaian target
4. Kualitas SDM yang belum memadai

Solusi :

1. Menentukan target SPM yang diselaraskan dengan target pusat dan propinsi
2. Memberikan pelatihan pada personil untuk pencapaian SDM
3. Menganggarkan kegiatan untuk pencapaian target SPM
4. Menyiapkan sarana dan prasarana

b. Kebencanaan (BPBD)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- Respon cepat darurat bencana
- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.28
Target Pencapaian SPM Kebencanaan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	62099
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	150
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	16
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	164
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	37
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	382674
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkada	dokumen	1
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	11
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	11
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops	unit	6



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	(sesuai dengan kebutuhan)		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	6
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)		
			Jumlah
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	383958
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	14
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	11
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	11

1. Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 bersumber dari dana APBD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.29

Alokasi anggaran SPM Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5.257.500	4.915.900	
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	0	0	
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	5.257.500	4.915.900	APBD
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	528.257.700	521.565.802	
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	8.287.500	8.010.550	APBD
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	0	0	
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	14.705.000	14.245.750	APBD
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	484.615.200	482.308.377	APBD
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.000.000	12.587.625	APBD
	g. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	7.650.000	4.413.500	APBD
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1.000.000	994.650	

	Bencana			
	a. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	1.250.000	1.250.000	APBD
	b. Respon Cepat Darurat Bencana			
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	382.350.359	339.620.627	
	a. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	382.350.359	339.620.627	

2. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar didukung oleh personil dengan jumlah 41 orang, yang terdiri dari 25 ASN dan 16 Orang Tenaga Jasa Lainnya.

Tabel 4.30

Dukungan personil SPM Urusan Kebencanaan
Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS GOL IV	4
2	PNS GOL III	17
3	PNS GOL II	4
4	Pegawai Non ASN	16
Total		41

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada BPBD dapat dikelompokkan menjadi tamatan S2 sebanyak 6 (enam) Orang, S1 sebanyak 16 (enam belas) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang dan SMA sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Tabel 4.31

Dukungan personil SPM Urusan Kebencanaan
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	5
2	S1	15
3	D3	2
4	SLTA	17
Total		41

3. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.32

Hasil capaian SPM urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					94.58 %	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				98.97 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %	
			Jumlah	Jumlah		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	62099	62099	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					18.97 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				94.86 %	
1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana			0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	100.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	100.00 %	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	89.72 %	
1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					89.17 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
	*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	150	85	56.67 %	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	16	16	100.00 %	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100.00 %	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				80.00 %	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	3	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8	8	100.00 %	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0.00 %	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	164	164	100.00 %	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	37	37	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100.00 %	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				94.78 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	382674	382674	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				14.78 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG				73.89 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	100.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	100.00 %	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0.00 %	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	100.00 %	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	11	11	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100.00 %	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	100.00 %	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	11	11	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	100.00 %	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	100.00 %	
	1) . Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara	orang	0	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
	simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)					
	2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	100.00 %	
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	93.33 %	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				73.33 %	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	100.00 %	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	4	100.00 %	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	2	66.67 %	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	0	0.00 %	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100.00 %	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	100.00 %	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	100.00 %	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan	paket	6	6	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
	penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)					
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	100.00 %	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	50.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14	100.00 %	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0.00 %	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0.00 %	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	100.00 %	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				90.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %	
			Jumlah	Jumlah		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	383958	383958	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				10.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				50.00 %	
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0.00 %	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0	0	0.00 %	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0	0.00 %	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	AKSI
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	14	14	100.00 %	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	100.00 %	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	100.00 %	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	11	11	100.00 %	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	100.00 %	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	11	11	100.00 %	

4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2025 adalah :

- Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan kebencanaan.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana
- Belum sinerginya upaya implementasi Standar Pelayanan Minimal

2. Solusi

- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara/masyarakat.

- b. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana.
- c. Melakukan upaya implementasi penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) secara sinergi

c. Damkar (Satpol PP)**1. Jenis Pelayanan Dasar****1. Pelayanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran**

Pelayanan dasar bidang pemadam kebakaran adalah: Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Dengan sasaran /indikator kinerja kegiatan:

- a. Layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat /relawan kebakaran
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dalam tingkat waktu tanggap (respon time)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100 \%$$

2. Pelayanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar)

Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (balakar, satlakar atau dan komunitas lainnya)yang dibentuk dan atau dibawah Satpol PP dan Damkar, dengan sasaran /indikator kinerja kegiatan:

- a. Layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat /relawan kebakaran
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman,dalam tingkat waktu tanggap} \\ \text{(respon time) yang dilakukan oleh Balakar}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100 \%$$

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)

Layanan penyelamatan dan evakuasi pasca kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran, dengan sasaran/indicator kinerja yaitunya Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

Dengan Rumus :

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dalam tahun 2025.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target pelayanan SPM Urusan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi kabupaten/kota dan Peraturan Meteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.

Di tahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada. Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capaiannya:

Tabel 4.33

Target Pencapaian SPM Daerah Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
			Jumlah Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	180
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	333
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	58
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	14
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	1

3. Anggaran

Anggaran yang dialokasi untuk pencapaian SPM Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.34
Anggaran SPM urusan kebakaran

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1.948.239.000	1.334.063.594	68,48
	Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	1.948.239.000,00	1.334.063.594	59,23
	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.948.239.000,00	1.334.063.594	68,48
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.945.739.000,00	2.500.000	100,00
2	Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	2.500.000,00	1.331.563.594	68,43

4. Dukungan Personil

Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas didukung oleh 56 orang anggota terdiri dari:

Tabel 4.35
DAFTAR PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK
BIDANG DAMKAR

NO.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	8 orang
2	PPPK	20 orang



3	Tenaga Harian Lepas (THL)	28 orang
---	---------------------------	----------

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar lebih sedikit Pegawai Negeri Sipil (ASN) dibandingkan dengan Tenaga Harian Lepas (THL).

5. Hasil Capaian SPM

Tabel 4.36
Hasil capaian SPM Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						99.77 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.77 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	100.00 %		
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	19.77 %		
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.85 %		
1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	180	198	-18	100.00 %		
2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5	5	0	100.00 %		
Data Dukung : 1304-20250411104242SOP DAMKAR.pdf Status : Approved							
Catatan : Maximal 10 Mb							
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	333	333	0	100.00 %		
4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	58	54	4	93.10 %		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	14	0	14	100.00 %	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	1	0	1	100.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Belum semua mutu layanan terpenuhi, karena belum lengkapnya sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan
2. Belum semua Nagari membentuk relawan kebakaran
3. Belum tersedia anggaran yang memadai untuk mencapai target SPM
4. Kurangnya SDM dalam pencapaian target
5. Kualitas SDM yang belum memadai

Solusi :

1. Menentukan target SPM yang diselaraskan dengan target pusat dan propinsi
2. Memberikan pelatihan pada personil untuk pencapaian SDM
3. Menganggarkan kegiatan untuk pencapaian target SPM
4. Menyiapkan sarana dan prasarana

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM Daerah

Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 Bidang Sosial sebagai berikut :

Tabel 4.37

Target Penerapan SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	151
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2000
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	151
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	5
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	13 . Layanan rujukan	Orang	5



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	200
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	200
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	15
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	200
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	370
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10
	12 . Layanan rujukan	Orang	5
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	217
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	6000
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	217
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	13 . Layanan rujukan	Orang	5
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	5
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	5
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	12 . Layanan rujukan	Orang	5
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	80
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	10
	2 . Penyediaan sandang	Orang	10
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	80
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	10

3. Anggaran

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Sosial dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.38
Alokasi anggaran SPM Urusan Sosial

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SERAPAN (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	748.000.000	611.500.000	81,75%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000	220.500.000	73,5%
2.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	84.000.000	83.810.000	99,77%

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Sosial dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.39
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Sosial

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat		
2	Sekretaris	1	
3	Perencana Ahli Muda	1	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
5	Analisis Perencanaan dan Program Kegiatan	1	

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
6	Pengadministrasi Umum	1	
7	Penata Laporan Keuangan	1	
8	Bendahara	1	
9	Verifikator Keuangan	1	
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	
11	Pengemudi	1	
	Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial		
12	Kabid.	1	
13	Pekerja Sosial Madya	1	
14	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
15	Pekerja Sosial Penyelia	2	
16	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	
17	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin.	1	
18	Kabid.	1	
19	Pekerja Sosial Ahli Muda	3	
20	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
21	Kabid.	1	
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
23	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	
	Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
24	Kabid.	1	
25	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
26	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	1	
27	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	

Berdasarkan Tabel Dukungan Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan pemenuhan SPM Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa personil berupa ASN terdiri dari 36 orang.

5. Hasil Capaian SPM

Capaian SPM terhadap Target Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada tahun 2025, sebagai berikut :



Tabel 4.40
Hasil Capaian SPM Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	151	151	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2000	2000	0.00	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	151	151	0.00	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	13. Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	200	200	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	200	200	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	200	200	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	370	370	0.00	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	217	217	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	6000	6000	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0.00	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	217	217	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	5	5	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	0.00	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	80	80	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	0.00	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	80	80	0.00	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	10	10	0.00	100.00 %	

6. Permasalahan dan Solusi

NIHIL

G. Program dan Kegiatan

1. Urusan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan urusan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Mengengah Pertama
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

2. Urusan Kesehatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kesehatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 tersebut adalah:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Program dan Kegiatan urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Urusan Perumahan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan pelayanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Untuk melaksanakan pelayanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakannya dalam beberapa Program dan Kegiatan, seperti dalam tabel berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota
 - 3) Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota

- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

5. Urusan Trantibumlinmas

Sub Urusan Trantibum (Satpol PP)

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamomng Praja Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Urusan Kebencanaan (BPBD)

Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Bencana
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Urusan Damkar (Damkar)

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pencegahan pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Urusan Sosial

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Dinas Sosial dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial pada tahun 2025, memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial



- b. Program Program Penanganan Bencana
 - 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan *progress report* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan sumber dana lainnya (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta kerja sama dengan pihak lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, semoga dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajiannya, terima kasih.

Batusangkar, Maret 2026